

Harga
Jawa Rp. 8000,-
Luar Jawa Rp. 15.000,-

Edisi 247
8 - 21 Dzulhijjah 1440 H
9 - 22 Agustus 2019

Media ^{t a b l o i d}umat

mediaumat.news

Memperjuangkan Kehidupan Islam



HADANG FPI, REZIM MAKIN REPRESIF

■ **WAWANCARA**
Shobri Lubis,
Ketua Umum FPI
Di Zaman Jokowi
Banyak Ketidakadilan

■ **CERMIN**
Ketika
Makkah-Madinah
di Bawah Khilafah
Utsmaniyah

■ **MEDIA NASIONAL**
Ijtima Ulama IV:
Penegakan Syariah
dan Khilafah adalah
Kewajiban Islam

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuhu

Salam Perjuangan!

Alhamdulillah, kami bisa hadir kembali ke ruang baca Anda di awal bulan Dzulhijjah 1440 H. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dalam lindungan Allah SWT dalam menjalankan seluruh aktivitas. Aamiin

Pembaca yang dirahmati Allah, setiap memasuki bulan Dzulhijjah, kita diingatkan tentang sebuah ketundukan yang luar biasa, bagaimana Nabi Ibrahim As mengorbankan anaknya Nabi Ismail as. Padahal, Nabi Ismail adalah anak semata wayang yang begitu ditunggu-tunggu kehadirannya setelah berpuluh tahun Nabi Ibrahim tak memiliki keturunan. Namun, begitu Nabi Ismail sedang lucu-lucunya, tiba-tiba ada perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk mengorbankan anak kesayangannya ini.

Lebih aneh lagi, dalam logika awam, Nabi Ismail pun tak menolak ketika mendengar perintah Allah tersebut. Coba bayangkan, bagaimana anak ini bisa menerima dengan ikhlas untuk disembelih. Tapi itulah kenyataannya.

Nah, akhirnya kita tahu. 'Tangan Allah' yang bergerak. Saat Nabi Ismail mau disembelih, Allah ganti beliau dengan seekor domba. Nabi Ismail selamat, Nabi Ibrahim pun bahagia. Inilah buah ketundukan yang hakiki kepada Allah SWT.

Pelajaran yang bisa diambil, perintah Allah SWT pasti akan memberikan kebaikan. Tak mungkin Allah SWT akan menzalimi manusia dengan perintah dan larangan-Nya. Yang kedua, Allah menguji orang-orang beriman dengan berbagai kondisi, sejauh mana keyakinannya itu terwujud secara nyata. Tidak sekadar ucapan belaka.

Pembaca yang dirahmati Allah, di bulan Dzulhijjah ini pula kita menyaksikan sebuah syiar Islam terbesar di dunia yang menyatukan kaum Muslim dari seluruh dunia. Sungguh ini adalah hajat

luar biasa pada satu tempat dan waktu. Tak ada perbedaan satu dan yang lain. Segala perbedaan duniawiyah ditanggalkan, apakah jabatan, kesukuan, kebangsaan, kekayaan, dsb. Lagi-lagi, ini adalah wujud ketundukan kaum Muslim atas perintah Allah SWT.

Tapi sayang, persatuan itu hanya sekadar ubudiyah. Belum menjelma menjadi persatuan hakiki. Ini terbukti ketika mereka kembali ke tempat asalnya, mereka tersekat-sekat lagi ke dalam negara bangsa. Tak peduli satu dengan yang lain. Terpecah belah dan tercerai berai. Persis seperti prediksi Nabi SAW bahwa umat ini laksana buih di lautan. Banyak tapi berserakan.

Pembaca yang dirahmati Allah, nasib umat Islam belum menunjukkan perbaikan di negeri ini. Yang terbaru, menimpa Ormas Islam Front Pembela Islam (FPI). Ormas yang lantang dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar ini harus menerima kenyataan bahwa pemerintah belum memperpanjang Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Padahal puluhan tahun Ormas yang dipimpin oleh Habib Rizieq Shihab ini tak pernah dipermasalahkan.

Lagi-lagi tuduhan radikal dijadikan dalih. Dianggap anti Pancasila, anti kebhinekaan, intoleran, dan sebagainya. Ini seolah mengingatkan kembali dengan nasib Hizbut Tahrir Indonesia yang dicabut Badan Hukum Perkumpulan (BHP)-nya. Sebab, tuduhannya pun sama. Ada apa?

Pembaca yang dirahmati Allah, masalah radikalisme terus digaungkan. Mengapa itu terjadi? Benarkah ini digunakan untuk menggebuk Islam? Ikuti di Fokus.

Tak lupa kami sampaikan Selamat Idul Adha 1440 H. Semoga kita bisa meneladani ketundukan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam melaksanakan aturan Allah SWT.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuhu

MEDIA PEMBACA



Haji Momen Persatuan Islam

Tak lama lagi jutaan kaum Muslim dari berbagai penjuru dunia akan berkumpul di Tanah Suci, menggemakan kalimat tauhid, mempersembahkan ibadah haji yang agung ke hadapan Allah SWT.

Pelaksanaan haji memiliki banyak hikmah. Yang penting. *Pertama*: Haji adalah ibadah yang menunjukkan ketaatan dan pengorbanan. *Kedua*: Ibadah haji adalah simbol tauhid. *Ketiga*: Berhaji juga menapaktilasi jejak bersejarah dan spiritual mulai dari nabi Ibrahim dan nabi Ismail as, hingga Rasulullah SAW. *Keempat*: Ibadah haji juga mengajari kaum muslim mengendalikan amarah dan permusuhan. *Kelima*: Ibadah haji adalah tempat sekaligus momen meleburnya jutaan muslim dari segenap penjuru dunia. Inilah sebagian kegemilangan ajaran Islam yang mampu mengikat manusia dalam satu ikatan yaitu ikatan Islam.

Namun sayang ibadah haji yang mengumpulkan dan meleburnya jutaan orang dalam satu tempat dan satu waktu belum mampu mengantarkan persatuan yang hakiki dan berkelanjutan. Kaum Muslim harus membangun persatuan yang hakiki dan mengganti ikatan kesukuan dan kebangsaan mereka dengan Ukhuwah Islamiyah, satukan hati, jadikan kalimat tauhid sebagai pemersatu kita. Karena kita adalah umat yang satu, bertuhankan satu, Allah SWT. Berhukum satu: Alquran. Dengan persatuan dibawah kalimat Tauhid itulah Allah SWT akan menolong dan memuliakan kita. **Ety.**

Cipicung. +6281214889xxx

Totalitas Beragama

Di era modern saat ini, banyak sekali kita temui keberagaman budaya. Mulai dari budaya berpakaian, makanan, adat serta tradisi. Yang tak jarang pula tidak berasal dari Islam dan justru bertentangan.

Pun juga kita temui banyak sekali opini yang mengandung maslahat padahal membawa petaka bagi kaum Muslim sendiri. Atau sebaliknya, menyebarkan opini yang seakan-akan itu buruk padahal justru itulah kebenaran.

Sebagai Muslim kita wajib mengerti dan kritis dalam membedakan serta menyeleksi semuanya. Tidak terhasut pemikiran kaum misionaris yang bobrok nan sekuler.

Lalu juga sesama antar kaum Muslimin, tak seharusnya saling memusuhi satu sama lain. Justru harus bersatu. Memperkuat keimanan antar sesama. Memerangi musuh musuh Allah yang sedang berjuang. **Diarcy Alifiyori. SMAIT Al Amri Probolinggo. +62 813-3681-4xxx**

Cintailah Islam

Permusuhan dan kebencian tidak otomatis tampak dari setiap orang kafir baik ahlul kitab maupun orang musyrik. Namun permusuhan tampak dari sebagian kaum kafir melalui lisan-lisan mereka. Itu barulah sebagian dari kebencian yang tersembunyi di dalam dada mereka.

Setiap kebencian kepada Islam (*islamophobia*) banyak muncul dari kaum kafir. Kebencian dan permusuhan yang tersimpan di dada mereka itu membuat bersikap nyinyir terhadap berbagai ajaran Islam seperti penerapan syariah secara kaffah dan khilafah. Mereka tidak suka berbagai simbol dan syiar Islam. Mereka menyoal dan merendahkan hijab (jilbab), meradang melihat panji Ar-Rayah dan Al-Liwa dikibarkan oleh siswa tingkat SMA. Gerah melihat semangat hijrah menuju Islam di berbagai kalangan khususnya kepada Muslim. **Ummu Hanafi. Raharja Plaza. +62 831-7481-0xxx**



Majelis Taqarub Ilallah (MTI) Kota Makassar menyelenggarakan *Bedah Tabloid Media Umat: 'Masa Depan Umat Pasca Pemilu dan Pilpres 2019'*, Ahad (28/7). Tampil sebagai pembicara Prof Abdul Muin, Harist Abu Mutiah, dan Mujiyanto.[]

MediaUmat tabloid
mediaumat.news
Memperjuangkan Kehidupan Islam

SMS/WA Berlangganan: 0857 1713 5759

Penerbit: Pusat Kajian Islam dan Peradaban. **Penasihat Hukum:** Achmad Michdan, Ahmad Khozinudin. **Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi:** Farid Wajidi. **Pemimpin Perusahaan:** Anwar Iman. **Redaktur Pelaksana:** Humaidi. **Redaksi:** Joko Prasetyo, Fatih Sholahuddin, Ghifari Ramadhan, Zulia Ilmawati, Kholda Naajiyah. **Desain dan Pracetak:** Senyum Adv. **Keuangan:** Ibnu Soetrisno. **Marketing:** Muhammad Ihsan. **Sirkulasi:** Yudi. **Iklan:** Haris. **Alamat Redaksi dan Iklan:** Menara 88 Casablanca, Tower A.10E. Jl. Raya Casablanca No.88, Jakarta Selatan. 12870. **Email:** pembaca.tabloidmu@gmail.com. **Email Iklan:** iklan.tabloidmu@gmail.com. **Email Marketing:** marketing.tabloidmu@gmail.com **Hunting Pemasaran:** 085711044000, SMS: 089650202478. **Hunting Iklan:** 085717135759. **Rekening:** Bank Muamalat No Rek 9064150699 a.n Budi Darmawan.



Oportunis

Sebagai umat Islam, saya memandang bahwa drama penguasa yang berakhir dengan rekonsiliasi kedua paslon sebenarnya sudah cukup menggambarkan begitu oportunisnya para lakon dalam sistem demokrasi.

Ikatan perdamaian didasarkan pada tujuan melanggengkan kepentingan masing-masing. Inilah bukti kegagalan demokrasi yang tidak melahirkan individu yang teguh mempertahankan kebenaran dan membuang jauh keinginan berkompromi dengan kebatilan. Bagaimana tidak? Sebab asas demokrasi sendiri adalah ide sekularis-kapitalistik yang rusak dan merusak.

Maka, sudah selayaknya umat Islam mencampakkan demokrasi dan mengganti sistem yang mengatur bumi ini dengan hukum Islam secara kaffah. Karena Islam menetapkan pembuatan aturan untuk manusia dan alam semesta sepenuhnya sebagai hak prerogatif Allah SWT.

Fahmiyah Tsaqofah Islamiy. Gresik. +62 814-5517-0515

Khilafah Tuntaskan Semua Masalah

Kegagalan rezim dalam pemerintahan saat ini tidak mampu menjalankan fungsi kepemimpinannya, karena tidak memiliki konsep yang kuat dan benar serta berbasis pada azas yang bathil sehingga masalah-masalah yang sangat menyengsarakan dan merugikan rakyat sering terjadi. Misalnya kenaikan BBM yang dalam jangka waktu satu tahun bisa sampai 3x naik. Utang luar negeri yang semakin menumpuk. Lalu janjinya akan mempersulit perizinan investasi asing tapi nyatanya perizinan untuk hal tersebut semakin banyak, dan masih banyak lagi kezaliman rezim ini. Yang paling parah rezim ini (penguasa) sangat anti Islam yang bisa dilihat dari berbagai kebijakan penerbitan perpu yang sangat merugikan diberbagai pihak, menolak Khilafah sebagai ajaran Islam dan mengkriminalisasi ulama, selain anti Islam penguasa juga ternyata menjadi antek asing.

Maka rezim sekuler dan anti Islam ini akan mendatangkan murkanya Allah, selama memakai sistem kafur yang berasal dari ideologi kapitalisme, maka tidak akan pernah beres segala permasalahan manusia.

Adapun solusi dari segala permasalahan umat akibat rezim ini adalah harus ada perubahan yang hakiki, yaitu mengganti sistem kafur dengan sistem Islam, bukan sistem yang lain. Khilafah adalah solusi tuntas bagi umat. Metode penegakan khilafah harus mengikuti metode Rasulullah yaitu dengan penerapan syariat Islam secara kaffah, dan dengan membentuk opini umum tentang pentingnya penegakkan sistem Islam yang harus diterapkan di seluruh alam. **Teh Titin Surtini. Ciparay. +6282219381xxx**

Muslim yang Islamophobia

Terdengar sangat aneh, tapi itulah kenyataan yang terjadi di negeri berpenduduk mayoritas Muslim ini. Dan tak sedikit dari pengidap islamophobia ini adalah mereka yang berpendidikan ilmu agama Islam tinggi, bahkan lulusan Timur Tengah.

Sebenarnya mereka paham bahwa jenggot, celana cingkrang, jilbab, cadar, bendera tauhid, halaqah dan khilafah adalah bagian dari ajaran Islam. Tapi, ketika pemahaman tersebut hanya dijadikan sekadar pengetahuan belaka tanpa diamalkan, ditambah dengan pemikiran sekuler, liberal dan pluralisme yang sudah mengakar, jadilah mereka anti, alergi bahkan sampai mengkriminalisasi dan memonsterisasi ajaran-ajaran Islam tersebut.

Benarlah apa yang telah Rasulullah kabarkan bahwa suatu saat Islam akan kembali asing. Padahal Islam adalah ajaran sempurna yang mengatur kehidupan dan berkehidupan bagi manusia. Ia bersifat preventif dan solutif. Ada rambu-rambu untuk menjaga agar suatu masalah tak terjadi, dan jika terjadipun penyelesaiannya tuntas tanpa membawa masalah baru.

Tidak seperti jika kita menggunakan sistem yang berasal dari terbatasnya akal manusia, penyelesaian masalah seperti gali lubang tutup lubang. **Ummu Abu Dzar. Bogor. +62 858-1151-1xxx**

Redaksi menunggu opini dan pertanyaan Anda terkait perkembangan peristiwa terbaru di sekitar kita. Kirimkan komentar Anda via HP yang tercantum atau ke pembaca.tabloidmu@gmail.com



Pesan Penting Ijtima' Ulama IV

Sebagai bentuk kepedulian terhadap umat dan nasib negeri ini, para ulama kembali berkumpul dalam Ijtima' Ulama IV di Sentul Bogor, Senin (5/8). Pertemuan ini menjadi penting karena diadakan pasca pemilu yang ditengarai banyak kecurangan. Tentu bukan tanpa alasan, kalau dalam ijtima' ulama ini, partai-partai politik tidak dilibatkan. Rekonsiliasi elite politik yang selama ini berseberangan dianggap merupakan bentuk pengkhianatan terhadap perjuangan para ulama dan umat yang selama ini dengan gigih berupaya mencegah kembali berkuasanya rezim yang dianggap anti Islam.

Untuk itu, para ulama dalam keputusan Ijtima' Ulama IV dengan tegas menolak kekuasaan yang berdiri atas dasar kecurangan dan kezaliman. Dalam pertemuan ini para ulama memutuskan mengambil jarak dengan kekuasaan yang didapat dengan cara yang curang dan menolak segala putusan hukum yang tidak memenuhi prinsip keadilan.

Para ulama menegaskan pemilu 2019 adalah pemilu curang yang terstruktur, sistematis, masif, dan brutal. Untuk itu perlu pembentukan tim investigasi dan advokasi terhadap kematian lebih dari 500 petugas pemilu tanpa autopsi, ditambah ada lebih dari 11.000 petugas pemilu yang jatuh sakit serta dirawat di berbagai rumah sakit. Ini adalah tragedi kemanusiaan yang harus diusut tuntas untuk mengetahui sebab musababnya.

Para ulama juga menaruh perhatian besar terhadap tragedi berdarah 21-22 Mei yang menyebabkan ratusan rakyat terluka. Ada yang ditangkap dan disiksa, serta sepuluh orang dibunuh secara sadis dan brutal, empat di antaranya adalah anak-anak. Semua ini merupakan pelanggaran HAM berat yang harus diproses tuntas secara hukum demi tegaknya keadilan.

Mereka meminta rezim menghentikan kriminalisasi para ulama. Mereka pun meminta agar rezim menghentikan agenda pembubaran Ormas Islam dan stop kriminalisasi ulama maupun persekusi dai, serta bebaskan semua ulama dan aktivis 212 beserta sembilan simpatisannya yang ditahan/dipenjara pasca Aksi 212 Tahun 2016 hingga kini dari segala tuntutan. Termasuk memulangkan Imam Besar Umat Islam Indonesia Habib Muhammad Rizieq bin Husein Shihab ke Indonesia tanpa syarat apa pun.

Poin penting dalam Ijtima' Ulama IV ini antara lain menegaskan kembali tentang kewajiban penegakan khilafah Islam: "bahwa sesungguhnya semua ulama ahlussunnah waljamaah telah sepakat penerapan syariah dan penegakan khilafah serta amar ma'ruf nahi munkar adalah kewajiban agama Islam." Perkara ini merupakan hal penting dan strategis. Sebab belakangan ada upaya sistematis untuk mengkriminalkan bahkan melakukan monsterisasi terhadap ajaran khilafah Islam. Padahal jelas-jelas Khilafah Islamiyah adalah bagian dari ajaran Islam dalam sistem pemerintahan. Upaya kriminalisasi ajaran Islam ini, merupakan bentuk penghinaan terhadap agama Islam.

Ironisnya, sikap beberapa kalangan sekuler yang tergadaikan yang turut menyerang ajaran Islam ini, telah membuat orang-orang kafir ikut-ikutan menghina dan menyerang ajaran khilafah Islam. Berbagai tuduhan yang penuh dengan kebohongan mereka kaitkan dengan khilafah Islam, seperti akan menghancurkan negara, meresahkan masyarakat, men-Suriakan Indonesia. Belum lagi berbagai julukan yang menghina ajaran Islam ini mereka lontarkan tanpa takut.

Para ulama juga mengingatkan tentang apa ancaman sejati bagi negeri ini. Tidak lain kapitalisme dan komunisme. Dalam keputusannya, para ulama menolak segala bentuk perwujudan tatanan ekonomi kapitalisme dan liberalisme di segala bidang, termasuk penjualan aset negara kepada asing maupun asing. Dan memberikan kesempatan pada semua pribumi tanpa memandang suku maupun agama untuk menjadi tuan di negeri sendiri. Termasuk mengingatkan kewajiban mencegah bangkitnya ideologi marxisme, leninisme, komunisme, maoisme dalam bentuk apapun dan cara apapun.

Penegakan khilafah Islam sebagai ajaran Islam dan kewajiban yang harus ditegakkan, tentu akan menjadi visi penting arah perjuangan umat Islam. Intinya adalah menjadikan syariat Islam sebagai pengatur segala urusan umat Islam termasuk dalam kenegaraan dan mewujudkan persatuan umat Islam di bawah naungan khilafah tanpa sekat-sekat kesukuaan, ras, maupun kebangsaan. Perkara ini pulalah yang akan bisa membangkitkan umat Islam bukan hanya di Indonesia tapi juga diseluruh dunia. Allahu Akbar! **farid wadjudi**



REZIM KIAN REPRESIF?

Satu lagi organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam dipermasalahkan oleh rezim Joko Widodo. Setelah sebelumnya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), kini Front Pembela Islam (FPI) harus menghadapi kenyataan dicap sebagai organisasi yang tidak sejalan dengan ideologi negara, Pancasila.

Sayangnya, rezim tak menjelaskan secara gamblang di mana ketidaksesuaiannya. Sila ke berapa dari Pancasila yang dilanggar, misalnya. Yang ada hanyalah klaim sepihak. Lalu, dibangun narasi bahwa FPI inilah, itulah, dan seterusnya.

Padahal, semua tahu, FPI bukan Ormas yang baru berdiri kemarin sore. Ormas ini bahkan telah berumur lebih dari 20 tahun. Perannya cukup banyak. Tidak hanya melakukan aksi nahi munkar, tapi juga berperan dalam membantu negara dalam menangani berbagai bencana/musibah di seluruh Indonesia. Saat negara belum hadir, FPI justru sudah terjun di lapangan.

Memang, tak dipungkiri, secara politik, FPI tergolong sebagai kelompok yang berseberangan dengan rezim Jokowi. FPI menjadi salah satu penggerak berbagai aksi pengumpulan massa yang dianggap menjegal kepentingan penguasa. Mulai dari Aksi Bela Islam hingga Reuni 212. Ahok, yang digadang menjadi gubernur DKI Jakarta harus menerima pil pahit, kalah di Pilkada DKI Jakarta padahal ia mendapat dukungan penuh Jokowi dan para pengusaha.

Faktor politik ini tak bisa dipungkiri ada di balik kebijakan rezim Jokowi menolak perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI. Dalih bahwa FPI tidak sejalan dengan ideologi negara menjadi bumbunya.

Kalau AD/ART FPI dipermasalahkan, mengapa baru sekarang? Bukankah AD/ART FPI ya tetap seperti itu dari dulu? Toh, AD/ART pun selalu dilampirkan dalam setiap perpanjangan SKT. Lalu kenapa?

Rezim tampaknya kian jengah dengan FPI. Hingga kini berbagai tawaran 'rekonsiliasi' tak diterima oleh Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab. HRS belum bisa ditundukkan oleh rezim Jokowi meski berbagai cara telah dilakukan. Bisa jadi, perpanjangan SKT ini menjadi salah satu jalan bagi rezim untuk menundukkan FPI.

Kalaulah sekarang masalah kata 'khilafah nubuwwah' yang dipermasalahkan oleh rezim Jokowi, itu kian meyakinkan bahwa rezim ini kian anti Islam kaffah. Bukankah, khilafah itu adalah ajaran Islam. Bahkan, sistem pemerintahan itu jelas-jelas tertuang dalam kitab-kitab ulama besar yang termasyhur.

Lagi pula, khilafah adalah tawaran solusi, bukan pemaksaan kehendak. Alangkah indah, jika rezim pun mempelajari. Jangan sedikit-sedikit yang berbeda dengan pemerintah dikatakan 'radikal'. Telaah dan ajak Ormas Islam untuk menjelaskannya.

Ini adalah sikap yang *fair* yang seharusnya ditampilkan oleh rezim yang memimpin mayoritas Muslim. Jangan malah terjangkiti fobia Islam yang sengaja disebarkan oleh Barat untuk menghangatkan kebangkitan Islam.

Justru harusnya rezim berani menjunjung Islam, karena sebagai Muslim itu adalah kewajiban. Dan, secara empiris, sistem Islam bisa menjadi solusi atas berbagai permasalahan yang mendera negeri ini. Bukankah liberalisme dan kapitalisme telah gagal menyejahterakan rakyat?

Lalu kenapa tidak menengok Islam? Ingatlah, jangan menjadi kaki tangan Barat yang memang punya dendam kepada Islam. Dekati umat, terapkan syariah. Insya Allah berkah! **mujiyanto**



MENGHADANG PEMBASMI KEMUNGKARAN

Front Pembela Islam (FPI) menghadapi nasib yang hampir sama dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Jika dulu HTI dicabut Badan Hukum Perkumpulan (BHP) sebagai salah satu legalitas organisasi kemasyarakatan (Ormas), kini FPI terancam Surat Keterangan Terdaftar (SKT) tak diperpanjang.

Lampu merah bagi FPI ini terungkap dalam wawancara Presiden Jokowi dengan *Associated Press* (AP) pada Jumat (27/7). Ia mengungkapkan kemungkinan tak memperpanjang SKT FPI bila ormas pimpinan Muhammad Rizieq Syihab tersebut dinilai tidak sejalan dengan ideologi bangsa dan mengancam keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Jika pemerintah meninjau dari sudut pandang keamanan dan ideologis menunjukkan bahwa mereka (FPI) tidak sejalan dengan bangsa," kata Jokowi seperti dilansir AP, Ahad (28/7).

Ia menegaskan, tak akan berkompromi jika sebuah organisasi membahayakan ideologi negara. Sayangnya, Jokowi tak menyebutkan seperti apa pelanggaran FPI itu kaitannya dengan ideologi negara. Mengingat, FPI bukan

Ormas yang baru kemarin sore. Lebih dari 20 tahun Ormas ini bergerak di tengah masyarakat dan beberapa rezim.

Jokowi menegaskan keinginannya membawa Indonesia agar dikenal sebagai negara yang moderat. Hal itu menjadi salah satu agenda dalam kepemimpinan periode keduanya lima tahun mendatang.

"Dalam lima tahun ke depan, saya tidak memiliki beban politik sehingga dalam membuat keputusan, terutama keputusan penting bagi negara, menurut saya itu akan lebih mudah," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Sebelum ada pernyataan Presiden ini, berkas permohonan perpanjangan SKT FPI yang telah habis masa berlakunya 20 Juni lalu dikembalikan oleh Kementerian Dalam Negeri pada 11 Juli. Kemendagri beralasan FPI belum memenuhi seluruh syarat administrasi yang diatur dalam Permendagri Nomor 57 Tahun 2017.

Ini pula yang ditegaskan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto. Pihaknya masih akan mengevaluasi rekam jejak FPI. Pemerintah bisa menilai apakah FPI layak mendapat perpanjangan izin atau tidak.

Kebijakan Zalim

Ketua Persaudaraan Alumni 212 Slamet Maarif menyebut Jokowi tidak mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap tentang FPI. Ia bahkan menyebut pemerintahan Jokowi zalim.

"Kalau masih ada yang menggaungkan izin Ormas, maka kategori keterbelakangan intelektual dan kuasa gelap yang zalim itu. Baca putusan Mahkamah Konstitusi (MK)," kata Slamet kepada *CNNIndonesia.com*, Senin (29/7).

Slamet menyatakan, kebebasan berserikat dan berkumpul dijamin secara jelas dalam konstitusi. Ia mempersilakan Jokowi membaca dan melihat kembali putusan MK terkait pendaftaran Ormas, yang menyebut pendaftaran bersifat sukarela.

Ketua Bantuan Hukum FPI Sugito Atmo Prawiro menuding ada kekuatan modal dari pengelola usaha 'underground' atau bawah tanah yang mendorong bukannya FPI. Sugito menyebut usaha 'bawah tanah' ini merujuk pada bisnis dan pemakaian narkoba, pelacuran, perjudian, hingga hiburan malam yang selama ini berseberangan dengan FPI.

"Kelompok ini gusar dengan



"Kalau yang kami lihat FPI tidak bertentangan dengan Pancasila ya... Dan selama ini FPI tidak pernah terbukti melakukan makar, tindakan melawan Pancasila."

intensitas kerja FPI yang dianggap mengancam bisnis mereka," ujar Sugito melalui keterangan tertulis, Kamis (1/8).

Ia tak menampik banyak pihak yang ingin agar FPI bubar. Sugito menyebut pernyataan Presiden Jokowi yang menganggap FPI tidak sejalan dengan ideologi Pancasila, selaras dengan jargon 'Pancasila dan NKRI Harga Mati' yang kerap diserukan massa pendukung Jokowi dalam Pilpres 2019.

"Seolah massa Islam di luar itu dianggap pendukung khilafah, radikalisme, dan seterusnya. Tentu saja mereka memasukkan FPI di dalamnya," katanya.

Menurutnya, saat ini pemerintahan dengan mudah membubarkan Ormas karena ada Perppu Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas, yang telah ditetapkan menjadi UU Nomor 16 Tahun 2017, tanpa melalui proses pengadilan.

Namun, ia mengingatkan bahwa untuk sampai kepada level beleid itu, harus dapat dibuktikan lebih dahulu bahwa Ormas tersebut memiliki ideologi selain Pancasila dan terbukti mengganggu ketertiban umum dan keamanan negara.

Sugito pun menegaskan, telah ada putusan MK Nomor 82/PUU-XI/2013. Dalam putusan itu, MK menyatakan negara tidak dapat menyatakan suatu Ormas sebagai organisasi terlarang dan tidak dapat melarang Ormas melakukan kegiatan, sepanjang tidak melanggar ketertiban umum dan melawan hukum.

"Dari sini jelas FPI tidak perlu mendaftarkan izinnya, apalagi jika pemerintah tidak memperpanjang izin sebagaimana pernyataan Jokowi. FPI sebagai Ormas tetap bisa menjalankan kegiatannya," kata Sugito.

Selain itu, Sugito menilai desakan pembubaran FPI ini lebih bermuatan politik. "HRS dan FPI praktis dikondisikan untuk dipinggirkan," jelasnya.

Alasannya, lanjut Sugito, FPI selama ini dikenal sebagai penopang massa politik pendukung Prabowo-Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019.

"Situasi ini yang seolah membuat mereka mendapat angin untuk menyerukan pembubaran FPI dengan alasan dalam anggaran dasar FPI ingin menerapkan syariat Islam di bawah naungan khilafah," jelasnya.

Ia meminta agar pemerintah dapat mengkaji lebih lanjut ke-

beradaan FPI, alih-alih membubarkan Ormas Islam tersebut. Menurutnya, jika pemerintah membubarkan hanya karena alasan tidak suka, hal itu akan berpengaruh pada kualitas demokrasi di Indonesia. "Akan berdampak pada pemasangan hak sipil konstitusional warga negara. Ini juga akan menurunkan kualitas demokrasi akibat kebebasan masyarakat untuk berserikat dan berkumpul telah terpasung," kata Sugito.

Tak Pancasila?

Sementara itu Ketua PA 212 Haikal Hassan menjelaskan kedudukan Pancasila di dalam Front Pembela Islam (FPI) dan 212. Dalam acara di Indonesia Lawyers Club (ILC), ia menyebut bahwa Habib Rizieq Shihab sebagai orang yang sangat Pancasila.

Bahkan, menurutnya, jiwa patriotisme Habib Rizieq Shihab bisa dibandingkan dengan tokoh lainnya, termasuk Presiden RI Joko Widodo.

Haikal menyebut pemerintah saat ini sedang ketakutan dengan adanya Habib Rizieq Shihab di Indonesia. "Pliss, pemerintah takut ada matahari yang sedang bersinar di negara ini," tandasnya.

Kesalahan FPI, lanjutnya,

Asal Pro Rezim, Aman

Bila mau jujur, justru banyak partai politik dan organisasi massa yang tak Pancasila di Indonesia. Petinggi dan pengurusnya terlibat korupsi uang negara. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya milyaran rupiah. Ada pula pengurusnya yang melakukan tindakan asusila. Dan juga para kadernya terlibat tindakan brutal dan anarkis. Bahkan ada yang sampai membakar fasilitas negara seperti kantor pemerintah daerah dan sebagainya. Anehnya, partai dan Ormas tersebut tidak dikatakan tidak Pancasila.

Lalu muncul pertanyaan, yang Pancasila itu yang seperti apa? Kok malah organisasi Islam yang hanya menyampaikan dakwah dan mencegah kemungkaran disebut tidak Pancasila.

Akhirnya, tak bisa disalahkan jika masyarakat menganggap bahwa Pancasila hanya diemban oleh partai dan ormas yang pro kepada rezim. Mereka akan tetap aman dan tidak pernah dikaitkan dengan Pancasila.[] emje

adalah karena FPI dipimpin oleh seorang tokoh besar. "Dan pemimpinnya itu adalah HRS, tokoh terbesar bangsa. Saya mengatakan tokoh terbesar bangsa, ayo diadu, siapa yang lebih Pancasila, siapa yang lebih patriotisme? Siapa yang paling jago menerapkan NKRI kalau bukan beliau," jelasnya.

Ia pun berani membandingkan jumlah massa yang akan datang ke Monas jika di bandingkan antara Habib Rizieq Shihab dan Jokowi.

"Coba sekarang, siapapun tokoh bahkan Presiden Jokowi, umumkan saya akan datang di Monas semua kumpul, ayo berapa orang? Siapa lagi Megawati? Coba bilang saya kumpul di Monas, kumpul berapa orang? Bandingkan dengan HRS, ayo semua kumpul di Monas, berapa orang?" katanya.

Sementara itu, juru bicara FPI Munarman meminta agar persoalan FPI ini tak dikaitkan dengan sikap Pancasila. "Ya jadi saya kira gini, soal Pancasila itu, ini kan perdebatan atau diskusi publik yang sifatnya terbuka, kalau parameter-nya setiap persoalan diukur apakah Pancasila atau tidak, maka pertanyaan saya, ribuan koruptor yang sudah dihukum itu, apakah Pancasila atau tidak?" katanya.

Ia mempertanyakan, apakah negara ini berhasil mendidik para pejabat negaranya (yang korup pejabat negara) menjadi seorang yang sangat Pancasila. Makanya, tidak bisa menilai segala sesuatu dari sisi Pancasila atau tidak.

"Itu parameter-parameter yang pasti diuji jauh ke belakang sebetulnya, jadi tidak bisa secara gamblang mengukur pihak yang bertentangan diametral kepentingannya dengan kelompok yang menguasai dengan parameter yang Pancasila, karena apa? Karena itu sama saja menjadikan Pancasila sebagai alat pemukul lawan politik, ini yang tidak sehat menurut saya," katanya.

Pembelaan

Kebijakan pemerintah menolak perpanjangan SKT FPI mengundang reaksi. Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat NurWahid menegaskan organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI) tak pernah melakukan tindakan makar dan melawan ideologi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

"Kalau yang kami lihat FPI tidak bertentangan dengan Pancasila ya... Dan selama ini FPI tidak pernah terbukti melakukan makar, tindakan melawan Pancasila," kata Hidayat di Jakarta Selasa (30/7).

Justru, dalam pandangan Hidayat, Imam Besar FPI kerap menggaungkan NKRI dalam garis perjuangan FPI. Bahkan, berbagai kegiatan sosial FPI selama ini sangat positif dalam membantu masyarakat kecil. a menyarankan agar Kementerian Dalam Negeri tak perlu membesar-besarkan perpanjangan SKT FPI ini ke publik. Sebab, Ormas lainnya pasti melakukan hal serupa dengan FPI untuk melakukan perpanjangan SKT ke Kemendagri.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan pemerintah tak bisa mendiskriminasi dalam memberikan perpanjangan SKT. Termasuk juga Front Pembela Islam (FPI). "FPI atau Ormas apa saja di Indonesia ini kan negara demokrasi. Kita tak bisa diskriminasi," ujar JK di kantor wakil presiden, Jakarta, Selasa (30/7).

Apabila FPI memang memenuhi 10 syarat perpanjangan izin, menurut JK, pemerintah berwenang memperpanjang izin ormas Islam tersebut.

"Selama dia secara formal mengatakan taat kepada Pancasila, organisasi dakwah, itu silakan, tapi kalau menolak Pancasila pasti tidak bisa. Itu contohnya," kata JK.[] emje



Anehnya, terhadap organisasi yang jelas-jelas melakukan kemungkaran, rezim Jokowi seolah tak peduli.

Siapa yang tak mengenal Front Pembela Islam (FPI). Organisasi yang berdiri pada 17 Agustus 1998 itu menjadi ikon amar ma'ruf nahi munkar. Imam Besar FPI Habib Muhammad Rizieq Syihab menyebut, organisasinya berhasil menjadi ikon setelah melalui perjuangan yang panjang.

Organisasi yang didirikan oleh para habaib dan ulama ini dikenal tanpa kompromi jika ada kemungkaran di tengah masyarakat. Tempat-tempat hiburan malam dan arena maksiat menjadi sasaran operasi mereka. Karenanya, banyak pihak—khususnya para pemuja kemungkaran—tak menyukai sepak terjang FPI ini. Tindakan FPI ini dianggap mengambil alih tugas kepolisian.

Seiring perjalanan waktu, pengaruh organisasi ini kian besar. Terlebih lagi peran mereka

pun meluas. Tak hanya nahi munkar, tapi juga terjun langsung di area bencana untuk menolong para korban. Nama mereka mencuat saat para aktifisnya menjadi relawan yang mengurus jenazah korban tsunami di Aceh tahun 2004. Karenanya kemudian banyak masyarakat yang justru mendukung dan simpati terhadap langkah dan tindakan FPI ini. Tak heran, FPI menjadi salah satu Ormas berpengaruh di Indonesia.

Imam besar FPI Habib Rizieq Syihab tak mengingkari jika organisasinya sudah besar. Makanya, dalam sebuah kesempatan milad (ulang tahun FPI) ia mengajak para aktifisnya untuk menjadikan kebesaran FPI itu hanya untuk meninggikan Allah SWT. "Ingat, sekarang FPI sudah jadi ikon *amar ma'ruf nahi munkar*," kata Rizieq melalui sambungan suara dalam perayaan Ultah FPI ke-19 di Jakarta.

Sejak pembentukannya, FPI didirikan dengan tujuan menjadi wadah kerja sama antara ulama dan umat dalam menegakkan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* di setiap aspek kehidupan. Hal ini dilatarbelakangi oleh (1) penderitaan panjang umat Islam di Indonesia karena lemahnya kontrol sosial penguasa sipil maupun militer akibat banyaknya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum penguasa. (2) Adanya kemungkaran dan kemaksiatan yang semakin merajalela di seluruh sektor kehidupan. (3) Adanya kewajiban untuk menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat Islam serta umat Islam.

Rizieq menyatakan bahwa FPI merupakan gerakan lugas dan tanpa kompromi sebagai cermin dari ketegaran prinsip dan sikap. Menurut Rizieq kekerasan yang dilakukan FPI dikarenakan kemandulan dalam sistem pene-

gakan hukum. FPI akan mundur bila hukum sudah ditegakkan. Ia menolak anggapan bahwa beberapa pihak menyatakan FPI anarkis dan kekerasan yang dilakukannya merupakan cermin kebengisan hati dan kekasaran sikap.

Belakangan FPI mempunyai peran besar sebagai kekuatan penekan di tengah dinamika politik nasional. Lewat Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab, FPI andil dalam berbagai Aksi Bela Islam sejak awal. Perannya begitu nyata sehingga tak disukai oleh rezim Jokowi. Tak heran, Imam Besar FPI menjadi sasaran tindakan kriminalisasi, hingga akhirnya ia berada di Saudi Arabia hingga sekarang.

Tidak cukup dikriminalisasi, FPI terus didorong untuk dibubarkan. Jika dulu dianggap sebagai organisasi yang dianggap anarkis, sekarang mereka dianggap sebagai organisasi radikal yang tak sejalan dengan Pancasila.

mereka itu nyata-nyata telah menghancurkan negeri ini. Di antaranya dengan menjadi pendukung utama lepasnya Timor Timur dari wilayah NKRI. Sampai sekarang, organisasi ini tetap eksis dan terus menyebarkan paham-paham kebebasan atau liberalisme.

Tercatat pula muncul organisasi yang berafiliasi ke sosialis/komunis. Mereka sering mengadakan berbagai pertemuan untuk mengubah sejarah seolah, misalnya, PKI bukanlah partai yang bersalah dalam peristiwa G30S/PKI tapi sebagai korban ketidakadilan rezim. Organisasi kekiri-kirian ini mulai muncul dan tak pernah dianggap sebagai ancaman yang nyata, padahal Indonesia pernah hancur oleh paham komunis ini.

Di sisi lain, sikap rezim terhadap kelompok separatis pun tampak lemah. Mereka yang telah membunuh tentara dan polisi serta masyarakat sipil ini tak dianggap sebagai musuh yang nyata. Terkesan tak ada tindakan yang serius untuk mengejar dan menghentikan tindakan makar mereka.

Yang lebih parah adalah pembiaran rezim terhadap agama Ahmadiyah yang jelas-jelas merusak Islam. Mereka seolah dilindungi dan dibiarkan beroperasi. Padahal, ajaran mereka bertentangan dengan agama terbesar di negeri ini.

Dan yang lebih menyedihkan, rezim membiarkan Ormas tertentu melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap berbagai pengajian yang diadakan kaum Muslimin. Seolah mereka-lah yang berkuasa, apalagi dengan mengenakan atribut yang mirip tentara—suatu yang dilarang oleh UU.

Tak bisa disalahkan bila ada anggapan, pelaku amar munkar nahi ma'ruf dilindungi penguasa. Benarkah begitu? [] **emje**

Kewajiban Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran/kemaksiatan bukan sekadar istilah tanpa makna. Ini adalah kewajiban agama yang ditujukan kepada seluruh kaum Muslim.

Dalam pandangan Islam, tak boleh umat Islam membiarkan kemungkaran berlangsung di depan matanya. Harus dicegah dan dihentikan, sesuai kemampuannya.

Dari Abu Sa'id Al Khudry ra berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah (mengingkari) dengan tangannya, jika tidak mampu hendaklah ia mengubah (mengingkari) dengan lisannya, jika tidak mampu hendaklah ia mengubah dengan hatinya, dan itulah keimanan yang paling lemah.'" (HR. Muslim)

Pesan Rasulullah ini mencakup seluruh persoalan. Bahkan sebagian ulama mengatakan, "Hadits ini

pantas untuk menjadi separuh dari agama (syariat), karena amalan-amalan syariat terbagi dua: ma'ruf (kebaikan) yang wajib diperintahkan dan dilaksanakan, atau munkar (kemungkaran) yang wajib diingkari, maka dari sisi ini, hadits tersebut adalah separuh dari syariat." (Lihat *At Ta'yin fi Syarhil Arba'in*, At Thufi, hal. 292)

Karenanya, amar ma'ruf nahi munkar adalah karakter dasar yang harus dimiliki oleh seorang Muslim. Wajar Allah menyebut umat Islam disebut sebagai umat terbaik, ketika mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah perbuatan munkar. Mereka mengajak kepada kebenaran—Islam—dan mencegah semua tindakan yang bisa mendatangkan murka Allah SWT. Maka, dengan menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, kemaslahatan akan terwujud, tatanan sosial berjalan baik, perbuatan buruk minim terjadi, dan pertikaian bisa dihindari. [] **emje**

Bertolak Belakang

Anehnya, terhadap organisasi yang jelas-jelas melakukan kemungkaran, rezim Jokowi seolah tak peduli. Mereka dibiarkan hidup, bahkan seolah mendapat tempat dan dukungan agar terus bisa berkembang dan menggapai cita-cita mereka.

Berdasarkan laporan USAID, organisasi LGBT ternyata mencapai puluhan. Mereka inilah yang terus memperjuangkan diri agar tindakan mereka mendapatkan legitimasi oleh negara. Aksi mereka bahkan didukung sepenuhnya oleh kalangan internasional melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Bukannya dilarang, terkesan mereka malah semakin mendapat tempat dalam kebijakan rezim.

Termasuk juga keberadaan lembaga/organisasi liberal, rezim tak berkutik terhadap sepak terjang mereka. Padahal sebagian



Rezim Anti Islam Kaffah

"Sama, tidak ada bedanya, bahwa khilafah itu ajaran Islam, wajib ditegakkan, syariah wajib ditegakkan."

Rezim Joko Widodo belum mengubah pandangannya terhadap gerakan/organisasi Islam yang ingin menegakkan Islam secara kaffah. Setelah mencabut Badan Hukum Perkumpulan (BHP) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), kini giliran menolak perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Front Pembela Islam (FPI). Substansinya sama, membubarkan Ormas Islam tersebut.

Bila disimak lebih dalam, ternyata ada hal yang sama yang dituduhkan oleh rezim kepada FPI dan HTI yakni adanya keinginan untuk menegakkan khilafah Islamiyah. FPI diganjal oleh Kementerian Agama dengan tidak mengeluarkan surat rekomendasi yang diperlukan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Kemenag mempermasalahkan isi AD/ART FPI yang di dalamnya menyinggung khilafah. Pasal 6 di aturan rumah tangga itu memuat tentang penegakan *khilafah nubuwwah*. Sayangnya, pihak FPI sejauh ini belum diajak bicara untuk menjelaskan khilafah yang dimaksud.

Juru bicara DPP FPI yang juga Ketua PA 212 Slamet Maarif berharap apa yang terjadi pada HTI tidak terjadi pada FPI —pembubaran tanpa ada dialog sebelumnya. Menurutnya, sebagai negara yang menjunjung demokrasi seharusnya pemerintah mendekatkan dialog dengan FPI.

Namun, itu tergantung pemerintah. Ia berpendapat, jika sampai Jokowi benar-benar tidak mengeluarkan perpanjangan SKT FPI, berarti rezim ini bertindak zalim.

Sebagaimana hasil Ijtima' Ulama IV, para ulama Ahli Sunnah wal Jamaah ternyata menyepakati penerapan syariah dan penegakan khilafah. Khilafah sendiri ada-

lah bagian dari ajaran Islam.

Ketua Umum FPI Shobri Lubis menjelaskan, khilafah yang dimaksud FPI adalah sama dengan yang dimaksud *ahlus sunnah wal jama'ah* di seluruh dunia. "Sama, tidak ada bedanya, bahwa khilafah itu ajaran Islam, wajib ditegakkan, syariah wajib ditegakkan."

Ia menegaskan, khilafah itu tidak bisa dipungkiri. Bahkan bila Muslim tidak percaya dengan khilafah, bisa menjadikannya menyimpang, keluar dari ajaran agama. "Karena kita diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW nanti akan datang khalifahnya, Imam Mahdi itu pasti akan datang. Imam Mahdi itu khalifah," jelasnya.

Juru bicara HTI M Ismail Yusanto berpendapat, ada kepentingan politik rezim atas belum keluarnya SKT FPI. FPI, kata Ismail, selama ini paling keras melawan rezim. Siapa pun tahu, peran FPI sangat besar dalam Aksi Bela Islam, yang berujung diadilinya Ahok, yang ketika itu menjadi Cagub DKI yang sangat didukung oleh rezim.

"FPI juga sangat tegas soal cita-cita penegakan syariah, bahkan juga khilafah. Oleh karena itu, rezim tampak sangat tidak suka pada FPI. Saya kira, tidak terbitnya SKT itu hingga detik ini tidak lepas dari hal ini," jelasnya.

Rezim ini, menurutnya, mengidap fobia Islam, yakni takut terhadap Islam kaffah. Rezim akan memberangus setiap gerakan/organisasi yang menginginkan penerapan Islam secara kaffah. "Mungkin mereka mengelak kalau disebut anti Islam. Dalihnya masih shalat, bahkan didukung ormas Islam. Tapi kalau phobia Islam kaffah, tak bisa menolak. Buktinya, mereka menolak ajaran Islam khilafah," jelasnya.

Rezim membangun narasi bahwa mereka yang menginginkan Islam kaffah sebagai ingin

menghancurkan negara, anti Pancasila, anti kebhinnekaan, intoleran, dsb. Narasi ini mirip yang terjadi di era 1965-an. Saat itu,

Ormas Islam yang dianggap berseberangan dengan rezim pun dibubarkan.

Lalu akankah rezim Jokowi

mengulang kembali kebencian rezim sebelumnya? [joy/emje](#)

Narasi Radikalisme Perluas Target

Rezim saat ini dengan mudahnya menuding mereka yang ingin taat kepada ajaran Islam sebagai kelompok radikal. Anehnya, ini hanya ditujukan kepada kalangan Muslim. Tidak kepada kalangan non Muslim, yang mungkin pula ingin menjadikan negeri ini seperti keinginan agama mereka. Ingat, ada yang ingin menjadikan Kota Injil dsb.

Juru bicara HTI M Ismail Yusanto, narasi radikal tak bisa dilepaskan dengan propaganda perang melawan terorisme. Perang melawan radikalisme, jelasnya, ingin memperluas cakupan propaganda perang melawan terorisme sehingga banyak pihak yang bisa dimusuhi atau dijadikan musuh.

Menurutnya, Barat ada di balik propaganda *war on radicalism* ini. "Karena dengan *war on radicalism*, semua lawan (politik yang tidak tercakup dalam *war on terrorism*), kini bisa masuk dalam satu keranjang," ujarnya dalam sebuah kesempatan.

Barat sendiri, jelasnya, punya kepentingan untuk mencegah kebangkitan Islam. Sedini mungkin mereka berusaha memukul kaum Muslimin yang berusaha membangkitkan Islam. Makanya, dibuat propaganda yang kemudian dijalankan oleh para penguasa boneka di negeri-negeri Muslim.

Menurut Ismail, setiap kali mereka melakukan narasi politik atau propaganda, haruslah ada kejadian, harus ada ide yang dipersalahkan terkait kejadian itu, harus ada tubuh atau badan/organisasi yang mengemban ide tersebut, kemudian harus ada orang atau aktornya.

"Harus ada ide yang dipersalahkan yaitu syariah dan khilafah, harus ada tubuh yang dipersalahkan seperti HTI, kemudian harus ada orang yang menjadi aktornya. Itu yang sekarang ini sedang dibangun," ungkapnya.

Sehingga siapa saja yang dijadikan target maka akan dikatakan sebagai anggota HTI atau ditunggangi

HTI. Siapa saja yang setuju dengan syariah dan khilafah disebut radikal.

Menurutnya, dengan isu radikalisme ini, umat Islam akan terbelah menjadi tiga. *Pertama*, memang dia kokoh dengan keyakinan. "*Standing point*-nya jelas, orang mau ngomong apa saja, saya punya keyakinan bahwa syariah dan khilafah itu kewajiban," tegasnya.

Kedua, "Kemudian ekstrem yang lain menyatakan ini (syariah dan khilafah) ajaran yang... ah seperti hari ini, anti ini anti itu. Kemudian berhadapan dengan posisi yang pertama itu," bebernya.

Ketiga, ini yang mayoritas. Yang mayoritas ini akan cenderung apatis, akan cenderung menghindari.

Ia menguraikan, dampak dari perang melawan radikalisme ini jelas tidak menguntungkan dakwah. "Jelas ini merupakan kondisi yang tidak kondusif bagi dakwah karena ini merupakan kemunduran. Karena di saat yang sama kita ini sedang mendorong umat untuk berani hidup secara islami dan berani mengatakan pemikiran dan cita-citanya, yakni ajaran Islam. Tetapi situasi politik (dengan isu radikalisme ini) membuat cita-cita itu dipersalahkan dan dianggap sebagai kriminal," terangnya.

Bahkan, perangkat hukum untuk mengkriminalisasi ajaran Islam tersebut juga sudah dibuat. "Kalau kita lihat UU Ormas, di sana sudah ditaruh pasal pidana terhadap (ajaran Islam) ini. Ini memang belum dijalankan. Jadi siapa saja yang menjadi anggota sebuah organisasi yang mengembangkan, yang mengajarkan paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila dipidana. Kalau kita baca di situ sampai 20 tahun penjara. Jadi sudah disiapkan, jadi tinggal tunggu waktu saja siapa korban pertamanya, *wallahu 'alam*. Yang jelas sudah disiapkan itu pisanya. Jadi kita ini menghadapi situasi kalau kita tidak waspada, apalagi kalau rezim ini terus berlanjut, ini mungkin akan terjadi," tuturnya. [ghifari/joy](#)

Shobri Lubis, Ketua Umum FPI

Di Zaman Jokowi Banyak Ketidakadilan

Biasanya ormas Islam Front Pembela Islam (FPI) dalam mengurus perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ke Kementerian Dalam Negeri paling lama hanya tiga pekan saja. Namun kali ini sudah lebih dari enam pekan SKT belum juga dikeluarkan. Mengapa? Temukan jawabannya dalam wawancara wartawan Tabloid Media Umat Joko Prasetyo dengan Ketua Umum FPI Shobri Lubis. Berikut petikannya.

Apakah sampai sekarang SKT FPI belum dikeluarkan pemerintah?

Sampai hari ini (Senin, 5 Agustus) memang belum keluar SKT-nya dari Kementerian Dalam Negeri. Kita sudah mengajukan perpanjangan SKT itu sejak 20 Juni. Jadi hari itu habis, hari itu juga kita perpanjang.

Biasanya berapa lama proses perpanjangannya?

Biasanya memang ada proses tetapi enggak lama. Beberapa minggu selesai. Kalau ada persyaratan-persyaratan yang kurang seperti meminta AD/ART maupun apa-apa yang kurang biasanya kita penuhi semua.

Dan kaitan dengan masalah sekarang ini ada perubahan UU Keormasan sehingga membuat adanya persyaratan-persyaratan baru dan ini yang memperpanjang dan menambah syarat-syarat yang ada. Sehingga ini menambah waktu.

Apa syarat yang baru itu?

Kalau Ormas keagamaan harus mendapat rekomendasi dari Kemenag. Nah, itu yang dibidang Kemendagri ada kekurangan beberapa syarat. Sehingga kita lengkapi lagi dengan yang sesuai dengan peraturan yang baru itu.

Sebelumnya kita belum tahu ada persyaratan-persyaratan seperti itu karena memang sebelumnya enggak ada syarat seperti itu. Sehingga kita mengajukan lagi untuk mendapatkan rekomendasi dari Kemenag. Kemenag juga sudah mengajukan pertemuan dengan kita, sudah mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan yang dia mau. Hal-hal yang berkaitan dengan Pancasila, dengan UUD 1945, tentang syariah, tentang

khilafah itu memang Kemenag bertanya.

Hasilnya?

Kita sekarang masih menunggu hasilnya dari Kemenag.

Tanggapan Anda dengan pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut bisa saja pemerintah tidak memperpanjang SKT FPI sebagai ormas jika mengancam ideologi dan keamanan negara?

Seperti itu ada yang membisikkan ke Jokowi fitnah macam-macam tentang FPI. Sedangkan FPI 20 tahun terdaftar di Departemen Dalam Negeri (sekarang Kementerian Dalam Negeri). Hubungannya dengan Kesbangpol sudah sangat dekat, dengan Departemen Dalam Negeri sangat dekat, dengan TNI dengan Polri hubungannya dekat.

Jadi kalau masih ada yang mempertanyakan soal ideologi FPI itu jadi kayak lagu zaman dulu, enggak kenal FPI. Jadi kayak orang *bego* begitulah. Kemudian terlontar, *ngikut-ngikut* seperti itu.

Jadi lingkungan Jokowi ini banyak pembisik-pembisik yang anti Islamnya. Dari zaman dulu FPI memang biasa difitnah. Tapi kalau orangnya cerdas, dia akan kroscek dulu, apa iya FPI seperti itu? Jangan baru dapat informasi sekilas begitu langsung mempercayai.

Jadi kita lihat Jokowi ini tidak cermat dalam mengungkap kata-kata sehingga bisa jadi tidak relevan nantinya. Sebagai seorang presiden, ngomongnya bisa dikategorikan sembarangan. Saya rasa tidak pantas seperti itu.

Kalau ada pembisik-pembisik yang

mempermasalahkan ideologi FPI ya *tabayun dong*. Kalau tabayunnya melalui Kemenag, ya dia jangan bicara dulu, serahkan saja kepada Kemenag. Kemenag nanti yang memproses, Kemenag yang komentar.

Terus kalau dia mau membubarkan FPI, FPI-nya jadi bagaimana? FPI-nya jadi bubar-bubaran? Kan enggak. Sudah tidak ada aturan, enggak ada lagi dalam UU Keormasan kalimat "membubarkan ormas" atau "ormas terlarang" apalagi ormas yang selama ini bergerak membantu pemerintah, membantu masyarakat, contohnya ya FPI.

Contohnya?

Kita membantu stabilitas negara dan menjaga keamanan negara melalui program-program yang dilaksanakan dengan Kemenhan, TNI AL. Kita juga membantu di bidang kesra melalui Kementerian Sosial dalam bedah kampung.

Belum lagi dengan bencana-bencana, FPI selalu tampil membantu masyarakat yang sedang kesulitan. Bahkan di beberapa tempat saat tsunami Aceh, gempa Palu dan gempa Banten, bantuan FPI lebih dulu sampai kepada korban bencana sebelum pemerintah.

Kita di sini mau tahu, itu para pembisik Jokowi yang menyebut ideologi FPI menyimpang dari Pancasila pernah tidak membantu seperti FPI? Pernah turun ke masyarakat seperti FPI atau enggak? Atau hanya menjadi pembisik-pembisik yang menyesatkan? Kasihan Jokowi dihasut dan dibisiki seperti itu sehingga mau bermusuhan dengan FPI. Itu bisa merugikan Jokowi sendiri.

Apa yang disampaikan FPI

kepada Kemenag saat ditanya terkait khilafah?

Khilafah yang dimaksud FPI adalah khilafah yang sama dengan yang dimaksud *ahlus sunnah wal jama'ah* di seluruh dunia. Sama, tidak ada bedanya, bahwa khilafah itu ajaran Islam, wajib ditegakkan, syariah wajib ditegakkan.

Khilafah itu tidak bisa dipungkiri, kalau kita tidak percaya dengan khilafah nanti kita bisa menyimpang, keluar dari ajaran agama. Karena kita diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW nanti akan datang khalifahnyanya, Imam Mahdi itu pasti akan datang. Imam Mahdi itu khalifah.

Itu kan penegakkan kepemimpinan, penegakkan keadilan. Dalam suatu keterangan, pada akhir zaman nanti di saat bumi dipenuhi ketidakadilan, saat itulah Imam Mahdi datang menghancurkan segala macam ketidakadilan.

Nah, ini memang sekarang syarat. Ciri-ciri akan datangnya khalifah itu ya dengan banyaknya ketidakadilan seperti ini, di zaman Jokowi ini banyak ketidakadilan.

Contohnya?

Kasus hukum. Ahok, enggak dihukum soal penistaan agama. Sampai demo berjilid-jilid, berjuta-juta orang turun ke jalan, baru dihukum. Korupsinya Ahok, enggak kena hukum juga. Tapi giliran oposisinya Jokowi, langsung ditegakkan hukum, atau dikriminalisasi.

Ini terjadi. Ini tidak bisa lagi dipungkiri bahwa rezim ini sangat lemah, sehingga tidak bisa lagi bertahan kecuali dengan cara-cara yang represif. Operasi intelijen di mana-mana, makarisasi, kriminalisasi, menganggap lawan-lawan yang

kritis harus dibungkam dan lain-lain.

Kenapa itu dilakukan?

Takut umat Islam bangkit, takut umat Islamnya sadar politik, takut umat Islamnya sadar ekonomi. Akhirnya apa? Umat Islamnya bangkit menegakkan ekonomi, bangkit menegakkan politik. Karena perbuatan-perbuatan ketidakadilan itu yang menjadi sorotan dan nyata di tengah masyarakat.

Nah, itu yang kita sampaikan kepada Kemenag bahwasannya Imam Mahdi bisa dipungkiri tidak? Itu hadits Nabi SAW. Dipercaya oleh semua *ahlus sunnah wal jama'ah* dengan semua mazhabnya, mempercayai Imam Mahdi akan hadir.

Kalau mereka (Kemenag) mengingkari Imam Mahdi, ya itu kualitasnya. Kualitasnya seperti itu, melanggar. Makanya, dalam pandangan *ahlus sunnah wal jama'ah*, melalui hadits terkait Imam Mahdi saja sudah jelas.

Jadi kehadiran khalifah tidak mungkin bisa dicegah dengan apa pun karena ini janji ilahiah.

Kok bisa khilafah ajaran Islam dianggap mengancam oleh rezim?

Itu hanya kekhawatiran dan ketakutan kalangan kapitalis, kalau umat Islam ini bangkit pasti akan menegakkan keadilan. Kalau adil, mereka tentu enggak mau. Jadi mereka tetap mau memperpanjang penjajahan dan penindasan kepada umat Islam. Sehingga mereka mau melempar fitnah ke sana kemari seakan-akan Ormas yang memperjuangkan syariah atau khilafah sebagai musuh negara, lawan negara. Itu semuanya fitnah![]



Muhammad Ismail Yusanto,
Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia

Perang Melawan Radikalisme, Kedok tuk Perangi Islam

Setelah secara semena-mena mencabut Badan Hukum Perkumpulan (BHP) Hizbut Tahrir Indonesia, kini rezim Jokowi sepertinya tak akan memperpanjang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Front Pembela Islam (FPI). Sebagaimana terhadap HTI, rezim pun menuding FPI radikal dan anti Pancasila. Seperti apa duduk permasalahannya? Apa pula yang harus dilakukan umat? Temukan jawabannya dalam wawancara wartawan Tabloid Media Umat Joko Prasetyo dengan Jubir HTI Muhammad Ismail Yusanto. Berikut petikannya.

Sejak berdirinya, 21 tahun lalu, legalitas FPI tidak pernah dipermasalahkan. Baru kali ini, di rezim ini, daftar ulang SKT FPI dihambat. Ada apa?

Ini juga yang menjadi pertanyaan banyak pihak. Mengapa? Ada apa? Sejauh kita ikuti di media, pemerintah beralasan SKT FPI belum terbit karena ada sejumlah syarat-syarat administrasi yang belum dilengkapi. Ketika syarat-syarat itu mulai dilengkapi, lalu alasan pemerintah bertambah. Bahwa pemerintah sedang mengkaji AD/ART FPI, khususnya soal pandangan syariah dan khilafah FPI.

Dari sana wajar jika publik kemudian menduga, SKT FPI belum terbit memang tidak akan diterbitkan. FPI memang selama ini paling keras melawan rezim. Siapa pun tahu, peran FPI sangat besar dalam Aksi Bela Islam, yang berujung diadilinya Ahok, yang ketika itu menjadi Cagub DKI yang sangat didukung oleh rezim.

FPI juga sangat tegas soal cita-cita penegakan syariah, bahkan juga khilafah. Oleh karena itu, rezim tampak sangat tidak suka pada FPI. Saya kira, tidak terbitnya SKT itu hingga detik ini tidak lepas dari hal ini.

Presiden dan para menteri terkait kerap mengatakan FPI radikal dan tidak sejalan dengan ideologi negara...

Ya, itu tuduhan rezim pada FPI. Dan tuduhan itu jelas sangat politis. Sama seperti tuduhan kepada HTI. Ketika hendak dibubarkan, juga dituding radikal dan anti ideologi negara. Tapi apa sebenarnya yang dimaksud

radikal, juga apa juga yang dimaksud tidak sejalan dengan ideologi negara, hingga sekarang tidaklah jelas.

Apakah semua yang berjalan saat ini, ekonomi kapitalistik – ribawi, politik liberal – demokrasi, korupsi, kezaliman, ketidakadilan di segala bidang dan kejahatan lainnya itu sesuai dengan Pancasila? Maka, kita melihat, melempar tuduhan semacam ini adalah cara paling gampang dilakukan oleh rezim yang ingin membungkam lawan politik atau kelompok yang tidak disukainya, seperti FPI.

Kalau menurut pandangan Anda, benarkah FPI radikal?

Enggaklah. Bahwa organisasi itu tampak sangat semangat dan keras, itu biasa saja dalam dakwah dan perjuangan, karena tantangan yang dihadapi juga memang sangat keras.

Dan selama ini kita tahu kok kiprah FPI, utamanya dalam kegiatan amar makruf nahi mungkar, termasuk dalam kegiatan tanggap terhadap bencana. Dan paling fenomenal adalah peran FPI, khususnya imam besarnya, Habib Rizieq, dalam melawan Ahok melalui Aksi Bela Islam yang berlangsung berkali-kali di Jakarta.

Baru kali ini dalam sejarah pergerakan Islam di negeri ini, jutaan umat hadir dalam aksi keumatan, yang kemudian dikenal dengan sebutan Aksi 212. Kini, gerakan 212 itu telah menjadi salah satu pusat kekuatan umat penting di negeri ini.

Mengapa pula banyak ormas bahkan parpol bermasalah,

seperti kadernya banyak yang korupsi, brutal, anarkis, asusila dan tindak keburukan lainnya, tidak dipersoalkan?

Justru di situ masalahnya. Mestinya ormas-ormas dan orpol yang seperti itu yang layak dipersoalkan. Tapi faktanya kan tidak. Ini membuktikan bahwa tidak terbitnya SKT FPI itu lebih bersifat politis ketimbang faktor yuridis.

Selain kepada FPI, konon akan ada lagi ormas Islam yang akan diberangus rezim?

Allahu'alam. Saya tidak tahu. Tapi melihat tendensi sikap rezim yang keras terhadap (ide) Islam kaffah, seruan penegakan syariah, apalagi khilafah, tampaknya tindakan keras kepada ormas atau kelompok Islam tidak akan berhenti pada FPI, tapi akan berlanjut ke ormas atau kelompok Islam lain yang dinilai mengusung visi dan misi yang serupa atau sejenis.

Apakah bisa disimpulkan bahwa rezim ini semakin represif?

Kekuasaan adalah alat paling penting untuk menjalankan tugas agama yang sangat vital, amar makruf nahi mungkar. Ketika kekuasaan, seperti saat ini, tidak melaksanakan tugas penting itu, sementara berbagai kemungkaran di tengah masyarakat dibiarkan saja, dan ketika ada kelompok yang melakukan tugas itu serta berjuang untuk tegaknya syariah secara kaffah justru dihambat, maka jelas rezim seperti ini adalah rezim anti Islam kaffah yang bukan melakukan amar

makruf nahi mungkar tapi justru sebaliknya melakukan amar mungkar nahi makruf.

Apakah ada hubungan tindak rezim tersebut dengan program war on radicalism yang saat ini sedang gencar dilakukan oleh negara-negara Barat?

Memang, setelah sejak beberapa tahun negara-negara Barat, utamanya AS, melancarkan apa yang disebut *war on terrorism*, kini mereka juga melancarkan *war on radicalism*. Keduanya, baik *war on terrorism* maupun *war on radicalism*, hanyalah kedok (*mask*) untuk maksud sesungguhnya, yakni *war on Islam*.

Mengapa?

Karena jika benar mereka memerangi terorisme dan radikalisme, mestinya semua orang, baik dalam kelompok maupun negara, yang telah melakukan terorisme, juga radikalisme, seperti yang dilakukan oleh Zionis Israel di Palestina, haruslah diperangi. Tapi nyatanya kan tidak. Tindakan keras itu hanya ditujukan pada individu dan kelompok Islam. Nah, apa yang dilakukan oleh rezim di sini dalam memerangi radikalisme, sebagaimana juga ketika memerangi terorisme, jelas tidaklah lepas dari apa yang dilakukan oleh negara-negara Barat.

Apa sebenarnya yang mereka khawatirkan terhadap Islam?

Ringkasnya, mereka itu sangat khawatir terhadap kebangkitan Islam politik. Yakni

Islam yang menginginkan tegaknya kehidupan Islam yang di dalamnya diterapkan syariah Islam secara kaffah.

Bila kehidupan semacam ini tegak, dominasi dan hegemoni Barat, khususnya atas dunia Islam, melalui ideologi sekularisme – kapitalisme akan berakhir. Ini tentu tidak dikehendaki oleh mereka. Sebab, melalui cara itulah Barat selama ini bisa menikmati seluruh kepentingan politik dan ekonominya. Maka, sebelum itu terjadi, semua potensi ke arah sana harus dihancurkan dengan segala cara dan alasan. Di antaranya dengan dalih memerangi terorisme dan memerangi radikalisme.

Kalau begitu, lantas apa yang harus umat lakukan?

Berjuang, dan terus berjuang melalui jalan dakwah politis. Hanya melalui jalan ini, *izzul Islam wal muslimin* bisa diwujudkan atau ditegakkan, sekaligus menghentikan segala mudharat atau kerusakan yang ditimbulkan oleh sistem sekuler yang selama ini telah menyengsarakan umat, menyebabkan kemiskinan, kerusakan moral, korupsi, kriminalitas, kezaliman, ketidakadilan dan berbagai bentuk kejahatan lain.

Dan dalam perjuangan itu, umat tidak boleh surut, harus istiqamah, apa pun rintangan, tantangan, gangguan dan hambatan yang dihadapi karena dakwah dari dulu hingga nanti memang akan selalu ada penghalang. Dengan istiqamah itu, insya Allah kemenangan akan datang. Yakni.[]



Mereka Bicara

Upaya Menjegal FPI



Slamet Maarif,
Jubir FPI

Ayo Duduk Bersama

Dan sebelumnya, SKT ini tidak bermasalah. Hanya baru-baru ini saja.

Tapi jika berkasnya yang sudah kami penuhi semua dan tidak keluar juga maka ini akan menimbulkan pertanyaan besar ada apa ini, apa memang sekarang rezim sedang membidik FPI?

Dan ada beberapa persoalan memang salah satunya di Kemenag. Mereka memperlakukan SKT kita pada pasal 6 tentang penegakan *khilafah ala minhaj nubuwwah* yang perlu kita jelaskan kepada Kemenag. Karena mungkin teman-teman di Kemenag butuh penjelasan tentang apa itu khilafah yang ada di anggaran dasar FPI. Tapi insya Allah jika kita jelaskan akan diberikan kembali SKT-nya.

Jika dikatakan FPI bertentangan dengan ideologi Pancasila, mana mungkin? Sedangkan kita sudah 21 tahun dan itu tidak ada masalah. Bahkan bagi kami NKRI harga mati. Di setiap bencana kita hadir.

Dan menurut saya, Jokowi harus menjelaskan kepada masyarakat Indonesia mananya yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Harus bisa menunjukkan kepada kami. Jangan menjadi berita hoaks.

Sebetulnya kami FPI tidak terlalu terpengaruh jika SKT itu tidak dikeluarkan. Kami hanya ingin memberitahukan bahwa teman-teman FPI itu taat akan hukum dan aturan. Bagi kami ada dan tidak adanya SKT, dakwah dan kegiatan FPI masih tetap jalan dan itu tidak bisa dilarang.

Jadi menurut saya solusinya adalah ajak duduk bersama, tidak boleh pemerintah menghakimi tanpa adanya forum diskusi.[]



Derry Sulaiman,
Musisi Hijrah

Khilafah, Bahasanya Allah SWT

Semua kita pasrahkan kepada yang di atas apa pun yang terbaik. Itu sudah kehendak yang di atas. Kalau

FPI di jalur yang sudah diikuti dan sudah jelas ternyata ada yang menghalang-halangi mereka maka biarkan saja itu jadi berurusan dengan Allah.

Bagi saya hasil di dunia ini bukan apa-apa melainkan hasilnya di akhirat. Jika Allah takdirkan semuanya berjalan lancar maka insya Allah akan dilancarkan.

Saya melihat mana mungkin FPI bertentangan dengan Pancasila, Habib Rizieq saja sangat paham sekali dengan Pancasila. Tidak mungkin dia tidak paham akan Pancasila.

Jadi mereka itu sebenarnya belum ngerti masalah khilafah itu apa. Jadi mereka mengira kata khilafah itu menjadi momok yang menakutkan bagi mereka. Dan khilafah itu *kan* dari bahasa Alquran, bahasanya Allah SWT. Jadi mereka itu harus banyak belajar dan kita beri penjelasan kepadanya, kalau mereka belum mengerti percuma apalagi yang tidak paham terkait agama akan susah dan dia juga anti terhadap syariah dengan khilafah *kan* itu aneh aja.[]



Fikri Bareno,
Koordinator Lapangan Aksi PA 212

Tak Langgar UU Negara

Kalau menurut saya tidak mungkin bertentangan, dari segi namanya saja Front Pembela Islam. Artinya dilahirkan

dari sebuah agama yang ideologinya memang dijamin oleh undang-undang negara. Salah satunya sila Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian di Pembukaan UUD 1945 juga disebutkan bahwa intisarinnya adalah kewajiban negara untuk melindungi seluruh warganya dan organisasinya, kecuali organisasi yang bertentangan dengan undang-undang. Saya tidak melihat bahwa FPI ada hal yang membahayakan.

Kalau menurut saya, khilafah adalah salah satu sub dari ajaran Islam. Jika kita buka buku fiqh yang lengkap ada satu bab tentang khilafah, itu adalah hal yang dijamin oleh negara. Kita negara Pancasila artinya kalau agama yang resmi di negara ini, maka seluruh ajaran agama itu juga dilindungi dan dijamin oleh negara.[]



Neno Warisman,
Penggagas 2019 Ganti Presiden

FPI Garda Kemanusiaan

Saya mengenal FPI sejak awal adalah tulang punggung dari bencana. Dalam artian yang sesungguhnya,

karena semua panglima FPI itu menyebar di seluruh provinsi Indonesia dan mereka orang-orang yang pertama kali terjun dan tidak memiliki niat apapun, kecuali hanya menolong masyarakat.

Di Aceh, saya melihat bagaimana FPI. Ada kesaksian juga dari umat kristiani bahwa FPI betul-betul bekerja untuk kemanusiaan. Kepada pemerintah tolong hal ini diperhatikan, semoga keadilan ini dapat menentramkan hati kita semua. Dengan memberikan kemudahan, sebagaimana Presiden Republik Indonesia mengatakan bahwa saya adalah presiden untuk seluruh bangsa Indonesia. FPI adalah yang sudah berjasa kepada bangsa dan negara.[]



KH Shoffar Mawardi,
Pengasuh Pesantren Darrul Muwahhid

Wakili Umat Cegah Kemungkaran

FPI adalah bagian dari umat Islam yang berani mengemban tugas yang sangat berat yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Terlebih nahi munkar, lebih berat lagi resikonya, namun harus dilaksanakan karena kalau ditinggalkan akan mendatangkan hukuman dari Allah dan tidak diijabahnya doa. Bisa dikatakan FPI mewakili umat mencegah kemungkaran.

Siapun yang bertindak menghadang proses pemberian izin kepada FPI, berarti menghadang perjuangan menyelamatkan negeri ini dari hukuman Allah akibat merajalelanya kemaksiatan di tengah masyarakat.

FPI berdiri sejak 1998. Telah melewati beberapa

masa pemerintahan dan kepemimpinan. Bila ideologinya bermasalah, tentu sudah dari dulu FPI tidak diberi izin oleh pemerintah. Bila baru sekarang izin FPI tidak segera diberikan, sesungguhnya yang bermasalah itu FPI atau yang sedang menguasai pemerintah?[]



Tiar Anwar Bachtiar,
Sejarawan dan Intelektual Muda
Persatuan Islam (Persis)

Ini Soal Politik

Ya, saya kira ini soal FPI dan ideologi negara bukan soal ideologi tapi soal politis. Jadi memang pimpinan FPI dalam hal ini Habib Rizieq, sedang berseberangan dengan penguasa yang ada saat ini. Jadi karena itu biasanya karena politis akan dipersulit segala hal dengan kaitan FPI.

Kalau soal ideologi itu masih bisa diperbincangkan, apa yang dianggap tidak sesuai dengan ideologi negara dengan FPI itu. Saya kira kalau secara nilai-nilai ideologis dengan negara ini tidak ada yang bertentangan, misalnya tentang Pancasila itu bisa tercermin dari tesisnya Habib Rizieq. Beliau itu di Malaysia menulis tesis tentang Pancasila dan dia termasuk yang melihat positif Pancasila ini sebagai dasar negara. Artinya apa? FPI tidak pernah punya gagasan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.

Cuma persoalannya memang secara politik, sejak pemerintahan Jokowi, dia sangat keras mengkritik pemerintah bahkan menggerakkan demo 212. Yang secara politis membahayakan kekuasaan Jokowi. Oleh sebab itu kalau sampai FPI tidak dizinkan kemungkinan bukan karena pertentangan ideologi negara.[]



Edy Mulyadi,
Sekjen GNPF MUI

Kebencian Penguasa

Yang dimaksud tidak sesuai dengan ideologi negara itu yang mana?

Ini *kan* lucu, penguasa ini *kan* baru 5 tahun, kenapa sudah mencap radikal kepada FPI. Kenapa 10 dan 15 tahun yang lalu justru hanya diam saja. SKT juga mulus-mulus aja, jadi ini hanya kebencian penguasa kepada FPI khususnya dan umumnya terhadap Islam.

Nanti lama-lama kalau seperti ini majelis ta'lim juga bisa dibubarkan karena kebencian mereka terhadap Islam. Ditambah kalau Cina dan Komunis sudah berkuasa.

Dan sebenarnya ini agenda utamanya adalah menjatuhkan lawan politik, ini politis, karena FPI bersama PA, dan GNPF MUI ini dianggap kebangkitan politik Islam yang terbukti mampu menghimpun umat dan rakyat begitu besar, dan itu sebelumnya tidak bisa dilakukan oleh siapapun, organisasi manapun.

Mereka melihat itu sebagai simbol-simbol kebangkitan Islam yang dimotori oleh para ulama untuk itulah mereka berusaha mengeliminasi atau memperkecil gerakan politik Islam itu.[] **ghifari-fatih-joy**



Dahsyatnya Sakaratul Maut

Oleh: Rokhmat S Labib, MEI



Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya ancaman. (TQS Qaf [50]: 19-20).

Dalam ayat-ayat sebelumnya, diberitakan tentang adanya dua malaikat yang mencatat amal perbuatannya. Yang satu duduk di sebelah kanan, dan yang lainnya duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkan manusia melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.

Ayat ini kemudian mengingatkan datangnya sakaratul maut dan ditiupnya sangkakala.

Dahsyat



Allah SWT berfirman: *Wajâat sakrat al-mawt bi al-haqq* (dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya). Ayat ini di'athafkan kepada ayat sebelumnya. Setelah disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya tentang pengingkaran orang-orang kafir terhadap hari kebangkitan dan dibantah dengan menyebutkan kekuasaan dan ilmu-Nya, kemudian Allah SWT memberitahukan kepada mereka bahwa mereka akan menjumpai apa yang mereka ingkari dan mereka sangkal dalam waktu dekat ketika mereka mati dan ketika Hari Kiamat. Yang pertama, yakni kematian adalah kiamat *sughrâ* (kiamat kecil), dan yang kedua adalah kiamat *kubrâ* (Kiamat besar).

Bahwa dua peristiwa amat dekat kedatangannya, diungkap-

kan dengan menggunakan bentuk *al-mâdhî* (masa lampau). Allah SWT berfirman: *Wajâat sakrat al-mawt bi al-haqq* (dan telah datang sakaratul maut); juga berfirman: *Wa nufikha fî al-shûr* (dan telah ditiup sangkakala).

Di samping dipahami memberikan makna dekatnya waktu, penggunaan kata *jâat* (telah datang) yang merupakan *al-fi' al-mâdhî* (kata kerja waktu lampau) juga menunjukkan kepastian terjadinya peristiwa tersebut.

Dijelaskan pula oleh Syihabuddin al-Alusi, ayat ini hingga akhir menyempurnakan penjelasan sebelumnya tentang penetapan Hari Kebangkitan yang mereka ingkari dengan dalil yang paling jelas dan paling terang; yang menunjukkan bahwa perkara yang diingkari itu akan menjumpainya.

Diberitakan ayat ini, peristiwa yang pasti datang kepada manusia adalah *sakrat al-mawt* (sakaratul maut). Kata *sakrah* merupakan *ism al-marrah*. Yakni, mashdar yang menunjukkan jumlah perbuatan dari kata *sakrah*. Secara bahasa, kata tersebut bermakna *jahl*, *dhalâl* (bodoh, lalai, dan sesat). Lawan katanya adalah *sahâ* (sadar, tidak mabuk).

Kata *sakrat al-mawt* menurut Wahbah al-Zuhaili merupakan *isti'ârah tashrihiyyah*. Yakni, *ista'âr* atau meminjam kata *al-sakrah* (mabuk) untuk menggambarkan dahsyat dan beratnya kematian.

Pengertian demikian juga dijelaskan oleh banyak mufassir lainnya. Al-Zamakhshari berkata, "Penderitaannya menghilangkan akal." Fakhruddin al-Razi juga berkata, "Yakni, penderitaannya menghilangkan akal dan melemparkan kecerdasan." Dikatakan pula oleh Ibnu Jarir al-Thabari, makna: *Wajâat sakrat al-mawt bi al-haqq* (dan datanglah sakaratul maut) adalah derita kematian menguasai pemahaman manusia, seperti tidak sadar karena tidur dan minuman.

Dengan demikian, ayat menggambarkan tentang dahsyatnya rasa sakit yang dialami

oleh manusia ketika kematian datang menghampiri mereka. Tentang rasa sakit ketika menghadapi kematian juga dikabarkan Rasulullah SAW. Ketika itu datang kepada beliau, beliau pun mengusap keringat dari wajahnya, lalu bersabda: *Tidak ada tuhan selain Allah, sesungguhnya kematian itu mempunyai sakarat* (HR al-Bukhari).

Sedangkan dahsyatnya sakaratul maut yang dialami orang-orang kafir diberitakan dalam firman-Nya: *Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya, (sambil berkata): "Keluarkanlah nyawamu"* (QS al-An'am [6]: 93).

Menyaksikan Berita tentang Akhirat

Sedangkan kata *bi al-haqq* (dengan sebenar-benarnya), menurut banyak mufassir huruf *al-bâ'* dalam ayat tersebut mengandung makna *li al-ta'diyyah* (menjadikan kata sesudahnya menjadi *maf'ûl bih* atau objek), sebagaimana dalam kalimat: *Jâa al-Rasûl bi al-khayr* (Rasulullah SAW mendatangkan kabar). Sehingga makna ayat ini adalah: *Wa ahdharat al-mawt haqiqat al-amr* (dan sakaratul maut itu mendatangkan perkara yang sebenarnya) yang telah disampaikan kitab-kitab Allah SWT dan rasul-rasul Allah). Termasuk bahagia atau celaka bagi mayit.

Makna ini dikemukakan oleh beberapa mufassir seperti Ibnu Jarir al-Thabari. Menurutny, maksud *bi al-haqq* di sini adalah perkara akhirat. Manusia pun menyaksikan perkara itu dengan jelas sehingga dia membenarkan dan mengetahuinya. Tak jauh berbeda, Ibnu Katsir berkata, "Artinya, Aku tampilkan kepadamu secara meyakinkan apa yang selama ini kamu meragukannya."

Al-Jazairi berkata, "Meskipun panjang usianya, kalian tetap akan mati. Itulah datangnya sakaratul maut. Yakni, dahsyat dan sakitnya benar-benar terjadi, termasuk urusan akhirat sehingga orang-orang yang mengingkari dan mendustakan Hari Kebangkitan dan kehidupan akhirat akan melihatnya dengan mata mereka."

Al-Imam al-Qurthubi juga

berkata, "Manusia selama hidupnya, semua perkataan dan perbuatannya selalu dicatat untuk dihisab. Kemudian ketika kematian datang, maka dia akan melihat dengan mata mengenai benarnya janji dan ancaman Allah SWT."

Tak Mungkin Dihindari

Kemudian dilanjutkan dengan firman-Nya: *Dzâlika mâ kuntu minhu tahidu* (itulah yang kamu selalu lari daripadanya). Kata *dzâlika* menunjuk kepada kata *mawt* (kematian). Ibnu Katsir berkata, "Inilah kematian yang selama ini kamu lari darinya. Ia datang menjemputmu, maka tiada jalan lari dan tiada jalan selamat bagimu untuk menghindarinya."

Tentang *mâ* dalam ayat ini, ada dua pendapat. Pendapat pertama, itu adalah *mawshûlah* yang berarti: yang kalian lari darinya. Maknanya: kalian menghindari, menjauhkan diri, dan melarikan darinya, kini telah datang menjemput dirimu.

Termasuk yang menafsirkan demikian adalah Ibnu Jarir al-Thabari. Mufassir tersebut berkata, "Itu adalah sakarat yang datang kepadamu dengan sebenar-benarnya, wahai manusia, yang kalian lari diri darinya dan kalian hindari." Pendapat ini juga dikemukakan oleh al-Khazin.

Pendapat kedua, bahwa *mâ* tersebut adalah *nâfiyyah* (menegasikan). Artinya: Itu adalah yang kalian tidak bisa melarikan diri darinya dan tidak dapat pula mengelak darinya.

Kedua penafsiran tersebut secara makna bisa diterima keduanya. Sebab, keduanya terjadi pada manusia. Manusia berupaya melarikan diri kematian dan dia pun tidak mampu menghindarinya sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya: *Katakanlah: "Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada (Allah), yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata"* (QS al-Jum'ah [62]: 8).

Imam Tabrani dalam kitab *Mu'jamui Kabir-nya* juga meriwayatkan dari Samurah bin Jundub bahwa Rasulullah SAW berkata: *Perumpamaan orang yang lari dari kematian sama dengan musang yang dituntut oleh bumi untuk membayar utang, maka musang*

IKHTISAR:

1. Beratnya sakaratul yang dialami oleh manusia.
2. Ketika meninggal, manusia menyaksikan berbagai perkara ghaib yang diberitakan.
3. Orang yang mengingkari Hari Kiamat mengalami penyesalan.

itu keluar berusaha; dan manakala telah lelah dan kecapaian, ia masuk ke dalam liangnya. Lalu bumi berkata kepadanya, "Hai musang, bayarlah piutanku!" Maka musang keluar dengan nafas yang terengah-engah, ia terus berusaha dalam keadaan demikian hingga urat lehernya terputus dan matilah ia.

Mengenai *mukhâthab* atau pihak yang diajak bicara ayat ini, ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan bahwa *khithâb* atau seruan ayat ini ditujukan kepada manusia secara umum. Menurut Ibnu Katsir, pendapat yang shahih adalah manusia itu sendiri. Penafsiran tersebut dikaitkan dengan firman Allah SWT dalam ayat sebelumnya: *walaqad khalaqnâ al-insân (dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia)*.

Fakhruddin al-Razi juga mengatakan bahwa *khithâb* atau seruan itu bersifat umum mencakup semua orang yang mendengarkannya. Seolah dikatakan, "Itulah yang kamu selalu lari daripadanya, wahai pendengar."

Ada juga yang berpendapat bahwa yang diseru ayat ini adalah orang-orang fajir atau kafir. Penafsiran ini ketika dikaitkan kata *al-haqq*, maka *khithabnya* ditujukan kepada al-fajir.

Demikianlah. Mereka yang mengingkari Hari Kebangkitan beserta semua yang terjadi pada hari itu pasti tidak akan bisa membantahnya ketika datang sakaratul maut. Saat nyawanya dicabut oleh malaikat, mereka segera menyaksikan secara langsung dengan mata kepala mereka apa yang selama hidupnya mereka ingkari. Saat itu, mereka menyesal. Namun sudah tidak ada gunanya. Maka, sebelum terlambat, segeralah bertaubat. Imanilah semua perkara yang diperintahkan untuk diimani, serta taatilah semua perintah dan larangan Allah SWT, niscaya akan bahagia. *WaL-âh a'alam bi al-shawâb.* []

Impor Rektor, Berbahaya

"Perguruan tinggi itu adalah mencetak orang-orang calon pemimpin di Indonesia suatu saat nanti.

Bagaimana kalau rektor impor justru dia adalah agen penjajah dari negeri-negeri lain?"



Kementrian Riset Dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) berencana mengimpor ahli pendidikan asing untuk menjadi pemimpin di perguruan tinggi Indonesia. Hal itu dimaksudkan agar pendidikan tinggi di Indonesia bisa segera menjadi perguruan tinggi yang berkelas internasional.

Menanggapi hal tersebut pengamat

dan praktisi pendidikan Kusman Sadik mengatakan, kebijakan tersebut tidak mengandung aspek edukasi sama sekali justru akan berbahaya. "Perguruan tinggi itu adalah mencetak orang-orang calon pemimpin di Indonesia suatu saat nanti. Bagaimana kalau rektor impor justru dia adalah agen penjajah dari negeri-negeri lain? Mereka akan menjalankan berbagai kebijakannya nanti, itu sangat berbahaya," ungkapnya kepada *Media Umat*.

Kebijakan tersebut dinilai tidak tepat juga karena seharusnya negara Indonesia mempunyai target untuk mengeksport rektor, bukan mengimpor karena jika mengimpor menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang terjajah.

"Seperti contoh kita menyebut anak kecil kita diberi mainan yang berbahaya untuk alasan edukasi. Edukasi itu mestinya yang menunjukkan kewibawaan dan hasil, bukan malah menyudutkan bangsa ini kedalam bahaya," tegas doktor di salah satu perguruan tinggi negeri ini.

Apabila dihubungkan terhadap ideologi, lanjutnya, ini adalah bagian dari perang ideologi. Perang antara ideologi Islam dan komunis, liberal serta kapitalisme. Karena perang ideologi bisa masuk melalui ba-

nyak ranah seperti ekonomi, politik, termasuk pendidikan.

"Dan saya lihat ranah itu adalah masalah-masalah sensitif yang mana perang ideologi itu masuk. Tujuannya adalah melemahkan suatu negara, apalagi negeri itu seperti Indonesia mayoritas kaum Muslimin. Tentu negara-negara yang ingin menundukkan Islam maka akan memperhatikan Indonesia sebagai target," jelasnya.

Kusman mengaku tidak mengetahui apa maksud sebenarnya dalam rencana tersebut, namun menurutnya kebijakan itu tidak tepat dan berbahaya.

"Saya kira kita lihat dari berbagai perguruan tinggi seperti UGM, ITB, UI dan sebagiannya itu mengkritisi kebijakan itu, tidak ada aspek edukasi di dalamnya," tegasnya.

Kusman juga mengomentari sikap pemerintah yang terbuka terhadap ideologi dan kebijakan asing namun malah terkesan takut dengan ideologi Islam yang mana menjadi mayoritas di negara ini.

"Saya kira ada upaya membuat monoterisasi terhadap ajaran Islam. Saya kira ini persoalan global, ini bagian strategi dari negara-negara penjajah karena dari tesis-tesis mereka bahwa ke depan itu pertarungan

ideologi antara Islam dan kapitalisme, Islam dan ideologi-ideologi lain," jelasnya.

Sebelumnya, Menristekdikti Nasir menargetkan pada 2020 sudah terdapat perguruan tinggi yang dipimpin rektor terbaik dari luar negeri. Setidaknya, ditargetkan dalam lima tahun ke depan terdapat lima PTN yang akan dipimpin rektor asing.

Untuk memuluskan rencana tersebut, Nasir berencana merevisi peraturan agar WNA bisa memimpin dan mengajar serta meneliti di PTN.

Nasir bahkan mengklaim ada sudah ada calon rektor dari Korea yang sudah menawarkan diri. Namun, katanya, tak semudah itu saja bagi WNA untuk menjadi rektor di perguruan tinggi Indonesia.

"Kalau mereka ingin jadi rektor dari negara-negara asing paling tidak harus kita perhatikan dia punya *network* atau *track record*-nya. Kami nanti akan lakukan *global bidding* (penawaran global), pertama yang harus kita lihat adalah dia yang punya *network*, yang kedua pengalaman dia di dalam mengelola perguruan tinggi itu seperti apa, mampukah meningkatkan rating suatu perguruan tinggi itu menjadi lebih baik," kata Nasir kepada wartawan di Gedung Ristekdikti. **fs**

Muslimah Day Dipersekusi Pelaku Langgar Hukum, Wajib Ditindak

Tindakan yang dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan warga Pasundan tersebut bisa berbahaya apabila tidak ditindak, karena dikhawatirkan dapat terjadinya konflik sosial.

Upaya mempersekusi kegiatan keislaman masih saja terjadi. Acara Muslimah Day yang dilaksanakan oleh Shaf Muslimah bertempat di Saparua Park Bandung sempat dipersekusi oleh kelompok yang mengatasnamakan Warga Pasundan. Kelompok tersebut menolak dan mengancam akan membubarkan acara kaum Muslimah ini. Mereka beralasan bahwa acara tersebut akan menimbulkan ketegangan, radikalisme, dan propaganda anti NKRI.

Namun acara tersebut justru berjalan dengan lancar, dan dibuka oleh Ketua DPRD Bandung Edwin Bule Sanjaya, yang mewakili pemerintahan Kota Bandung. Dalam pidatonya, Edwin menjelaskan bahwa Islam menjadi ruh di Indonesia, termasuk Pancasila.

Persekusi itu gagal. Ribuan Muslimah mendatangi tempat acara Sabtu (4/8). Suasana sangat kondusif. Tudingan-tudingan yang dipersangkakan tak terjadi. Ustadz Felix Siauw pun memberikan ceramah yang memotivasi para Muslimah.

Terkait persekusi itu, praktisi hukum Chandra Purna Irawan mengatakan bahwa acara keagamaan sejenis itu tidak ilegal dan merupakan hak dari setiap warga untuk melaksanakan atau mengikutinya. Justru siapapun yang menghalangi atau mencegah hak individu warga negara adalah pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan.

"Apabila tindakan oknum ormas tersebut memaksa untuk membubarkan kajian, maka sepatutnya aparat

menindak dan apabila memenuhi unsur pidana mengganggu ketertiban dan ancaman sebaiknya ditangkap dan diproses secara hukum," jelas Chandra kepada *Media Umat*.

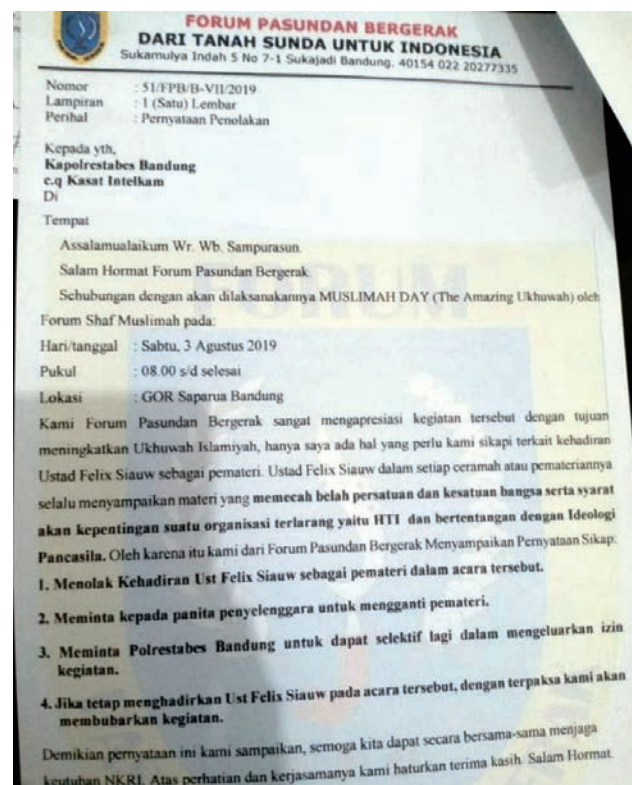
Menurutnya, tindakan yang dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan warga Pasundan tersebut bisa berbahaya apabila tidak ditindak, karena dikhawatirkan dapat terjadinya konflik sosial di akar rumput masyarakat.

Chandra menjelaskan kegiatan keagamaan dan akademik secara hukum adalah kegiatan yang tidak wajib pemberitahuan dan tidak wajib izin sebagaimana Pasal 10 ayat (4) UU No.9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

"Makanya saya tersentak kaget, ketika ada aparat mempertanyakan "izin" kegiatan keagamaan. Paradigma masih salah kaprah dan cenderung melihat persoalan dari sudut pandang kekuasaan. Kekagetan bertambah, ketika membicarakan hal ikhwal kegiatan keagamaan (pengajian dan tabligh Akbar dan sebagainya), aparat menggunakan pendekatan pidana yaitu pasal 510 KUHP," ungkapnya.

Dalam konsep hukum, membicarakan "hak" dengan padanan kata "right" artinya "kebebasan yang diberikan oleh hukum". Bandingkan dengan konsep hukum "izin" dengan padanan kata "pembolehan", maka apabila menggunakan literatur yang ada, di mana "izin" adalah "pembolehan" di mana esensi sebelumnya merupakan "tidak boleh".

"Sedangkan, menjalankan agama atau beribadah atau menyakini ajaran agama adalah hak asasi, hak asasi itu artinya hak yang telah ada semenjak manusia lahir, atau hak



yang telah ada meskipun tidak ada negara," jelas Chandra. **fs**

Ijtima Ulama IV: Penegakan Syariah dan Khilafah adalah Kewajiban Islam

Menolak kekuasaan yang berdiri atas dasar kecurangan dan kezaliman serta mengambil jarak dengan kekuasaan tersebut.

Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional IV kembali digelar, Senin (5/8). Bertempat di Sentul, Bogor, Jawa Barat, acara yang dihadiri oleh para ulama, habaib, dan tokoh umat Islam ini menyepakati beberapa poin penting bagi umat Islam.

Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Yusuf Martak membacakan salah satu hasil Ijma Ulama yakni bahwa semua ulama Ahlisunnah wal jamaah sepakat bahwa penerapan syariah dan penegakan khilafah adalah kewajiban agama Islam.

Kepada pemerintah, Yusuf meminta aktivis dan ulama yang ditangkap saat Aksi 212 pada Desember 2016 segera dilepaskan dan dibebaskan dari segala tuduhan. Tak lupa, mereka juga mendesak aparat memulangkan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Syihab, tanpa syarat.

Tak hanya itu, rekomendasi ini juga menyerukan agar Ijtima Ulama bisa dijadikan lembaga yang terdaftar untuk menampung aspirasi-aspirasi ulama.

"Perlunya Ijtima Ulama dilembagakan sebagai wadah musyawarah antara habaib dan ulama, serta tokoh istiqamah untuk terus menjaga kemaslahatan agama, bangsa, dan negara," ujarnya.

Inilah delapan butir hasil Ijtima Ulama IV:

1. Menolak kekuasaan yang berdiri atas dasar kecurangan dan kezaliman serta mengambil jarak dengan kekuasaan tersebut.
2. Menolak segala putusan hukum yang

tidak memenuhi prinsip keadilan.

3. Mengajak seluruh ulama dan umat untuk terus berjuang dan memperjuangkan:

- 3.1 Amanat Undang-Undang anti penodaan agama dan tertuang dalam MPRS nomor 1 tahun 1995 juncto UU nomor 5 tahun 1999, juncto pasal 156 a.

- 3.2. Mencegah bangkitnya ideologi marxisme, leninisme, komunisme, maoisme dalam bentuk apapun dan cara apapun. Sesuai amanat TAP MPRS nomor 28 Tahun 1966 UU nomor 27 tahun 1999 juncto KUHP pasal 1,107 a, 107 b, 107 c, 107 d, dan 107 e.

- 3.3. Menolak segala bentuk perwujudan tatanan ekonomi kapitalisme dan liberalisme di segala bidang, termasuk penjualan aset negara kepada asing maupun aseng, dan memberikan kesempatan pada semua pribumi tanpa memandang suku maupun agama untuk menjadi tuan di negeri sendiri.

- 3.4. Pembentukan tim investigasi dan advokasi untuk mengusut tuntas tragedi 2019 yang terkait kematian lebih dari 500 petugas pemilu tanpa autopsi, dan lebih dari 11 ribu petugas pemilu yang jatuh sakit serta ratusan rakyat yang terluka, ditangkap, dan disiksa, bahkan 10 orang dibunuh secara keji dan 4 di antaranya adalah anak-anak.



- 3.5 Menghentikan agenda pembubaran ormas Islam serta stop kriminalisasi ulama maupun persekusi dan serta membebaskan semua ulama dan Aktivis 212 beserta simpatisan yang ditahan, dipenjara pasca aksi 212 tahun 2016, hingga kini dari segala tuntutan, serta memulangkan imam besar umat Islam Indonesia, Habib Muhammad Rizieq bin Husain Syihab ke Indonesia tanpa syarat apapun.
- 3.6 Mewujudkan NKRI syariah yang berdasarkan Pancasila sebagaimana termaksud dalam pembukaan dan batang tubuh UU 1945 dengan prinsip ayat suci di atas ayat konstitusi agar diimplementasikan dalam kehidupan beragama berbangsa dan bernegara.
4. Perlunya Ijtima Ulama dilembagakan sebagai wadah musyawarah antara habaib

dan ulama serta tokoh istiqamah untuk terus menjaga kemaslahatan agama, bangsa, dan negara.

5. Perlunya dibangun kerja sama dari pusat hingga daerah, antar ormas Islam dan parpol yang selama ini istiqamah, berjuang bersama habaib dan ulama, serta umat Islam dalam membela agama bangsa dan negara.
6. Menyerukan kepada umat Islam untuk mengkonversi simpanan dalam bentuk logam mulia.
7. Membangun sistem kaderisasi yang sistematis dan terencana sebagai upaya melahirkan generasi Islam yang tangguh dan berkualitas.
8. Memberikan perhatian secara khusus terhadap isu dan masalah substansial tentang perempuan, anak dan keluarga melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang tidak bertentangan dengan agama dan budaya. [] ghifari

KPU Akui Situng Banyak Permainan

Justru hal ini mengonfirmasi benarnya praduga publik, tentang adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, massif, dan brutal.

Sudah lebih dari tiga bulan, sistem perhitungan (Situng) suara Pemilu 2019 belum juga kelar. Ternyata, seperti yang diduga banyak kalangan, ada masalah dalam perhitungan itu. Ini diakui sendiri oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi.

Ia mengatakan Situng Pemilu 2019 tak rampung karena banyak permainan suara di tingkat bawah. Pramono menyampaikan potensi manipulasi suara besar terjadi pada pemilihan legislatif.

"Kami mendeteksi daerah-daerah yang upload Situngnya lambat di Pemilu 2019, itu terindikasi di daerah-daerah di mana memang C1 sudah berantakan karena banyak permainan-permainan itu," kata Pramono dalam diskusi di Kantor Kode Inisiatif, Jakarta, Rabu (31/7).

Pramono mengaku, petugas-petugas uploader tak berani mengunggah data ke Situng karena form C1-nya sudah beranta-

kan sejak di tingkat bawah.

"Banyak permainan-permainan di tingkat bawah, jadi mereka mau upload enggak berani karena sudah diacak-acak," ujarnya.

Pramono tak merinci daerah mana yang dimaksud C1 berantakan sejak di tingkat bawah. Namun hingga Rabu (31/7), Situng untuk Pileg 2019 baru selesai 98,74 persen, sedangkan untuk Pilpres 2019 di angka 99,42 persen.

Ada beberapa provinsi yang belum menyelesaikan Situng pileg adalah Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Papua, Papua Barat, dan Maluku.

Ketua LBH Pelita Umat Ahmad Khozinudin menilai, justru hal ini mengonfirmasi benarnya praduga publik, tentang adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, massif, dan brutal.

"Di MK juga telah dibongkar kecurangan itu, sayangnya hakim MK memba-

tasi objek peradilan hanya fokus pada sengketa PHPU dan mengesampingkan fakta kecurangan Pemilu," celetuknya saat wawancara dengan *Media Umat* Senin (5/8/2019) di Jakarta.

Ahmad melihat, seharusnya situng KPU itu lebih dulu selesai ketimbang rekap manual. Karena situng itu diperoleh dari data C-1 yang diunggah dan kemudian diolah menjadi data perolehan suara dan ditampilkan ke publik. Beda dengan hitung manual yang terkendala proses pengiriman data dan penghitungan manual.

Menurutnya, jika sampai hari ini situng belum selesai, sementara pengumuman kemenangan sudah dilakukan KPU bahkan lebih awal dari jadwal yang ditetapkan dan pada malam hari, tentu ini bermasalah.

"Ya itu tadi, hal ini sekali lagi menguatkan praduga publik tentang adanya kecurangan Pilpres, sebagaimana telah kita ketahui bersama dari fakta persidangan di MK," tegasnya.

Kemenangan Jokowi itu hanya tegak di atas pilar legalitas, namun minus legitimasi. "Benar, bahwa secara legal Jokowi yang dimenangkan KPU. Benar pula, bahwa MK telah menolak gugatan 02 dan menguatkan legalitas kemenangan 01. Namun, itu hanya di atas kertas," terangnya.

Sementara, keyakinan yang beredar di tengah masyarakat itu Pilpres curang. Dan Jokowi, adalah presiden yang memenangkan Pilpres dengan keyakinan dipenuhi kecurangan itu.

"Jadi, kemenangan Jokowi itu minus legitimasi rakyat," kata Ahmad.

Menurut Ahmad, jika ini terus berlangsung akan berbahaya, sebab memimpin tanpa kepercayaan, tanpa legitimasi itu seperti nahkoda yang tak diakui ABK. Suatu saat kapal dalam kondisi genting, perintah nahkoda bisa saja diabaikan awak kapal dan ABK. Jika ini terjadi, bisa tenggelam kapal Nusantara ini. [] ghifari

Pada prinsipnya umat Islam sudah bersama-sama mencapai kesepakatan bahwa politik adalah hal yang penting, karena menjadi pangkal kebaikan dan keburukan.

Ulama Dukung Kebangkitan Politik Islam



Pasca pilpres, umat semakin disadarkan bahwa suara kaum Muslim hanyalah alat. Pada akhirnya mereka dikecewakan oleh bagi-bagi kekuasaan dalam demokrasi. Karena itu para ulama di beberapa daerah bertemu untuk merajut persaudaraan dan membahas urgensi kepemimpinan umat Islam ke depannya.

Di Serang, Banten hari Ahad, 14 Juli 2014 diselenggarakan Forum Politik Ulama Banten di Serang. Dipandu oleh Dadan Hudaya, mereka membahas penyatuan pikiran dan langkah antar umat Islam menuju cita-cita luhur perjuangan Islam. Selain itu, mereka merumuskan sikap atas fenomena politik yang terjadi di tengah kaum Muslimin agar tidak terjadi salah langkah dan justru mengaburkannya dari tujuan perjuangan Islam yang hakiki.

Acara dimulai dengan penyampaian

pendapat dan sikap dari para audiens, terutama pada fokus problematika "Pasca Pilpres, ke mana umat Islam akan melangkah?"

Jubir HTI Ismail Yusanto sebagai narasumber memaparkan, pada prinsipnya umat Islam sudah bersama-sama mencapai kesepakatan bahwa politik adalah hal yang penting, karena menjadi pangkal kebaikan dan keburukan. Dari politiklah lahir kebijakan-kebijakan bagi masyarakat menyangkut ekonomi, sosial, politik, budaya dan sebagainya.

"Seluruh hidup Rasulullah adalah lembaran hidup perjuangan menuju penerapan Islam menjadi tatanan hidup bermasyarakat dan bernegara," ungkapnya.

Menurutnya, metode perjuangan dicontohkan oleh Rasulullah SAW harus diikuti umat Islam. Jika menilik pada *sirah nabawiyah*, ada amal perjuangan Rasulullah

SAW yang senantiasa dilakukan berulang-ulang demi mewujudkan tugas nubuwwahnya.

Ia melihat umat mulai bersemangat untuk kembali kepada Islam. Ini yang seharusnya disikapi dengan gembira karena sebelumnya umat terpecah belah.

"Tanda-tanda keberhasilan tersebut makin menampakkan hasil melalui Aksi Bela Islam 212 yang menghilangkan sekat sektarianisme menuju langkah cita-cita Islam bersama-sama umat," ungkap Ismail.

Tak jauh dari Serang di Bojonegara, Puloampel, berlangsung acara Mudzakaroh Kyai dan Aktivis Islam dengan tema "Merajut Ukhuwah Membangun Peradaban Islam" yang menghadirkan para kyai, kasepuhan, dosen, serta para aktivis Islam yang berasal dari wilayah Cilegon, Merak, dan Bojonegara.

KH Yasin Muthohar yang membuka acara menyampaikan pentingnya ukhuwah dan peradaban Islam. Islam sejak dulu sudah menetapkan Hadharah menjadi bagian terpenting dalam Islam, khususnya dalam bernegara karena sangat erat kaitannya dengan konsep kehidupan. Amat disayangkan bahwa saat ini sedang terjadi agenda penyesatan mengenai peradaban, terutama dalam konsep bernegara.

Ia menekankan para pemimpin negara khilafah sangat memahami konsep hidup yang harus diembannya. Sangatlah fatal bila pemimpin tidak memiliki konsep ini ka-

rena bagaimana peradaban akan dibangun oleh negara bila kita tidak memiliki konsep hidup yang benar.

"Dalam Islam telah disebutkan jika pemimpin yang tidak memiliki konsep ini disebut pemimpin Ruwaibidhah dan hal ini sudah di sebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadist-Nya," ungkap Yasin.

Di Purwakarta, Jawa Barat, digelar Multaqa dan Halal bi Halal Ulama Aswaja di Ponpes Nurrohman al-Burhaniy Purwakarta pada Sabtu (13/7).

KH. Asep Djamiludin, Pimpinan Ponpes Nurrohman al-Burhaniy selaku tuan rumah menyampaikan bahwa permasalahan umat hanya akan bisa tuntas dengan implementasi syariat secara kaffah. "Kita harus berjuang menegakkan kepemimpinan Islam. Syariat Islam," katanya.

KH Azi Ahmad Tadjuddin, mengingatkan bahwa perjuangan mewujudkan tegaknya kepemimpinan Islam membutuhkan ukhuwah. Ulama harus sama dalam perjuangan kepemimpinan Islam.

"Qurannya sama, bacaannya sama, kitab kuning yang dibaca sama, termasuk perjuangan menegakkan khilafah juga harus sama" katanya.

Ia menyampaikan nasihat kepada para peserta yang hadir agar tidak takut dalam perjuangan menegakkan syariah dan Khilafah. "Jangan takut menyerukan Khilafah. Dakwahkan, dakwahkan, dakwahkan!" tegasnya. **fs/shoutululama**

MAJELIS BENGKEL PENGUSAHA

Hijrah Itu Sendirian Saja atau Banyakkan?

Akhirnya saya, dia, pengusaha mahar pun hijrah. Mereka mengajak semua pengusaha Muslim yang masih senasib untuk hijrah juga. Hijrah yang bener!

Kenapa harus mengajak yang lain sih? Itu kan urusan masing-masing aja! Apalagi ada juga lho yang masih membolehkan riba asal sedikit, tidak berlipat-lipat. Ayat pun dikutipnya sebagai pembenar. Akhira dia jual untuk dunia. Nah lho!

Riba memang dosa besar. Dosanya bahkan masuk rekor dosa paling ganas. Pintu dosanya juga banyak. Ustadz ada cerita, dalam hadits riwayat Hakim dan Baihaqi, ada disebut 73 pintu dosa. Pintu dosa yang paling ringan adalah seperti dosanya seorang anak yang menzinahi ibu kandungnya sendiri. Hiiii. Serem kan! Naudzubillahi mindzalik!

Nyatanya, daftar dosa belum selesai. Masih ada lagi! Dan ini yang paling mengerikan!

Mengutip QS Al Baqarah: 275, seorang ustadz menegaskan betapa ngerinya adzab yang akan diterima oleh mereka yang mengulang-ulang melakukan praktek riba. Tempatnya di kerak neraka dan kekal di dalamnya! Percuma shalat, percuma puasa, gak ada gunanya haji berulang kali, tidak ada artinya amal-amal shalih yang lainnya jika terus menerus bermain riba! Semua amal shalih jadi gak berarti jika terus mengulang riba! Kekal di

kerak neraka! Nastaghfirullahal azhim!

Ya Allah... Ampuni kami!

Lanjut. Dalam forum temu bisnis syariah, seorang pengusaha pun bercerita betapa dahsyatnya cengkaman riba pada bisnisnya. Mau lepas, gak bisa. Mau berhenti, gak mau. Nyaman. Tahu dosanya, tapi gimana lagi! Moga nanti di hari tua, masih bisa bertobat! Duh Gusti!

Ceritanya menggelitik, gimana mau lepas wong sistemnya juga ribawi Abah! Bener juga sih. Terus gimana?



Gak jadi hijrah karena sudah *keblanjur* asik dengan riba? Gak, gak! Harus tetap hijrah! Terus gimana dengan sistemnya?

Apa gak naif, hijrah sendiri, bersih sendiri tapi membiarkan jutaan pengusaha lainnya terus tenggelam dalam riba? Gimana? *Kepriben? How? Kaifa?* Jawab Abah!

Sabar...sabar... Abah juga manusia. Sebagai manusia kita kan punya Sang Pencipta. Allah SWT. Allah pasti punya

jawaban. Lewat firmanNya. Lewat lisan RasulNya! Itu pasti!

Jawabannya sudah jelas bin gamblang. Allah SWT mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli! Simpel kan! Cuma kitanya yang suka membuatnya jadi mungkre! Kita maunya problem solving ala kita, seenaknya kita, semaunya kita. Padahal Allah sudah mewanti kita. Kalau riba sudah jelas haram ya sudah tinggalkan, buang jauh-jauh! Kitanya gak pakai, masyarakatnya juga gak, sistem ekonominya juga gak! Pokoknya riba *no way!*

Wah jadi jelas ni. Berarti setiap kita mesti pastikan bersih dari riba sembari sampaikan pada masyarakat untuk juga bersih dari riba. Juga kepada pelaksana sistem ekonomi ribawi agar menyetop riba! Bentuknya gimana? Kata ustadz, itu namanya dakwah! Lho itu kerjanya ustadz kan? Bukan! Itu kerjaan kita semua alias wajib! Terus solusinya apa? Kita musti praktekkan bisnis yang Islami sembari terus sampaikan dakwah agar sistemnya juga Islami. Betul itu! Bisnis akan Islami sempurna kalau sistemnya juga Islami! Bisnisnya akan Islami tapi tidak sempurna, ada gangguan di sana-sini kalau sistemnya tidak Islami alias sekuler!

Jadi hijrah itu memang harus banyak! Jangan sendirian!

Barakallahu fikum...

@bah Salim. Bengkel Pengusaha

Habis Padam, Terbitlah Keinginan Swastanisasi

Sebagai perusahaan negara, PLN lebih banyak dibebani urusan-urusan yang sebenarnya bukan bidangnya.

Listrik di ibu kota Jakarta, Jawa Barat, dan Banten padam beberapa hingga belasan jam, Ahad (4/8). Berbagai kegiatan masyarakat mandeg karena sumber energi mati. Transportasi kereta api dan MRT terhenti. Demikian pula pengguna transaksi *online* sementara harus gigit jari. Kerugian masyarakat akibat listrik padam ini diduga miliaran rupiah dalam waktu sekitar enam jam.

Dalam wawancara dengan CNBC Indonesia TV, Selasa (6/8), anggota Ombudsman Bidang Perhubungan dan Infrastruktur Alvin Lie mempertanyakan monopoli PLN ini. "Nah, apakah ini sekarang masih relevan? Kami setuju bahwa listrik kebutuhan pokok dan harus dikuasai negara, tapi negara ini bukan hanya PLN, dan PLN bukan negara," tuturnya.

Ia menyebutkan, usulan ke depan yakni masalah kelistrikan bisa ditangani oleh pemerintah dalam hal ini menteri, dan pelaku operatornya tidak hanya PLN, tetapi bisa dibagi, karena sekarang

ini banyak penyedia pembangkit listrik swasta. "Mungkin PLN nanti bisa urus transmisi, distribusinya bisa melalui (operator) yang lain," kata Alvin.

Usulan serupa datang dari ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal. Ia berpendapat, pemerintah sebaiknya mulai memikirkan untuk membuka pintu lebih lebar kepada perusahaan swasta agar juga bisa menjadi penyalur listrik kepada masyarakat. Saat ini, biasanya, perusahaan swasta hanya menjual hasil produksi listriknya ke PLN tetapi tidak menjual langsung ke masyarakat.

"Selain tata kelola PLN yang dibenahi, tidak ada salahnya mengundang pemain lain untuk ikut berkompetisi dengan PLN di sektor kelistrikan ini. Ini membuka mata kalau selama ini monopoli dan monopsoni PLN sudah berlebihan juga," ujarnya kepada *CNN Indonesia.com*, Selasa (6/8).

Menurutnya, kehadiran pemain lain bukan tidak mungkin justru memberi dampak yang lebih positif terhadap kualitas pe-



layanan PLN. Contohnya, ketika pemerintah memperbolehkan perusahaan lain mendirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), kualitas SPBU Pertamina justru kian membaik.

Ia berpandangan, kompetisi bisa membuat kualitas pelayanan lebih baik, masyarakat juga jadi punya pilihan. Tidak perlu khawatir pemain baru memasang harga tinggi kan masyarakat juga bisa gunakan kersasionalannya untuk pilih mau beli yang mana," terangnya.

Fithra mengungkapkan peristiwa listrik mati ibarat alarm bagi pemerintah untuk mulai se-

rius membenahi manajemen perusahaan pelat merah itu. Selama ini, pemerintah hanya mengandalkan PLN sebagai satu-satunya penyalur listrik kepada masyarakat. Namun, ia mengingatkan, tugas yang dibebankan kepada perseroan tidaklah ringan.

Pengamat ekonomi Arim Nasim berpendapat berbeda. Menurutnya, harus dilihat terlebih dahulu permasalahan yang dihadapi PLN. Sebagai perusahaan negara, PLN lebih banyak dibebani urusan-urusan yang sebenarnya bukan bidangnya. Di sisi lain, PLN justru tidak mendapat dukungan dari pemerintah agar bisa

melayani rakyat dengan baik.

Makanya, ia menolak jika kondisi yang ada justru diarahkan untuk swastanisasi pelayanan listrik. "PLN hancur karena adanya pelemahan dari dalam, *unbundling*, dan pemaksaan masuknya pasokan dari listrik swasta. Ini yang harus dicermati," tandasnya.

Menurutnya, sangat berbahaya jika perusahaan yang menguasai hajat hidup orang banyak diserahkan kepada swasta. Dapat dipastikan, rakyat menjadi objek pemerasan atas nama bisnis. "Ini bahaya liberalisasi ekonomi," jelasnya. **Im**

Status Pemanfaatan Harta Curian

Oleh: KH Hafidz Abdurrahman

MUAMALAH



Status kepemilikan harta curian adalah haram. Karena kepemilikannya tetap menjadi milik pemilik asal. Karena itu, harta tersebut wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Meski tangan pencurinya telah dipotong. Harta curian tersebut tidak boleh dipertahankan, sebaliknya wajib dikembalikan kepada pemiliknya.

Karena itu, ketika harta curian itu dijual kepada orang lain, maka harta tersebut tetap wajib dikembalikan kepada pemilik asalnya. Pembeli yang telah membayar uangnya harus meminta kembali uangnya dari pencuri yang telah mendapatkan uang tersebut darinya. Alasannya, karena Nabi SAW bersabda, "Siapa saja yang mendapati zat hartanya pada seseorang, maka dia lebih

berhak atasnya, dan pembeli meminta kembali harganya kepada orang yang menjualnya." Di dalam riwayat lain disebutkan, "Dan pembeli meminta kembali harga kepada penjualnya."

Jika barang yang dicuri itu hilang, atau habis dikonsumsi oleh pencurinya, maka dia wajib mengganti harga atau nilainya.

Pencuri harta tersebut juga tidak berhak memberikan harta curian itu kepada orang lain, sebagai hadiah, atau menggunakannya sebagai mahar untuk menikah, atau menggunakannya sebagai biaya untuk menyelenggarakan walimah. Siapa pun yang mengetahui, bahwa walimah itu dibiayai dari harta hasil curian, maka dia tidak boleh menerimanya, baik untuk hadiah, biaya walimah, maupun yang lain.

Jika orang yang mendapatkan harta curian tersebut tahu, bahwa harta tersebut merupakan harta hasil curian, kemudian dia menerimanya, baik sebagai hadiah, biaya walimah, atau yang lain, maka dia berdosa. Tidak hanya itu, dia juga wajib dihukum, sesuai dengan ketentuan hukum syara'.

Mengenai ketidakbolehan menggunakan harta curian yang diharamkan, dan memanfaatkan harta tersebut, sekalipun telah jatuh kepada pihak lain, itu karena adanya dalil khusus yang menjelaskan masalah ini. Meski, dalil ini

tidak bisa diberlakukan terhadap semua harta haram yang lain. Karena cakupannya yang hanya mencakup masalah harta hasil curian.

Selain itu, status keharaman yang melekat pada harta itu terkait dengan status kepemilikannya, bukan karena status asalnya. Artinya, sebab kepemilikan itulah yang menentukan status kepemilikan harta tersebut menjadi halal atau haram. Dan, karenanya, harta tersebut dinyatakan sebagai hak miliknya, atau tidak. Sebab, pada dasarnya harta, dari aspek dzatnya, ketika halal, maka status hukum berikutnya terkait dengan tatacara mendapatkannya.

Tatacara mendapatkan harta itulah yang menentukan status hukum berikutnya pada kepemilikan benda tersebut. Karena itu, Islam telah mengatur sebab kepemilikan (*asbab tamalluk*), selain sebab pengembangan hak milik (*asbab tanmiyatu al-milk*).

Seperti bekerja, waris, pemberian negara, kebutuhan akan harta untuk mempertahankan hidup, harta yang diperoleh tanpa kompensasi, seperti hadiah, hibah, dan lain-lain. Semuanya ini merupakan sebab kepemilikan (*asbab tamalluk*). Adapun sebab pengembangan hak milik (*asbab tanmiyatu al-milk*), seperti jual-beli, syarikah, bertani, berkebun, dan lain-lain. **har**

Ilustrasi halaqah

Sebuah lembaga intelektual yakni Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengeluarkan sebuah buku tentang pencegahan terorisme di Indonesia. Namun isinya justru kurang menunjukkan nilai intelektualitasnya. Seperti apa buku tersebut dan ke mana arah penulisannya? Ikuti Fokus berikut ini.

Halaqah Kriminal?

Tampak LIPI mengikuti para politisi dan peneliti Barat yang melemparkan isu radikalisme untuk mendeskreditkan Islam dan kaum Muslimin.

Cap Islam sebagai sumber terorisme tampaknya sudah melekat pada rezim ini, termasuk kalangan intelektual pendukung rezim. Mereka tak peduli bahwa aksi terorisme yang terjadi selama ini faktanya dilakukan pula oleh kalangan kafir, agama selain Islam.

Sebaliknya, sebagian intelektual justru secara sadar membangun narasi fobia Islam yang secara masif dan sistematis. Sasarannya adalah masyarakat awam.

Inilah yang tampak dalam modul *Pencegahan Terorisme di Indonesia* yang diterbitkan oleh LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) dan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme).

Dalam buku itu tercantum penjelasan Pola Penyebaran Ide Kekerasan adalah melalui; (1) Pengajian, pertemuan (halaqah), dan lain-lain. Lebih lanjut LIPI menjelaskan; "Penyebaran pola lama yaitu melalui halaqah dan pengajian dengan duduk melingkar dan liqa', yaitu pertemuan untuk mengaji."

Pernyataan LIPI tersebut mengandung beberapa pertanyaan sekaligus kritik besar; *pertama*, apakah LIPI sudah menelusuri dengan benar arti halaqah dari khasanah keislaman? *Kedua*, apa metodologi yang dipakai oleh LIPI sampai menyimpulkan bahwa halaqah adalah salah satu metode penyebaran ide kekerasan, bahkan terorisme? *Ketiga*, pertanyaan yang paling mendasar dan penting adalah apa makna radikalisme yang sering digunakan dalam berbagai bahasan dan kajian, termasuk oleh LIPI?

Bagi siapa saja yang memahami khasanah keislaman akan paham istilah halaqah memiliki makna yang sudah populer dalam pendidikan dan pengkajian ilmu-ilmu keislaman. Secara bahasa kalimat halaqah min al-nas artinya kumpulan orang yang duduk berbentuk lingkaran (A.W. Munawwir, 1997: 290). Lafadz halaqah telah digunakan dalam sejumlah nash misalnya dalam hadits yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Nabi SAW. bersabda:

"Jika kalian melewati taman surga maka singgahlah." Sahabat bertanya, "Apakah itu taman surga?" Beliau menjawab, "Halaqah-halaqah zikir."

Menurut istilah halaqah diberi definisi sebagai proses belajar mengajar yang dilaksanakan murid-murid dengan melingkari guru yang bersangkutan. Biasanya duduk di lantai serta berlangsung secara kontinu untuk mendengarkan seorang guru membacakan dan menerangkan kitab karangannya atau memberi komentar atas karya orang lain. (Hanun Asrohah, 1999: 49)

Halaqah adalah model pengajaran Islam yang telah dilakukan sejak awal kenabian, di mana Nabi SAW mengumpulkan para sahabat di kediaman Arqam bin Arqam untuk mengajarkan Islam. Selanjutnya di Madinah, para sahabat melakukan halaqah-halaqah bersama Nabi SAW seperti di Masjid Nabawi dengan waktu-waktu yang dipilih. Ibnu Mas'ud meriwayatkan:

Nabi SAW membuat sela-sela (lingkaran) dalam ceramah pada hari-hari tertentu demi menghindari kebosanan. (HR. Bukhari).

Selanjutnya halaqah banyak dilakukan oleh para sahabat dan para ulama generasi berikutnya sebagai metode pengkajian Islam, bahkan sampai hari ini seperti yang biasa terlihat di masjid-masjid besar semisal Masjid Nabawi. Di dunia pesantren di tanah air, halaqah biasa disebut *bandongan*, kyai duduk di tengah dan para santri melingkarinya untuk menyimak kajian.

Karena itu patut dipertanyakan metodologi yang dipakai oleh LIPI dalam melakukan penelitian tersebut sehingga menyimpulkan halaqah menjadi salah satu penyebaran ajaran kekerasan. Tampak LIPI mengabaikan fakta bahasa, sejarah dan akar ajaran Islam mengenai halaqah.

Penggunaan istilah halaqah oleh LIPI dan BNPT sebagai pola penyebaran kekerasan mengandung kebohongan pada publik sekaligus menciptakan stigma terhadap halaqah dan mengandung penistaan terhadap salah satu ajaran Islam.

Apa yang dilakukan LIPI adalah generalisasi terhadap kegiatan perhalaqahan. Hanya karena ada sekelompok orang yang menyebarkan paham terorisme yang menyimpang, kemudian LIPI menyimpulkan bila halaqah adalah sarana pembibitan radikalisme dan terorisme. Padahal dalam aktivitas halaqah beragam hal dikaji seperti kajian akidah, ibadah, muamalah, hingga zikir.

Selain itu LIPI juga sepertinya sengaja melakukan simplikasi pembahasan. Tidak melakukan kajian mendalam tentang pengertian halaqah, esensinya dalam pendidikan ajaran Islam dan akar sejarahnya. Tahu-tahu menyimpulkan halaqah adalah cara penyebaran paham terorisme.

LIPI juga tidak menjelaskan dengan utuh dan jernih tentang paham radikalisme yang dituduhkan. Pernyataan seperti ini lagi-lagi mengaburkan ajaran Islam yang sebenarnya. Tampak LIPI mengikuti para politisi dan peneliti Barat yang melemparkan isu radikalisme untuk mendeskreditkan Islam dan kaum Muslimin. Kelihatan betul kalau modul itu disusun untuk

membangun narasi fobia Islam sehingga umat Muslim memusuhi agenda-agenda halaqah sekaligus ajaran Islam.

Dipertanyakan

Mengapa istilah radikalisme hanya ditujukan pada kelompok-kelompok yang mengusung Islam syariah seperti FPI dan HTI? Bila tolak ukurannya adalah sikap intoleran, mengapa kelompok-kelompok lain yang menyerang ulama, mempersekusi para ustadz dan membubarkan pengajian jamaah lain tidak disebut sebagai kaum radikal yang intoleran? Apakah karena mereka mengusung NKRI dan Pancasila lalu halal melakukan anarkisme dan persekusi, dan tidak bisa dikategorikan sebagai kaum radikal?

Seharusnya para peneliti di LIPI menjelaskan apakah kebijakan *war on terrorism* yang diadopsi pemerintah sudah tepat ataukah berubah menjadi monsterisasi terhadap ajaran Islam, dan represif bahkan brutal. Berulang kali terjadi korban salah tangkap yang berujung kematian, namun sepertinya luput dari kajian kaum intelektual.

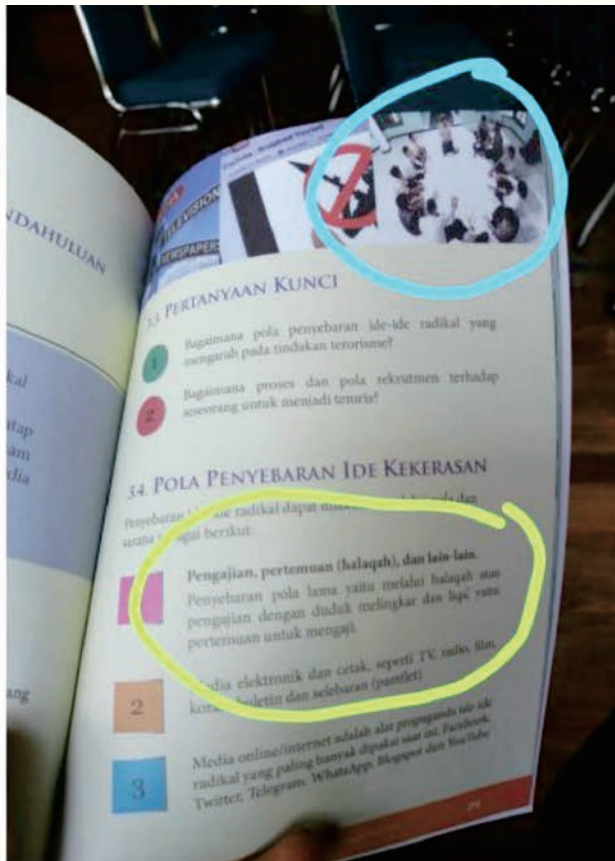
Dan mengapa hampir di seluruh dunia aksi terorisme selalu diidentikkan dengan kaum Muslimin, sementara bila aksi kekerasan bahkan penembakkan yang dilakukan oleh non Muslim seperti warga kulit putih hanya dikatakan sebagai aksi 'pria bersenjata'? Atau mengapa kelompok separatisme Papua sampai hari ini tidak ditempatkan sebagai kelompok teroris meski sudah membunuh banyak warga dan aparat, tapi hanya dilabeli sebagai 'kelompok bersenjata'?

Begitupula apakah isu radikalisme yang berkembang menjadi fobia Islam itu menguntungkan ataukah merugikan kaum Muslimin, dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam? Kaum intelektual bisa melakukan kajian ilmiah terhadap ajaran Islam secara komprehensif. Termasuk mengkaji apakah syariat Islam dan khilafah itu mengancam kemanusiaan atau justru melindungi umat manusia?

Patut disayangkan bila institusi ilmiah seperti LIPI justru membuat modul yang jauh dari bobot ilmiah dan netral. Alih-alih memberikan edukasi yang positif dan menenangkan, LIPI justru mengaburkan persoalan yang sebenarnya dan melakukan kecerobohan fatal dalam modul tersebut. Para peneliti yang harusnya berada di garda terdepan dalam meluruskan masalah, malah berpihak pada kebijakan yang represif dan mengkriminalisasi ajaran Islam. □ **iw/ls**

Stempel Kejam Kaum Intelektual

Baik ulama maupun kaum intelektual harusnya memiliki integritas dalam karya ilmiah, obyektif dan tidak berpihak melainkan pada kebenaran.



Modul *Pencegahan Terorisme di Indonesia* yang diterbitkan oleh LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) dan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), menjadi bukti bahwa kaum intelektual bisa partisan dan membelakangi kebenaran.

Sebagai kelompok masyarakat yang berpikir kritis, cerdas dan ilmiah bisa kehilangan integritas diri dan menggadaikan jiwa intelektualitas mereka manakala tidak berdiri di atas kebenaran. Para penyusun modul itu dengan gegabah menuliskan halaqah sebagai tempat pembibitan radikalisme dan terorisme.

Sikap buruk kaum cendekiawan ini pernah ditanyakan kepada Nabi SAW. Suatu ketika Beliau pernah ditanya oleh para sahabat, "Manusia mana yang paling buruk?" Beliau menjawab, "Para ulama jika mereka telah rusak!"

Dalam dunia tsaqafah Islamiyyah, kaum Muslimin memiliki acuan pendapat dan pemikiran yakni para ulama. Mereka yang dapat mengendalikan dan menentukan warna pemikiran umat. Begitu pentingnya peran ulama, mereka diberikan banyak keutamaan oleh Allah SWT. Namun, mereka juga dikatakan oleh Nabi SAW sebagai manusia yang paling berbahaya, paling buruk jika telah cacat kepribadiannya, menjadi ulama su'.

Dalam dunia akademik dan penelitian, kelompok manusia lain yang juga memiliki peran penting selain ulama, adalah kaum cendekiawan atau intelektual. Mereka juga dapat memengaruhi opini masyarakat. Pendapat-pendapat ilmiah mereka bisa menentukan sikap dan pandangan publik tentang suatu masalah.

Baik ulama maupun kaum intelektual harusnya memiliki integritas dalam karya ilmiah, obyektif dan tidak berpihak melainkan pada kebenaran. Mereka bernalar kritis, mampu merumuskan masalah sekaligus bekerja keras mencari solusi dengan tanpa berpihak.

Kaum akademisi ini juga harus bekerja keras mengingatkan penguasa saat menyimpang dan melakukan kebijakan yang merugikan masyarakat.

Namun situasi politik seringkali membuat kaum cendekiawan ini kehilangan kacamata ilmiahnya yang netral dan fair, malah berpihak pada kekuasaan yang represif. Tentu saja mereka mendapatkan kompensasi uang atau jabatan dan kekuasaan dari rezim yang mereka dukung.

Berapa banyak kaum akademisi yang di era SBY berani mengkritik dengan kritis dan keras berbagai kebijakan pemerintah, akan tetapi di era Jokowi suara menjadi *fals* bahkan lenyap. Bahkan ironinya mereka mendukung kepentingan dan berbagai kebijakan pemerintah secara membabi buta.

Sikap mereka jelas sudah dikonversi dengan berbagai jabatan seperti komisaris di berbagai BUMN. Kaum cendekiawan seperti ini misalnya hampir tidak bersuara melihat kegagalan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan tol Jawa yang sepi karena tarifnya yang mahal, LRT Palembang dan KRL Bandara yang sepi dan tekor, Bandara Kertajati yang minim penumpang, dll. Bahkan nyaris tak ada *warning* akan ancaman utang dari Tiongkok yang sudah menjerat berbagai negara.

Contoh lain sikap hilangnya integritas kaum akademisi juga terlihat dari berbagai survei dan *quick count* yang dibuat pada saat menjelang pilpres lalu. Berbagai survei dan riset terkesan dicurigai direkayasa sedemikian rupa demi memberikan dukungan pada pemegang kekuasaan.

Ketidaknetralan kaum akademisi juga terlihat saat menyikapi isu radikalisme Islam. Publik bisa melihat mereka kritis terhadap kelompok-kelompok yang disebut sebagai kaum radikal seperti FPI dan HTI, tapi bungkam terhadap anarkisme yang dilakukan kelompok-kelompok lain yang sekubu dengan rezim.

Keberpihakan kaum intelektual ini akan dibayar

dengan pemberian jabatan, naiknya tunjangan dan penambahan anggaran penelitian bagi yang bersangkutan, atau juga keuntungan lain bagi instansi tempat sang cendekiawan bernaung. Inilah perselingkuhan kaum intelektual dengan penguasa.

Perselingkuhan ini bisa terjadi dengan dua pendekatan; kaum intelektual yang menawarkan diri dan menjual integritasnya kepada penguasa dengan melakukan survei dan riset yang sejalan dengan kepentingan rezim. Atau penguasa yang mendekati kaum intelektual dan menawarkan berbagai fasilitas dengan syarat mereka memberikan dukungan pada kekuasaannya. Meski ada juga yang mendukung rezim karena khawatir kehilangan jabatan dan tunjangan, atau memilih diam tidak melakukan aksi apapun.

Di sisi lain, rezim juga menjalankan politik belah bambu di tengah-tengah kaum intelektual. Merangkul mereka yang mendukung kekuasaan, dan mempersekusi kelompok akademisi yang kritis dan berpihak pada Islam.

Bagi rezim, dukungan kaum intelektual ini menjadi penting karena mereka adalah kelompok rujukan di tengah-tengah masyarakat. Dengan keilmuan yang dipunya, mereka bisa membalikkan opini publik agar mendukung kekuasaan. Berbekal kapabilitas dan kapasitas keilmuan, kaum akademisi bisa menjadi mesin politik penguasa yang ampuh untuk membungkam suara-suara kritis.

Di dalam Alquran, kaum cerdik pandai ini diingatkan oleh Allah SWT agar jangan pernah mencampurkan kebenaran dengan kebatilan, dan jangan menyembunyikan kebenaran.

Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui. (TQS. Al-Baqarah: 42)

Sikap para cendekiawan semacam ini adalah pengkhianatan terhadap keilmuan mereka dan amanah rakyat. Dengan kecerdasan dan keilmuan yang mereka miliki seharusnya mereka ada di garda terdepan membela kepentingan rakyat dan mengawal penguasa. Apalagi tidak sedikit kaum intelektual yang hidup dari uang rakyat, kalau sekarang mereka mengkhianati rakyat, berarti bukan hanya menjual integritas tapi juga sudah putus urat malunya.

Kejahatan yang lebih besar lagi, adalah jika mereka berani memutarbalikkan ayat-ayat Allah, mengubah hukum-hukum Islam, demi melegitimasi rezim, memberikan stempel kebenaran pada kebijakan yang batil. Seperti mengkriminalisasi bendera tauhid dan hukum wajibnya kekhilafahan, serta menolak syariat Islam. Orang-orang inilah yang disebut Allah SWT menjual ayat-ayat Allah dengan harga sedikit (dunia).

"Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit." (TQS. al-Maidah: 44)

Sementara itu Nabi SAW menyebut di antara perkara yang berbahaya bagi umat adalah kaum munafik yang berdebat dengan memutarbalikkan ayat-ayat Allah:

"Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takuti menimpa umatku, adalah setiap munafik yang pandai bicara (bersilat lidah)." (HR. Ahmad no. 143). □ **iw/ls**

Respon Nabi dan Para Sahabat Menghadapi “Perang Total”

Oleh: KH Hafidz Abdurrahman

Intelijen Negara Islam di Madinah telah melaporkan informasi tentara Makah, tiap perkembangan baru, sampai berita terakhir tentang posisi kamp mereka. Ketika itu, Nabi SAW mengadakan pertemuan militer tingkat tinggi guna meminta masukan dalam menentukan posisi pasukan. Nabi SAW telah memberitahukan kepada mereka tentang mimpi baginda SAW.

Nabi SAW bersabda, *“Demi Allah, aku telah mendapatkan mimpi yang bagus. Aku melihat dalam mimpiku seekor sapi disembelih. Aku juga melihat ujung pedangku patah. Aku melihat tanganku di sebuah baju besi yang kokoh.”* Sapi yang disembelih ditafsirkan sebagai beberapa sahabat baginda yang gugur. Patahnya ujung pedang baginda SAW ditafsirkan sebagai wafatnya salah seorang anggota keluarga baginda. Sementara baju besi ditafsirkan sebagai Madinah, yang menjadi benteng.

Setelah menyampaikan mimpinya, baginda SAW menyampaikan pandangannya, agar para sahabat tidak keluar dari Madinah, dan tetap bertahan di dalam kota. Kalau kaum kafir Quraisy dan sekutunya tetap memilih tinggal di barak-barak mereka, maka mereka akan sia-sia. Sebaliknya, kalau mereka nekad menyerang kaum Muslim di Madinah, maka kaum Muslim akan menyerang mereka di mulut-mulut gang, sementara kaum perempuan bisa menyerang mereka dari atap rumah. Begitulah pendapat Nabi SAW.

Abdullah bin Ubay bin Salul, yang saat itu hadir mewakili salah satu pimpinan Khazraj, mendukung sepenuhnya pendapat Nabi SAW. Dia mendukung bukan karena ketepatannya dari aspek militer, tetapi karena dia tidak ingin berperang, agar tak tampak menyolok mata. Tetapi, Allah Maha Tahu siasat busuk orang munafik. Karena, sebenarnya mereka dan teman-teman munafiknya adalah kafir, hanya menyembunyikan kekufurannya di depan Nabi SAW dan para sahabat. Dengan begitu, kaum Muslim bisa mengenali ular-ular berbisa yang ada di tengah-tengah mereka.

Karena itu, para sahabat yang sebelumnya mengikuti Perang Badar, maupun yang tidak, khususnya sahabat junior, mengusulkan agar keluar menyongsong musuh di luar Madinah. Mereka berkeras menyampaikan hal itu, sampai ada yang mengatakan, *“Ya Rasulullah, kami telah memimpin-mimpikan hari ini, dan selalu memintanya kepada Allah. Sekarang Allah sudah menuntunnya, dan tujuannya pun sudah dekat. Mari kita keluar untuk menghadapi musuh di luar, agar tak ada anggapan bahwa kita takut kepada mereka.”*

Orang yang paling antusias dan semangat adalah Hamzah bin 'Abdul Muthallib, paman Nabi SAW, yang kemudian menda-

patkan hadiah terbaik dalam Perang Uhud ini. Ia berkata kepada Rasulullah SAW, *“Demi Dzat yang telah menurunkan Alquran kepadamu, aku tidak akan makan makanan sedikit pun sampai bisa membantai mereka di luar Madinah dengan pedangku.”*

Akhirnya, Nabi pun mengabaikan pendapat baginda SAW sendiri, dan mengikuti suara mayoritas, yang rata-rata merupakan sahabat junior. Mereka bersemangat untuk menyongsong musuh di luar Madinah.

Setelah itu, Nabi SAW menunaikan shalat Jumat, bersama kaum Muslim di Mas-

baginda, Abu Bakar dan 'Umar. Kedua sahabat ini, yang juga merupakan pembantu Nabi dalam mengurus pemerintahan, membantu baginda SAW memakaikan baju zarrah. Baginda melengkapinya dengan senjata, baju besi rangkap, dan menyarungkan pedang. Barulah baginda SAW keluar menemui orang-orang.

Saat baginda SAW masih di dalam rumah, dan para sahabat menunggu baginda keluar, Usaid bin Hudair dan Sa'ad bin Mu'adz berkata kepada mereka, *“Mengapa kalian memaksa Rasulullah untuk keluar. Serahkan saja masalah ini ke tangan baginda.”*

putusan antara dirinya dan musuhnya.” Allahu Akbar. Nabi SAW tetap teguh memegang keputusan musyawarah, yang diputuskan dengan suara mayoritas itu, dan tak mau membatalkan keputusannya.

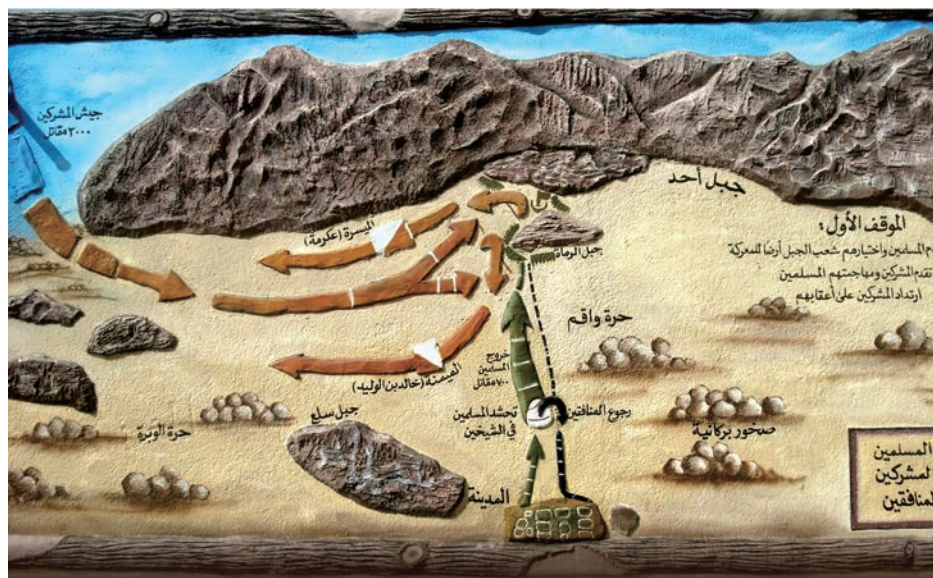
Maka, Rasulullah SAW membagi pasukannya menjadi tiga regu: *pertama*, Regu Muhajirin. Regu ini panji-panji perangnya diserahkan kepada Mush'ab bin 'Umair al-'Abdari. *Kedua*, Regu Aus dari Anshar. Regu ini panji-panji perangnya diserahkan kepada Usaid bin Hudhair. *Ketiga*, Regu Khazraj dari Anshar. Regu ini panji-panji perangnya diserahkan kepada Hubab bin Mundzir al-Jamuh. Jumlah mereka semua saat itu sebanyak 1.000 personil. Lengkap dengan baju besinya, tetapi tanpa pasukan berkuda satu pun.

Ketika hendak meninggalkan Madinah, baginda SAW mengangkat 'Abdullah bin Umri Maktum, yang buta, karena termasuk *uli ad-dharar*, sehingga tidak ikut berperang, untuk memimpin shalat jamaah di Madinah.

Setelah itu, Nabi SAW menginstruksikan kepada pasukannya untuk berangkat. Mereka berangkat ke arah utara. Sa'ad bin Muadz dan Sa'ad bin Ubadah berjalan di depan baginda SAW, dengan memakai baju zarrah. Saat melintasi *Tsaniyyatu al-Wada'*, dari kejauhan mereka melihat ada satuan pasukan bersenjata lengkap, yang bukan bagian dari rombongan pasukan mereka. Mereka adalah orang Yahudi Khazraj, yang ingin bergabung dalam peperangan menghadapi kaum musyrik. Baginda SAW bertanya, *“Apakah mereka telah memeluk Islam?”* Dijawab, *“Belum.”* Maka, baginda pun menolak bantuan orang-orang kafir untuk menghadapi kaum musyrik itu.

Ketika tiba di Syaikhan, Nabi SAW menginspeksi pasukannya, dan memulangkan mereka yang dianggap masih terlalu muda, dan belum saatnya berperang. Mereka antara lain, 'Abdullah bin 'Umar, Usamah bin Zaid, Usaid bin Zuhair, Zaid bin Tsabit, Zaid bin Arqam, 'Arabah bin Aus, 'Amr bin Hazm, Abu Sa'id al-Khudri, Zaid bin Haritsah al-Anshari, dan Sa'ad bin Habbah, juga Barra' bin 'Azib. Meski, hadits dalam *Shahih al-Bukhari* menyebutkan, ia ikut dalam Perang Uhud ini.

Adapun Samurah bin Jundub dan Rafi' bin Khadij diizinkan oleh Nabi SAW, meski keduanya masih belia. Karena, Rafi' memiliki keahlian memanah yang luar biasa. Ketika Rafi' diizinkan, Samurah protes, dengan mengatakan, *“Aku lebih kuat ketimbang Rafi', karena aku pernah mengalahkan Rafi'.”* Ketika itu disampaikan kepada Nabi, baginda pun mengizinkan keduanya untuk ikut setelah Nabi menyuruh mereka bergulat di depannya, dan ternyata Samurah berhasil mengalahkan Rafi'.[]



“Pantang bagi seorang Nabi, jika telah mengenakan baju zarrahnya, lalu menanggalkannya kembali, sampai Allah memberi putusan antara dirinya dan musuhnya.” Allahu Akbar.

Nabi SAW tetap teguh memegang keputusan musyawarah, yang diputuskan dengan suara mayoritas itu, dan tak mau membatalkan keputusannya.

jid Nabawi. Baginda menyampaikan nasihat agar tetap bersemangat, dan bekerja keras. Baginda menyampaikan kabar gembira, bahwa mereka akan meraih kemenangan, dengan syarat mau bersabar. Baginda mengingatkan mereka, agar selalu siap menghadapi musuh. Mereka pun menyambut dengan gembira, dan antusias sekali.

Ketika memasuki waktu shalat Ashar, Nabi SAW memimpin shalat jamaah, yang diikuti oleh para sahabat. Mereka berkumpul sejak awal waktu. Seusai shalat, baginda SAW masuk rumah, ditemani dua sahabat

Mereka pun tampak menyesali perbuatan mereka. Ketika Nabi keluar menemui mereka, mereka pun tampak berubah pikiran. Lalu, berkata kepada Rasulullah, *“Ya Rasulullah, kami tidak bermaksud menentang Anda. Lakukanlah apa yang Anda kehendaki. Jika Anda ingin tetap di Madinah, maka lakukanlah!”*

Tetapi, Nabi SAW yang telah memakai baju zarrah itu pun menjawab dengan lantang, *“Pantang bagi seorang Nabi, jika telah mengenakan baju zarrahnya, lalu menanggalkannya kembali, sampai Allah memberi*

**KEBUNTUAN DEMOKRASI TANDA SEMAKIN DEKAT TEGAKNYA ISLAM**

Medan – Sejumlah ustadz, tokoh masyarakat, pengusaha, guru serta mahasiswa dari berbagai daerah dan latar belakang dalam acara *Multaqa Ulama dan Tokoh Medan Perjuangan* menyatakan kebuntuan demokrasi tanda semakin dekat tegaknya Islam, Jumat (19/7).[]

**APEII MENYELENGGARAKAN ISLAMIC ECONOMIC BASIC TRAINING (IEBT)**

Depok – Pengusaha sekitar Jabodetabek mengikuti *Islamic Economic Basic Training (IEBT)* angkatan 1 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Praktisi Ekonomi Islam Indonesia (APEII), pada Sabtu (27/7).[]

**MULTAQA ULAMA ASWAJA CIBINONG, BAHAS KEPEMIMPINAN ISLAM**

Bogor – Sekitar 60 ulama dan tokoh masyarakat Cibinong dan sekitarnya menghadiri *Multaqa Ulama Aswaja Cibinong* untuk membahas masalah kepemimpinan dalam Islam, Ahad (4/8) di Pondok Pesantren Miftahul Khoer, Cibinong, Kabupaten Bogor.[]

**ULAMA ASWAJA BANUA BANJARBARU BAHAS POLITIK ISLAM**

Banjarmasin – Sejumlah ustadz dan tokoh masyarakat dari daerah sekitar Banjarmasin hadir dalam *Forum Tokoh dan Ulama Banua Banjarbaru* membahas politik dalam perspektif Islam, Sabtu (27/7).[]

**MUJAHADAH DAN TABLIGH AKBAR WONOSOBO BAHAS GHAZWUL FIKRI**

Wonosobo – KH Ainul Yaqin, Pengasuh Ma'had Al Ukhawah Al Islamiyah Semarang, membahas masalah *ghazwul fikri* dalam tausiah *Mujahadah dan Tabligh Akbar*, Sabtu (3/8) di TPQ Ikhwanul Mukminin Wonosobo, asuhan Kyai Ibnu Mundzir.[]

**SPIRIT AL MA'UN HARUS DILEMBAGAKAN DALAM PRAKTEK KEHIDUPAN**

Bogor – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan spirit Al-Ma'un harus dilembagakan dalam praktik kehidupan, Selasa (6/8) dalam pengajian Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Leuwiliang, Kabupaten Bogor.[]

**MA'RUF 40 PD PEMUDI PERSIS KABUPATEN BANDUNG**

Bandung – PD Pemudi Persis Kab. Bandung selenggarakan Ma'ruf yang ke-40, Ahad (4/8) di Gedung Bersama PD Persis Kabupaten Bandung, Pameungpeuk.[]

**PELANTIKAN PENGURUS DDII RIAU**

Riau – Pelantikan Pengurus Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia Provinsi Riau periode 2019-2024 di Gedung Aula Kegubernuran Provinsi Riau, Pekanbaru, Jumat (26/7) disaksikan langsung oleh Gubernur Provinsi Riau H Syamsuar dan unsur Muspida Provinsi Riau.[]

Ketika Makkah-Madinah di Bawah Khilafah Utsmaniyah

Dahulu, sebelum menjadi Kerajaan Saudi Arabia, wilayah ini disebut Hijaz. Ketika Khilafah 'Utsmani berkuasa, wilayah ini pun secara otomatis masuk wilayah Khilafah. Dimulai sejak abad ke-10 H, atau 16 M. Sebagaimana tugas dan fungsi Khilafah menjaga tempat suci, dua tanah suci ini pun dijaga dengan baik oleh Khilafah 'Utsmani. Terutama kondisi budaya, sosial dan administrasi.

Pembagian administrasi untuk wilayah Hijaz pada masa awal pemerintahan 'Utsmani ini berbeda dengan wilayah lain. Selain disebut "Wali" (Gubernur), yang diangkat langsung oleh Istanbul (Khalifah), pada mulanya, gubernur Hijaz ini juga disebut *Amiru al-Umara'*. Untuk Amir Madinah al-Munawwarah, yang diangkat oleh Istanbul, disebut *Syeikh al-Haram*. Sedangkan Amir Makkah al-Mukarramah, yang dipilih dari para pemuka (terutama keturunan Nabi), disebut "Syarif Makkah".

Hanya saja, nama sebagiannya berubah di era-era akhir Khilafah 'Utsmani. Untuk Gubernur Hijaz, misalnya, disebut Wali Hijaz. Wilayah Hijaz ini meliputi tiga daerah. *Pertama*, Makkah, yang merupakan ibukota wilayah. *Kedua*, Madinah al-Munawwarah. *Ketiga*, Jeddah. Mulanya, Jeddah ini ditambah Habasyah (Ethiopia) membentuk wilayah sendiri. Wali Jeddah ketika itu merupakan *Syeikh al-Haram* (Madinah).

Khilafah 'Utsmani memberi perhatian besar kepada dua tanah suci ini, dengan memberikan keistimewaan dalam masalah keuangan. *Sharrah Hemayun*, merupakan keistimewaan dalam masalah keuangan bersifat tahunan

untuk penduduk dua tanah suci, para syeikh dan pejabat, dikirim umumnya bersama dengan *Pengurus Sharrah*. Pada waktu yang sama, secara khusus dia mensupervisi kafilah haji Syam. Bersamanya, disertakan berbagai hadiah berharga, khusus untuk para syaikh, amir dan pejabat di dua tanah suci. Disamping Kiswah Ka'bah. Salah satu duplikatnya, kini ada di Masjid Jami' Bursa.



Shurrah Hemayun ini dikirim tahun 1126 H dari Mesir. Setelah itu, pengirimannya dialihkan ke Kas al-Haramain, di Istanbul. Dalam dokumen yang memuat 532 daftar, yang terjadi antara tahun 996 – 1285 H (1559-1868 M), dokumen ini berisi nama-nama mereka yang mendapatkan manfaat dari *Sharrah* ini, berikut jumlah nominal yang didistribusi-

kan kepada mereka.

Di antara bentuk layanan yang diberikan oleh Khilafah 'Utsmani kepada dua tanah suci ini adalah, sejumlah wakaf dalam jumlah yang fantastis untuk kedua tanah suci tersebut, baik yang terletak di Hijaz, maupun di seluruh penjuru Anatolia. Dokumen pemberian (pembagian) dua tanah suci ini secara detail tersimpan di Arsip 'Utsmani, sekaligus menjelaskan posisi wakaf-wakaf, dan investasi bisnis, yang keuntungannya dikembalikan untuk kemaslahatan dua tanah suci.

Karena jumlah wakaf yang diberikan oleh para Sultan 'Utsmani dan keluarganya, dari donasi kalangan pengusaha, maka di Istanbul dibentuklah administrasi khusus untuk mengurus wakaf ini. Di Istanbul dikenal dengan nama, *Khazinah al-Haramain as-Syarifain*. Administrasi ini bertugas untuk memonitor semua properti, tanah pertanian, toko, dan lain-lain yang diwakafkan untuk kedua tanah suci ini. Keuntungannya dikumpulkan, dan dibelanjakan untuk kepentingan kedua tanah suci tersebut.

Selain itu, Khilafah 'Utsmani juga mendirikan Kantor dan Sekolah Wakaf di Hijaz. Mereka juga mengkhususkan gedung-gedung tertentu, termasuk harta tak bergerak lainnya untuk keperluan ini. Tujuannya untuk membayar para pekerja dan guru yang bekerja di sana. Tak hanya itu, para siswanya pun mendapatkan harta yang bisa digunakan untuk membiayai hidupnya, sehingga mereka bisa fokus mencari ilmu. Sekolah dan kantor ini menginduk kepada negara.[]

KRISTOLOGI



Oleh: **Abu Deedat Syihab, MH**, Ketua KDK-MUI Pusat

Siapakah Anak Abraham yang Dikorbankan?

Tiga agama yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam mengakui Abraham/Ibrahim sebagai bapak orang yang beriman. Di dalam Islam, Ibrahim disebut sebagai bapak para Nabi dan dikenal juga sebagai bapak Tauhid (monoteisme).

Kajian kali ini akan melanjutkan pembahasan edisi sebelumnya. Mari kita lihat di dalam kitab mereka bahwa Sarai/Sarah istri Ibrahim melahirkan Ishak, kemudian Ishak mempunyai 2 (dua) anak, yaitu: Esau dan Yakub (Israel). Kemudian Yakub mempunyai empat istri yaitu Lea dan Rachel dari wanita bangsawan kemudian dua orang lagi dari keturunan hamba sahaya yaitu Zilpa dan Bilha. Dari empat istri Yakub/Israel lahirlah 12 anak laki-laki, kedua 12 anak inilah disebut dengan 12 suku Israel atau dikenal dengan sebutan bani Israel. Dari keempat istri, Ya'qub memperanakkan dua belas putra, yakni Rubin, Simeon, Lawwy, Yahudah, Zebulon, Yisakhar, Dan, Gad, Asyer, Naftali, Yusuf dan Bunyamin.

Istri Yakub dari hamba sahaya adalah Zilfa dan Bilha; Dari Zilfa lahir 2 anak yaitu Gad, Asyer, dari Bilha lahir ; Dan, Naftali.

Jadi ada 4 orang anak Yakub dari hamba sahaya. Statusnya sama dengan Ismael dari Hagar sebagai hamba sahayanya Ibrahim.

Bani Israel

Dan mereka (Bani Israel) Kami bagi menjadi dua belas suku yang masing-masingnya berjumlah besar dan Kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu! "Maka memancarlah daripadanya duabelas mata air. Sesungguhnya tiap-tiap suku mengetahui tempat minum masing-masing. QS. Al-A'raf 160

Dua bukti kebohongan dan ketidakjujuran para rahib Yahudi dan pendeta Kristen, terhadap penolakan Ismail as sebagai anak sah Ibrahim sebagai berikut :

1. Alkitab mengakui Ismail sebagai anak sah dari Nabi Ibrahim/Abraham : lihat kitab 1 Tawarikh 1: 28 "*Anak-anak Abraham adalah Ishak dan Ismael*".
2. "*Abraham mencapai umur seratus tujuh puluh lima tahun, lalu ia meninggal.... Dan anak-anaknya, Ishak dan Ismael, menguburkan dia dalam gua Makhpela...*" (Kejadian 25:7-9).

Kedua ayat tersebut mengakui Ismail sebagai anak Abraham yang sah. Sekalipun ayat ini terjadi distorsi karena nama Ishak disebut lebih dulu, baru nama Ismail, yang seharusnya "*anak-anak Abraham adalah Ismail dan Ishak* ", karena Ismail lebih dulu lahir, baru 14 tahun kemudian Ishak lahir.

3. Kalau mereka menolak Ismail, dengan alasan ibunya Ismael yaitu Hagar istri tidak sah, lihat Kitab Kejadian 16 : 3 "*Jadi Sarai, istri Abram itu, mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah sepuluh tahun tinggal di Tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram, suaminya untuk menjadi istrinya.*"

Jadi berdasarkan ayat ini Hagar istri sah Abraham/Ibrahim anak hamba sahaya. Sehingga tidak ada alasan untuk menolak Ismail dengan alasan ibunya hamba sahaya.

4. Tentu konsekuensinya harus menolak anak Yakub dari istrinya yang hamba yaitu Zilfa dan Bilha yang melahirkan 4 orang anak yaitu: Dan, Gad, Asyer, Naftali, ini harus ditolak, sehingga anak Yakub bukan lagi 12 orang melainkan

hanya 8 orang (hanya 8 suku Israel bukan 12 suku Israel).

Berkaitan dengan ibadah kurban, kaum Yahudi sampai hari ini masih menjalankan ibadah kurban bakaran. Kaum Muslimin melaksanakan ibadah kurban binatang ternak. Bagaimana umat kristiani berkaitan dengan ibadah kurban, mereka tidak menjalankan ibadah tersebut. Alasannya kurban binatang itu merupakan bayangan akan adanya kurban yang hakiki yaitu dipanteknya/ dikorbankannya Yesus di tiang salib untuk menebus dosa manusia, maka kami tidak perlu kurban binatang lagi. Tetapi kami mengurbankan Yesus di atas gantungan salib, inilah kurban yang hakiki.

Kesimpulan :

- Berdasarkan Alkitab sendiri membuktikan yang dikurbankan bukanlah Ishak, melainkan Ismael.
- Alkitab/Bible itu telah terjadi tahrif dan manipulasi.
- Kaum kristiani menolak ajaran/syariat kurban binatang ternak, tetapi yang dikurbankan adalah tuhan Yesus sendiri.[]



Oleh: **Prof Dr Ing Fahmi Amhar**

Tengku Munirwan, seorang kepala desa (Keuchik) Meunasah Rayeuk, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara, dipolisikan karena mengembangkan benih padi unggul. Ia menjadi tersangka sebab sebagai Direktur Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) "Nisami", menjual dan menyalurkan produk benih padi IF8 yang belum bersertifikat Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.

MS. Ashmole 1431, fols. 33v-34r

© Bodleian Library, University of Oxford



■ Bagian dari kitab al-Dinawari.

Benih padi yang dikembangkan Munirwan telanjur diminati masyarakat, karena menaikkan produksi antara 50 – 100 persen. Langkah inovasi pertanian ini juga ditiru 23 kelompok tani di Aceh Utara. Dalam even Inovasi Desa tingkat Nasional, padi IF8 meraih juara 2 dari Kementerian Desa. Dari even inilah IF8 dikenal luas, sayangnya belum bersertifikasi.

Kasus hukum Munirwan cepat menimbulkan simpati warga. Sejumlah elemen masyarakat di Aceh berhasil mengumpulkan lebih dari 2.000 lembar KTP sebagai tanda dukungan terhadap Munirwan dan mendesak agar penahanan ditangguhkan.

Kasus ini merupakan contoh disharmoni peraturan dan buruknya komunikasi antar kementerian, khususnya Kementerian Desa dan Kementerian Pertanian.

Sejatinya kewajiban sertifikasi benih padi itu aslinya dibuat untuk melindungi masyarakat dari serbuan benih impor yang tidak jelas kecocokannya dengan iklim dan tanah Indonesia. Jangan sampai benih impor akan menggusur benih lokal yang telah dimulihkan petani kita berpuluh tahun. Jangan sampai pula benih impor itu justru mengundang serbuan hama.

Namun rupanya, UU itu justru memukul para petani inovator anak

bangsa.

Sangat berbeda dengan zaman keemasan Islam. Banyak ilmuwan Muslim di zaman itu menjadi pakar tanaman. Karya-karya mereka tersebar luas, beberapa di antaranya dapat dibaca hingga kini. Mereka mengkaji tanaman-tanaman tertentu, dari mencari benih unggul, hingga tanaman yang berkhasiat obat.

Abu Hanifah Ahmad bin Dawud al

kompilasi botani terbesar selama berabad-abad. Kitab itu memuat sedikitnya 1.400 tanaman yang berbeda, makanan, dan obat, yang 300 di antaranya penemuannya sendiri. Ibnu al-Baitar juga meneliti anatomi hewan dan merupakan bapak ilmu kedokteran hewan, sampai-sampai istilah Arab untuk ilmu ini menggunakan namanya.

Pada era keemasan Islam, tidak ada inovator pemulia tanaman yang perlu khawatir akan dikriminalisasi, selama dia memang bekerja profesional. Khalifah memposisikan negara ada untuk melindungi yang lemah, sampai diberikan haknya yang tertahan orang lain.

Sementara di depan negara, orang-orang kuat adalah lemah, sampai ditunaikan kewajiban mereka pada orang lain.

Tidak seperti sekarang, seolah-olah justru negara di pihak korporasi multi



■ Kitab al-Filaha karya Ibn al-Awwam

nasional yang sangat besar, yang kepentingannya di seluruh dunia dilindungi dengan berbagai istilah sertifikasi.[]



■ Salah satu halaman dari al-Filaha.

Dinawari (828-896M) disebut-sebut sebagai salah satu jenius dari masa keemasan Islam. Dia seorang polymath. Kepakarannya mencakup dari astronomi, biologi, geografi hingga matematika dan sejarah. Namun, dunia modern lebih mengenal namanya dalam ilmu botani.

Buku karyanya, Kitab al-Nabat, menjadi rujukan utama pengembangan botani sejak abad ke-9. Kitab al-Nabat mengulas secara sistematis botani dari sudut pandang seorang filolog (ahli bahasa dan sejarah). Ada 400 jenis tanaman yang dikaji melalui bukunya itu.

Di Andalusia, pada abad-12, Ibn Al-Awwam al Ishbili menulis Kitab al-Filaha yang merupakan sintesa semua ilmu pertanian hingga zamannya, termasuk 585 kultur mikrobiologi, 55 di antaranya tentang pohon buah. Buku ini sangat berpengaruh di Eropa hingga abad-19.

Pada awal abad 13, Abu al-Abbas al-Nabati dari Andalusia mengembangkan metode ilmiah untuk botani, mengantar metode eksperimental dalam menguji, mendeskripsikan, dan mengidentifikasi berbagai materi hidup dan memisahkan laporan observasi yang tidak bisa diverifikasi.

Muridnya Ibnu al-Baitar (wafat 1248) mempublikasikan Kitab al-Jami fi al-Adwiyah al-Mufradah, yang merupakan

Ketika Kyai-Kyai NU Ditangkapi

Dalam keadaan genting, banyak ulama NU dizalimi karena menolak asas tunggal Pancasila.

Era orde baru merupakan masa-masa kelabu bagi umat Islam Indonesia, khususnya kalangan Nahdlatul Ulama (NU). Mereka ditekan, dipaksa agar tunduk dengan kebijakan-kebijakan politik penguasa. Siapa pun yang menentang berarti sama saja melawan, dan mereka pasti di bumi hanguskan.

Yang paling fenomenal saat itu adalah pemaksaan asas tunggal oleh penguasa. Semua kelompok Islam dipaksa untuk menerima satu asas dalam ideologinya, yakni asas Pancasila. Mereka dilarang mengemban ideologi lain yang dianggapnya bertentangan dengan ideologi negara. Mengemban ideologi Islam berarti sama saja melawan asas tunggal negara.

Hebatnya, para ulama, termasuk juga kyai-kyai NU saat itu tidak tunduk begitu saja dengan pemaksaan yang dilakukan rezim Orde Baru. Mereka bersih keras menolak asas tunggal Pancasila yang dipaksakan oleh negara. Bagi mereka, sebagai orang Islam, maka yang boleh dijadikan sebagai asas hidup adalah Islam.

Atas dasar sikapnya itulah kemudian kyai-kyai NU banyak yang ditangkapi. Tak jarang mereka harus bolak-balik datang ke Koramil, guna dimintai keterangan, karena dianggap sebagai penentang ideologi bangsa. Terlebih lagi ketika di musim Pemilu, mereka disisir habis oleh aparat-aparat suruhan penguasa. Rezim saat itu khawatir, jangan sampai kekuasaannya



■ Gus Dur bersalaman dengan Presiden Soeharto

jatuh ke tangan para ulama yang dinilainya anti Pancasila.

NU termasuk kelompok yang paling keras mengkritik semuanya itu, termasuk juga mengkritik berbagai bentuk ketidakadilan yang sedang dipertontonkan. Akibatnya, setiap kali mereka melaksanakan muktamar tidak luput dari yang namanya pantauan penguasa. Kendaraan tempur lapis baja dan panser selalu menyertai setiap kali acara, untuk menakuti-nakuti para ulama, agar tidak mengeluarkan fatwa yang "menyerang" pemerintah.

Orang Kuat NU

Sekitar tahun 1971-1977 di Losarang, Indramayu, Jawa Barat, ada sebuah wilayah yang menjadi basis Partai NU, yang mengalami kekerasan sadis, diteror, dan diintimidasi. Penduduknya mengungsi untuk menyelamatkan diri, sebagian mereka tinggal di kantor PB NU Jalan Kramat Raya 164, Jakarta.

Peristiwa tersebut terungkap dan diangkat di *Harian Sinar Harapan*. Media ini mengirim seorang wartawannya, Panda Nabhaban, untuk meliput Losarang. Nabhaban datang ke sana dengan ditemani KH Yusuf Hasyim dan

Zamroni.

Mereka menyaksikan masjid dibakar dan rumah-rumah dihancurkan. Nabhaban mengatakan, bahwa kemungkinan besar warga NU Losarang meninggalkan rumahnya secara tiba-tiba dan tergesa-gesa, karena dirinya menyaksikan di atas meja makan masih ada piring-piring dan cangkir beserta makanan yang sudah membusuk. Dan setelah kembali ke Jakarta, Nabhaban melaporkan hasil liputannya itu dengan judul "Empatpuluh Lima Djam Bersama Orang Kuat NU".

Di Brebes, Jawa Tengah, ada pembunuhan aktivis NU dan anggota Komisaris PPP KH Hasan Basri, tahun 1977. Ia menjadi salah satu korban kekerasan rezim Orde Baru. Ia tewas oleh sekelompok orang yang tidak dikenal dan mayatnya diceburkan ke dalam sumur.

Di Desa Asembagus, Situbondo, Jawa Timur, terdapat sebuah pesantren besar pimpinan Kyai As'ad Syamsul Arifin yang turut menjadi korban kediktatoran rezim Orba. Kekerasan berupa pembakaran lebih dari 140 rumah milik para kyai dan penduduk menjelang Pemilu 1977.

Kekerasan serupa meluas hampir di seluruh kota-kota basis santri khususnya NU, baik di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Madura, Sulawesi, hingga Lombok, (*Harian Pelita*, edisi 8 Mei 1977).

Terbagi Dua

Dalam keadaan genting, banyak ulama NU dizalimi karena menolak asas tunggal Pancasila. Di awal-awal tahun 1980, guna meredam kezaliman itu, Gus Dur coba memberi pengertian kepada para kyai, agar mereka mau menerima Pancasila. Dari situlah kemudian kyai-kyai NU terbagi ke dalam dua kelompok, ada yang menerima dan ada yang menolak.

Berdasarkan fakta sejarah tersebut, maka dapat disimpulkan, bahwa semua ulama, termasuk kyai-kyai NU dahulu pun menolak Pancasila. Logikanya, jika mereka menerima Pancasila seharusnya mereka tidak menolak ketika Soeharto memaksakan asas tunggal kepada semua ormas Islam. Nyatanya, mereka menolak, dan kemudian mereka dibredel oleh penguasa.

Jika dikatakan bahwa dari awal NU menerima Pancasila, lalu atas dasar apa para ulama dahulu diintimidasi oleh penguasa?

NU pernah menjadi oposisi, ketika penguasa memaksa pada satu pilihan politik, memaksa pada asas tunggal Pancasila. Lalu, adakah saat ini kelompok Islam yang nasibnya serupa dengan NU di masa lalu gara-gara Pancasila? **Irkhama Fahmi al-Anjatani** Pengasuh Ma'had Nurul Falah Cirebon

Perlawanan NU Terhadap Asas Tunggal Pancasila

Perlawanan NU terhadap asas tunggal Pancasila terjadi sangat serius pada Sidang Umum MPR 1978 ketika Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dibicarakan. Sejarawan dan dosen di IAIN Palangka Raya Mohammad Iqbal menuliskannya dalam kolomnya yang berjudul *NU, PPP dan Represi Orde Soeharto pada Islam* di situs *tirto.id* pada 11 Maret 2017.

Menurut Iqbal, perlawanan terjadi lantaran dalam GBHN mengandung dua poin yang sulit diterima kebanyakan umat Muslim Indonesia. *Pertama*, menyebutkan aliran kepercayaan berdampingan dengan agama-agama resmi dan karena itu secara implisit memberikan pengakuan formal kepada aliran kepercayaan sebagai agama tersendiri.

Kedua, usulan program pemerintah untuk melakukan indoktrinasi ideologi negara, Pancasila (menurut penafsiran Orde Baru), secara massal, yang kelak memuncak menjadi keharusan asas tunggal Pancasila.

Kyai Bisri Syansuri, tokoh penting NU, memandangnya sebagai ancaman terhadap status Islam sebagai agama dan memprotesnya dengan keras. Ketika dilangsungkan *voting* atas pasal itu, para anggota NU yang diikuti kelompok PPP lain secara demonstratif meninggalkan tempat sidang (*walk out*).

Iqbal juga menyebutkan mediasi antara Islam dan Pancasila di kalangan NU dimulai oleh, salah satunya, KH As'ad Syamsul Arifin --

itu pun setelah memasuki dekade 1980an. Puncaknya terjadi pada Muktamar NU ke-27 di Situbondo pada 1984. Di sanalah NU secara resmi mendukung Pancasila sebagai prinsip dasar kebangsaan.

Selain NU, lanjut Iqbal, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sendiri menerima asas tunggal Pancasila dengan sikap setengah terpaksa -- sebagaimana kebanyakan organisasi Islam. Di internal HMI sendiri terjadi perdebatan yang bahkan harus dibayar dengan pecahnya organisasi ini. Kelompok HMI yang menolak asas tunggal itu lalu membentuk HMI tandingan yang dikenal sebagai HMI Majelis Penyelamat Organisasi (MPO).

Menurut Fikrul Hanif Sufyan, di jajaran para penolak ada pula Pelajar Islam Indonesia (PII) dan tokoh-tokoh Islam macam Deliar Noer, AM Fatwa, dan Sjafrudin Prawiranegara sang ketua PDRI. PII harus mengalami hal pahit. "Mereka harus membubarkan diri sebab pada kongres tahun 1985 yang tidak mendapat izin pemerintah [...] pada 17 April 1987 PII akhirnya membubarkan diri."

Jika harus dirunut, represi melalui asas tunggal inilah yang justru memicu perlawanan dari umat Islam, baik perlawanan aktif seperti dalam Tragedi Priok (1984) maupun perlawanan pasif (dengan menyingkir dan membangun kampung sendiri) seperti yang dilakukan Warsidi di Talangsari hingga terjadi Tragedi Talangsari (1989). **joy**



Membaca Kemerdekaan Secara Radikal

Oleh: Dr M Kusman Sadik

Peringatan hari kemerdekaan biasanya selalu semarak dengan berbagai macam perayaan. Padahal jika kemerdekaan negeri ini dibaca sedikit 'radikal' maka mestinya yang muncul justru rasa keprihatinan. Sebab meski kemerdekaan secara fisik telah diraih sejak 74 tahun lalu, namun penjajahan non-fisik tetap menjerat negeri ini.

Salah satu fakta penjajahan non-fisik itu adalah jeratan utang yang terus menggunung. Sementara utang sendiri laksana kanker yang dapat menggerogoti daya tahan suatu negara. Apalagi jika utang tersebut disertai riba, yang Alquran menggambarkan seperti orang mabuk yang sempoyongan akibat jeratan riba tersebut.

Ada sejumlah fakta yang perlu menjadi perhatian. *Pertama*, Indonesia terbelit utang yang makin parah sejak 2015 hingga saat ini. Pada 2015 utang luar negeri Indonesia sudah

mencapai Rp 3.165,1 triliun. Kini, sesuai data yang dirilis Bank Indonesia (BI), utang luar negeri Indonesia pada akhir Mei 2019 telah mencapai US\$ 368,1 miliar atau sekitar Rp 5.153 triliun (Kurs Jisdor akhir Mei Rp 14.313 ribu per dolar AS).

Utang tersebut sudah jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai pendapatan negara. Itu seperti dalam peribahasa, lebih besar pasak daripada tiang. Seperti yang dirilis Kementerian Keuangan, pada postur APBN 2019 pendapatan negara diproyeksikan sebesar Rp 2.165,1 triliun. Artinya nilai utang negara saat ini sudah setara dengan 238 persen nilai pendapatan negara.

Kedua, penambahan utang tersebut sebenarnya merupakan konsekuensi dari kebijakan pemerintah sendiri. Sebab sebagaimana diketahui utang tersebut digunakan untuk mengejar pembangunan infrastruktur yang menjadi target utama pembangunan pemerintah. Mungkin saja pembangunan infrastruktur

itu dipilih sebagai prioritas karena termasuk hal yang mudah dilihat fisiknya. Sehingga diharapkan mampu menggambarkan keberhasilan pembangunan. Padahal itu jelas menyimpan masalah besar karena pembiayaannya berasal dari utang.

Apalagi dalam jangka pendek hingga jangka menengah, pembangunan infrastruktur itu tidak akan banyak berpengaruh pada sektor pertanian, perikanan, dan industri kecil. Sementara sektor tersebut merupakan bagian fundamental ekonomi Indonesia. Karena sebagian besar perekonomian rakyat bergerak di sektor itu. Hanya sektor yang secara langsung terkait dengan pembangunan infrastruktur saja yang meraup untung. Seperti sektor industri semen, besi, baja, dan sejenisnya yang umumnya dimiliki oleh para elite pengusaha kakap dan mafia importir.

Ketiga, utang merupakan instrumen penjajahan secara ekonomi dan politik terhadap suatu negara. Bukan rahasia lagi

bahwa IMF, World Bank, dan lembaga keuangan dunia lainnya telah menjerat negara-negara ketiga dengan jebakan utang. Akibatnya negara yang terjerat utang tersebut menjadi mudah didikte untuk menjalankan kebijakan ekonomi dan politiknya sesuai kepentingan penjajah.

Gary Allen, seorang jurnalis konservatif Amerika, dalam bukunya *"None Dare Call It Conspiracy"* (Edisi 2013) memaparkan tentang konspirasi internasional melalui jeratan utang. Salah satunya Allen mengutip pernyataan Profesor Carroll Quigley dari Harvard University terkait konspirasi tersebut. Quigley mengatakan bahwa lembaga-lembaga keuangan internasional ditujukan untuk menciptakan sistem kontrol keuangan dunia yang mampu mendominasi sistem politik tiap negara dan menguasai ekonomi dunia secara keseluruhan.

Karenanya kebijakan pembangunan yang berbasis utang yang terjadi di negeri ini tentu

menjadi paradoks ketika dikaitkan dengan upaya menyejahterakan rakyat. Karena sejatinya utang itu adalah instrumen penjajahan secara ekonomi dan politik. Fatalnya lagi, saat utang terus menumpuk untuk infrastruktur, sektor fundamental ekonomi rakyat seperti pertanian dan kelautan justru terabaikan. Sementara kekayaan migas dan tambang lainnya berada di tangan asing.

Secara faktual mazhab neo-liberalisme telah menjadi dasar kebijakan ekonomi di negeri ini. Sebuah kebijakan yang lebih pro-pasar dan pro-kapitalis ketimbang pro-rakyat. Utang hanya memperkuat negara-negara kapitalis pemberi utang, sementara negara pengutang akan dijera dan dijajah. Di belahan dunia manapun, neo-liberalisme memang tidak pernah menghasilkan apapun selain keterjeratan negara yang bermuara pada kesengsaraan rakyatnya.[]

MEDIA GAUL



2,3 Juta Pelajar Indonesia dalam Jeratan Narkotika; Bagaimana Solusi Islam?

Oleh Ihsan Tampubolon, Aktivis Dakwah dan Youtuber Ideologis

Yups. Sebanyak 2,3 juta pelajar dan mahasiswa (3,2 persen populasi kelompok) di Indonesia dilaporkan pernah mengonsumsi narkotika berdasarkan survei Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Pak Wapres Jusuf Kalla menyebut data ini dalam acara Puncak Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional di Jakarta pada 26 Juni lalu.

Ngeri? Pasti. Siapa orang tua yang tak sesak dadanya membayangkan anak yang ia rawat sejak bayi, ia sekolahkan baik-baik agar menjadi generasi penerus bangsa, justru terjerumus pada barang haram yang dapat menghancurkan masa depannya berkeping-keping.

Pada diprediksi pada 2025-2035 mendatang, Indonesia akan memasuki yang namanya *demographic bonus* alias kelompok usia produktif jauh lebih banyak dibandingkan dengan orang tua dan anak-anak. Remaja dan mahasiswa sendiri (18-25) merupakan bagian besar dari kelompok usia produktif itu. Ke arah mana negeri ini akan dibawa oleh generasi muda yang hilang akal karena narkotika?

Jenis-jenis narkotika yang tersebar di kalangan remaja, atau di Indonesia pada umumnya sendiri sangat beragam. Mulai dari heroin, opium, kokain, LSD, *amph-*

tamine, MDMA (ekstasi), *ketamine*, hingga ganja masuk ke nadi remaja-remaja harapan bangsa. Tak ada uang? Kreativitas remaja Indonesia bekerja dengan menjadikan *paint thinner* dan lem sepatu sebagai "kendaraan terbang" ke langit, baik sementara maupun selamanya.

Lalu, bagaimana Islam mengatasi permasalahan narkotika di kalangan remaja khususnya, dan masyarakat pada umumnya?

Pertama, Islam mengharamkan narkotika. Ibnu Taimiyah *rahimahullah* dalam *Majmu' al-Fatawa* berkata, "Narkotika sama halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal, haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan"

Kedua, Islam melarang semua bentuk produksi dan menjaga ketat penyelundupan narkotika ke dalam negeri. Slogan "Prestasi Yes, Narkotika No" omong kosong jika narkotika bisa masuk dengan lenggang melalui penyelundupan lewat celana jin, ember cat, hingga tiang pancang proyek infrastruktur. 40 kilogram sabu.

Apapun motif penyelundupan narkotika, baik bisnis maupun politis, Islam akan memperketat penjagaan dan prosedur masuk barang apalagi dari negeri-negeri kafur. Bahkan, pada negara kafir harbi tidak ada hubungan apa

pun kecuali hubungan jihad saja.

Di dalam negeri, Islam akan menyapu bersih setiap sentimeter negeri untuk memastikan tidak ada produksi barang haram dalam bentuk apa pun.

Ketiga, Islam akan menyibukkan para remaja khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam ketaatan pada Allah SWT semata serta mengembangkan karya-karya inovatif untuk kemajuan negeri. Pernah enggak kamu berpikir bagaimana Imam Syafii bisa memiliki otoritas keilmuan sederajat profesor pada usia 18 tahun? Begitu pula pada Jabir Ibnu Hayyan dengan jarak usia yang terpaut tidak terlalu jauh. Sungguh berbeda dengan pelajar kita yang usia segitu sibuk nonton film *Dua Garis Biru*.

Semua itu karena Islam akan memosisikan diri kita hanyalah sebagai *'abdullah* atau hamba Allah, yang tujuan hidup kita terpatir dalam firman-Nya yang artinya:

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku." (QS Adz-Dzariyat: 56).

Dengan menanamkan tujuan hidup ini, kita akan menjaga diri kita dari hal-hal yang haram dan fokus untuk menghasilkan kebaikan-kebaikan yang akan menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat.[]

Regulasi Ilahi Peduli Laktasi

Semangat donor ASI, akan merusak nasab dan garis mahram jika serampangan diserahkan layaknya transaksi susu formula



Awal Agustus adalah Pekan ASI Sedunia. Peringatan ke 29 tahun sejak Deklarasi Innocenti yang ditandatangani Agustus 1990 untuk melindungi, mempromosikan, dan mendukung ibu menyusui.

WHO bekerja sama dengan UNICEF mempromosikan kebijakan yang ramah keluarga, sehingga memudahkan pemberian ASI. Mendorong orang tua mengasuh dan menjalin ikatan dengan anak di awal kehidupannya.

Disorot juga, masih adanya ibu pekerja yang cuti melahirkan tapi tidak digaji. Itu sebabnya mereka juga menyerukan regulasi soal cuti melahirkan berbayar, minimal 18 minggu bagi ibu. Selain itu, cuti bagi ayah untuk mendorong tanggung jawab merawat anak berdasarkan asas kesetaraan seperti dilansir laman resmi WHO, Kamis (1/8/2019).

Tak hanya itu, WHO dan UNICEF juga mendukung adanya tempat kerja ramah laktasi. Sehingga para ibu bekerja bisa memompa ASI dengan nyaman.

Anugerah Ilahi

ASI tak diragukan lagi sebagai anugerah Allah SWT yang tak tertandingi. Data menyebut, pemberian ASI menyelamatkan lebih dari 800.000 jiwa anak setiap tahun. Menyusui juga menyelamatkan nyawa kaum ibu. Menurunkan risiko kanker payudara, kanker ovarium, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Mencegah 20.000 kematian ibu setiap tahun akibat kanker payudara (*liputan6.com*).

WHO merekomendasikan pemberian ASI eksklusif dimulai dari satu jam setelah bayi lahir hingga berusia 6 bulan. Lanjut hingga anak berusia sekitar dua tahun. Tentu saja, niat memerhatikan masalah ASI ini baik. Hanya, harus didasarkan pada syariat Islam. Jika tidak, perhatiannya hanya akan setengah hati. Atau, menimbulkan masalah-masalah baru.

Misal, ketika menggencarkan ASI bagi ibu pekerja, jangan malah berdampak pada berbondong-bondongnya kaum perempuan bekerja. Merasa nyaman dan tidak merasa berdosa meninggalkan bayi-bayi mereka. Padahal, sekalipun isinya ASI, penggantian puting susu ke botol tidak mampu membangun *bonding* (ikatan) antara ibu dan anak. Akibatnya, anak tetap haus kasih sayang.

Demikian pula semangat donor ASI, akan merusak nasab dan garis mahram jika serampangan diserahkan layaknya transaksi susu formula. Ini jelas menimbulkan perkara pelik jika tidak diatur syariah. Sebab, donor ASI dibolehkan dalam Islam melalui jalur penyusuan konvensional. Artinya, tidak dengan mengumpulkan di bank ASI sehingga penyusuan cukup dengan botol. Dan, tidak jelas ibu siapa menyusui bayi siapa. ASI ibu Muslim atau nonmuslim.

Motivasi Ruhiyah

Jauh sebelum WHO dan UNICEF, Islam mensyariatkan menyusui sejak zaman Kanjeng Nabi SAW. "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan." (QS al-Baqarah [2]: 233).

Menyusui tidak wajib, tapi sunah. Sebab, realitasnya memang tak semua ibu mampu memproduksi ASI. Lamanya tidak harus dua tahun, tapi sangat dianjurkan. "Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya." (QS Al-Baqarah [2]: 233).

Betapa besar pahala ibu menyusui, hingga kaum ibu melakukannya dengan dorongan tawakal. "Jika ia telah melahirkan anak dan menyusuinya, maka tak ada setetes pun air susu yang diisap oleh anaknya kecuali ia akan menjadi cahaya yang memancar di hadapannya kelak di hari kiamat, yang menakjubkan setiap orang yang melihatnya dari umat

terdahulu hingga yang belakangan. Selain itu ia dicatat sebagai seorang yang berpuasa, dan sekiranya puasa itu tanpa berbuka niscaya pahalanya dicatat seperti pahala puasa dan *qiyamul layl* sepanjang masa. Ketika ia menyapih anaknya Allah Yang Maha Agung sebutan-Nya berfirman: 'Wahai perempuan, Aku telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu, maka perbaruilah amalmu.'" (Mustadrak Al-Wasail 2: bab 47, hlm 623).

Sebaliknya, kaum ibu yang enggan menyusui anaknya karena alasan yang tidak *syar'i*, bisa-bisa terancam azab. Seperti ibu-ibu yang membuang bayinya. Menelantarkan dan meninggalkannya begitu saja. Atau ibu-ibu yang khawatir kecantikan dan kekencangan tubuhnya pudar. Rasulullah SAW dalam HR Ibnu Hibban bersabda:

"Kemudian Malaikat itu mengajakku melanjutkan perjalanan, tiba-tiba aku melihat beberapa wanita yang payudaranya dicabik-cabik ular yang ganas. Aku bertanya: 'Mengapa mereka?' Malaikat itu menjawab: 'Mereka adalah para wanita yang tidak mau menyusui anak-anaknya (tanpa alasan *syar'i*).'" *Na'udzubillah*.

Kaum ibu yang bertakwa tentu dengan ridha memberi ASI pada anak-anaknya. Sebagai pondasi bagi kehidupannya.

Perhatian Hakiki

ASI adalah anugerah Ilahi. Regulasinya jangan sampai melanggar aturan Sang Pencipta ASI. Bagaimana perhatian terhadap ibu dan ayah agar keluarga ramah ASI?

Pertama, gencarkan edukasi terhadap ibu/calon ibu dan suaminya. Selama ini, ada elemen ibu tertentu yang merasa lebih gengsi dengan susu sapi. Atau, saking rendahnya pendidikan tak paham bahwa ASI lebih baik dari susu formula.

Bisa melalui pemberdayaan tenaga medis, training pranikah atau parenting,

kajian-kajian dan saluran informasi resmi. Masukkan dalam kurikulum pendidikan agama, yakni bab Nizhom Ijtima'i. Jangan anak didik digenot pendidikan seks atau reproduksi ala Barat yang tidak berfaedah, tapi alpha edukasi laktasi.

Kedua, perketat peredaran susu formula dengan iklan-iklan yang menyesatkan. Termasuk, berantas kongkalikong antara produsen susu dan tenaga medis yang sengaja mengedukasi ibu-ibu agar memberikan susu formula dengan berbagai dalih.

Ketiga, sediakan fasilitas menyusui di tempat-tempat umum yang memadai.

Nasib Ibu Pekerja

Anjuran memberi ASI juga berlaku bagi ibu pekerja. Ada beberapa pilihan regulasi yang ramah ibu: (1). didorong untuk *resign* dengan tawaran gaji berlipat dialihkan ke suaminya. Artinya, suami dinaikkan gaji asal istri fokus menyusui dan mendidik anak. (2) cuti panjang selama dua tahun dengan atau tanpa gaji sesuai kesepakatan dengan perusahaan. Namun sesudah dua tahun bisa diterima kembali bekerja jika menghendaki. Hal ini agar tidak menzalimi perusahaan tempat bekerja, tetapi juga masih memberi kesempatan pada kiprah wanita.

Mengapa regulasi ini harus ada? Sebab hukum ibu bekerja adalah mubah. Umat tetap membutuhkan tenaga kerja wanita. Misal di bidang pendidikan, kesehatan, *fashion* dan administrasi. Selama ini, para wanita meninggalkan proses laktasi karena aturan ketat soal jam kerja dalam sistem ekonomi kapitalis. Tidak fleksibel dan ramah ibu.

Jadi, jika cita-citanya benar-benar peduli pada ibu dan generasi, ganti sistem kapitalis dengan sistem Islam. Niscaya urusan ASI lancar tak hanya sepekan, tapi setiap hari sepanjang dua tahun kehidupan pertama anak.[] **kholda najiyah**

Kemerdekaan Hakiki Keluarga Muslim

Seorang selebgram dikabarkan murtad. Padahal sebelumnya berhijab. Kok bisa? Apakah tidak ada nasihat dari kedua orang tuanya yang notabene Muslim untuk mempertahankan akidahnya?

Demikianlah, keluarga Indonesia saat ini banyak yang meniru potret keluarga liberal. Dengan dalih hak asasi anak, orang tua membiarkan anaknya berperilaku di luar Islam.

Bahkan tak sedikit keluarga yang fobia Islam alias takut dengan ajaran Islam sendiri.

Tidak merdeka dalam menjalankan rumah tangga berdasar syariat karena *saking* tidak pahamnya Islam. Terpengaruh dengan model keluarga liberal. Bagaimana gambaran ideal keluarga Muslim yang merdeka?

1. Merdeka dari pendangkalan akidah

Keluarga menjadi benteng utama bagi seluruh anggotanya dalam menjaga keimanan. Jangan sampai ada anggota keluarga yang menyimpang dari penghambaan kepada Allah SWT. Keluarga selalu mengingatkan agar beribadah dan taat syariat. Keluarga mengajak anggotanya ke surga, bukan membiarkan atau bahkan menjerumuskan ke neraka.

2. Merdeka dari racun-racun sekularisme, pluralisme dan liberalisme

Keluarga Muslim memiliki pola pikir khas Islam. Tidak mendukung konsep sekularisme, pluralisme dan liberalisme (sipilis). Keluarga Muslim rajin mengikuti kajian Islam, bukan menghadiri kajian sipilis. Sebaliknya justru



waspada terhadap penyebaran virus sipilis yang merusak pola pikir Islam.

Ajaran sipilis itu radikal karena menjauhkan keluarga Muslim dari ajaran Islam. Meracuni kaum Muslim untuk tidak terikat pada syariat Islam dengan dalih kebebasan. Membelokkan identitas Muslim dari kaffah menjadi moderat.

3. Merdeka dari gaya hidup hedonis

Keluarga Muslim tidak ikut-ikutan terjebak gaya hidup hedon. Tidak mengutamakan penampilan, tapi pemikiran. Tidak mengutamakan produk *branded*, kemewahan, berfoya-foya dan bersenang-senang. Keluarga Muslim tidak ikut arus pencitraan. Tidak tergoda mempermak penampilan sampai-sampai mengubah ciptaan-Nya. Seperti halnya para wanita masa kini yang sibuk mempercantik wajah, memutihkan kulit atau memperlentik bulu mata.

4. Merdeka finansial

Keluarga Muslim merdeka finansial, dalam arti memiliki sumber penghasilan yang bisa diandalkan dan yakin dengan rezeki Allah SWT. Karena itu ia tidak menghalalkan segala cara. Keluarga Muslim bebas dari uang haram, seperti hasil korupsi atau riba. Keluarga Muslim juga bebas utang-utang yang bisa mencekik leher jika tak mampu mengembalikan. Keluarga Muslim bebas dari transaksi tidak *syar'i*, seperti asuransi, kartu kredit dsb.

5. Merdeka dari keputusan-asaan

Keluarga Muslim bersikap qanaah dan menerima keputusan Allah SWT. Tahan banting. Tidak mudah putus asa dari rahmat Allah SWT. Keluarga Muslim berusaha keras mempertahankan keharmonisan dan keutuhan rumah tangga. Tidak mudah berucap pisah.

6. Merdeka dari penyimpangan pernikahan

Keluarga Muslim tidak kenal perselingkuhan, pelakor, pebinor (berebut bini orang) dan poliandri. Keluarga Muslim bebas dari kekerasan dalam rumah tangga atau pernikahan sejenis. Keluarga Muslim merdeka dari penyakit menular seksual, HIV, narkoba dan jerat maksiat lainnya.

Demikianlah, saatnya keluarga Muslim kembali pada identitas sejatinya. Keluarga Muslim kaffah, merdeka dari pengaruh buruk pemikiran sekuler dan liberal yang berasal dari luar Islam.[] **kholda**



Membuat Aturan Bersama dengan Anak

KONSULTASI

Diasuh oleh:
Dra (Psi) Zulia Ilmawati

Assalaamu'alaikum Wr Wb.

Saya seorang ibu rumah tangga, memiliki anak laki-laki yang mulai menginjak usia remaja. Saya agak kesulitan memberikan pengarahan kepadanya. Aturan bersama yang kami buat dia sepakati, tapi juga sering kali dilanggarnya. Kalau saya sudah mulai kesal dan pusing menghadapinya, saya membiarkan saja apa maunya anak. Seperti apa sebetulnya saat kita membuat peraturan bersama dengan anak. Mohon masukannya. Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr Wb.

IW-Bogor

Wa'alaikumsalam Wr Wb.

Ibu IW yang baik,

Ketidakpatuhan terhadap aturan (pembangkangan) biasanya mencapai puncaknya ketika anak memasuki usia 2 tahun. Setelah itu akan berkurang, dan muncul lagi saat anak memasuki usia remaja. Ketidakpatuhan harus dilihat sebagai ekspresi yang sehat dari perkembangan "akunya", keinginan untuk mengatur diri sendiri. Jangan menganggap penolakan anak sebagai tanda ketidakmampuan orang tua, atau kesengajaan ingin membuat orang tua marah. Ada beberapa macam jenis ketidakpatuhan, di antaranya dapat berupa perlawanan pasif, seperti anak menunda untuk menurut, mencibir, cemberut (diam dan menghindari), atau merengek. Adakalanya melakukan pembangkangan te-

rang-terangan, dengan melakukan tindak agresif secara verbal atau melontarkan makian.

Ibu IW yang baik,

Ada banyak sebab kenapa anak melakukan pembangkangan terhadap orang tua. Lemahnya aturan yang dibuat, atau orang tua yang tidak dapat berkata "tidak" pada anak. Disiplin yang terlalu keras dan kaku, kritik yang berlebihan, sering mengomel juga bisa menjadi sebab. Aturan yang tidak dijalankan dengan konsisten. Atau, bisa jadi orang tua sedang dalam keadaan tertekan. Bisa juga karena karakter anak, anak sakit, lelah, lapar atau ada gangguan emosi. Coba cari tahu apa yang menyebabkan Anda sering melanggar aturan yang sudah dibuat.

Ibu IW yang baik,

Mempunyai anak yang patuh tentunya sangat menyenangkan. Pererat hubungan dengan anak, tempatkan diri sebagai sahabat untuknya. Jika orang tua dan anak semakin saling menyukai, penerimaan bimbingan orang tua semakin baik. Bukankah kalau berteman kita selalu berusaha untuk menyenangkan teman tersebut? Sisihkan waktu khusus setiap hari untuk anak, dengan bermain dan berbagi cerita dengannya. Orang tua juga mesti peka. Semakin tanggap terhadap kebutuhan anak, kita akan semakin dapat berharap, anak akan patuh terhadap harapan dan perintah kita. Kepatuhan akan

muncul pada anak yang memiliki orang tua yang mau mendengarkan sinyal-sinyal yang diberikan, dan dapat melihat masalah dari sudut pandang anak. Orang tua yang kurang peka, adalah orang tua yang hanya memperhatikan harapan-harapannya sendiri, suasana hatinya, dan kegiatannya sendiri, akan membentuk anak menjadi seorang yang sulit tanggap terhadap perintah orang tuanya.

Ibu IW yang baik,

Terkait dengan membuat aturan, ada beberapa hal yang musti diperhatikan. Anda adalah sosok yang paling mengetahui karakter, tingkat kematangan dan kondisi Anda. Ada peraturan umum yang harus dipatuhi oleh anak-anak seusianya, tetapi Anda juga mesti memperhatikan kondisi khas yang ada pada Anda. Pastikan bahwa Anda tahu secara tepat apa yang harus dilakukan dan kapan harus melakukan (ada batas waktu). Kita sering kali hanya meminta anak "bersihkan kamarmu". Sebaiknya katakan, "Gantungkan pakaian di kamar, bersihkan tempat tidur dan bereskan mainanmu sekarang".

Ibu IW yang baik

Kemukakan alasan saat Anda memberikan aturan, maka Anda akan lebih siap untuk mematuhi, dan tunjukkan bahwa Anda sangat mengharapkan kepatuhannya. Buatlah beberapa tuntutan baru bila dibutuhkan, tetapi pastikan bahwa tuntutan ini

akan dipatuhi. Lebih baik memberi aturan yang dapat diingat dan dilakukan sepenuhnya daripada membuat banyak aturan yang hanya dijalankan setengah-setengah. Jalankan dengan konsisten. Seringkali kita menyusun banyak aturan dan tidak menjalankannya secara konsisten. Semakin banyak aturan yang dibuat, semakin banyak pembangkangan yang akan kita dapatkan dari anak. Dalam menyampaikan aturan, perhatikan intonasi, cara dan kata-kata yang digunakan agar Anda yakin bahwa aturan ini memang harus dipatuhi.

Ibu IW yang baik,

Akhirnya, peraturan apa pun yang dibuat, harus dijalankan dengan konsisten. Sekali atau dua kali anak melanggar, katakan padanya bahwa mereka telah melanggar peraturan. Jangan menerima alasan atau mengizinkan anak untuk membengkokkan aturan. Gunakan hukuman yang masuk akal dan sesuai dengan kesalahan. Kurangi hak istimewanya apabila Anda melanggar aturan. Misalnya, tidak boleh bermain bila terlambat tidur, harus diam di dalam rumah jika tidak melakukan shalat di masjid dan sebagainya. Hindari hukuman kasar, baik fisik ataupun verbal. Semoga Anda tumbuh menjadi anak remaja yang shalih dan bertanggungjawab. Aamiin.[]

Hukum Patungan Kurban Sapi Kurang dari Tujuh Orang

Diasuh Oleh: **Ustadz M Shiddiq Al Jawi**



Tanya:

Ustadz, bolehkah patungan kurban sapi oleh sejumlah orang yang jumlahnya kurang dari tujuh orang? (Deden Bambang, Bandung)

Jawab:

Boleh hukumnya patungan untuk menyembelih satu ekor sapi atau unta oleh kurang dari tujuh orang, misalnya oleh empat atau lima orang. Hal itu karena *syara'* telah membolehkan patungan untuk satu ekor sapi atau unta oleh tujuh orang, sehingga masing-masing orang membayar sepertujuh harga sapi. Jika membayar sepertujuh boleh, berarti membayar lebih besar dari sepertujuh hukumnya lebih boleh lagi.

Imam Al Kasani dari mazhab Hanafi dalam masalah ini berkata, "Tidak ada keraguan mengenai bolehnya unta atau sapi oleh kurang dari tujuh orang." (*wa laa syakka fii jawaazi badanatin aw baqaratin 'an aqalla min sab'atin*). (Imam Al Kasani, *Badaa'i' Ash Shanaa'i fii Tartiib Asy Syaraa'i*, Juz V,

hlm. 71).

Imam Al Kasani selanjutnya memberikan contohnya dan alasan kebolehan, "Misalnya ada dua orang, atau tiga orang, atau empat orang, atau lima orang, atau enam orang yang patungan untuk satu ekor unta atau satu ekor sapi. [Itu boleh] karena ketika boleh hukumnya satu orang membayar sepertujuh, maka membayar lebih banyak dari sepertujuh berarti lebih utama, sama saja apakah bagian untuk masing-masingnya sama atau berbeda, misalnya untuk satu orang dari mereka mendapat setengah, untuk yang lainnya sepertiga, dan untuk yang lainnya lagi seperenam, setelah semuanya patungan tidak kurang dari sepertujuh." (Imam Al Kasani, *Badaa'i' Ash Shanaa'i fii Tartiib Asy Syaraa'i*, Juz V, hlm. 71).

Imam Syafi'i mempunyai pendapat yang sama, beliau berkata, "Jika mereka itu jumlahnya kurang dari tujuh orang, maka itu mencukupi untuk mereka, sedang mereka itu sukarela membayar lebih, sebagaimana mencukupi berkurban satu ekor unta dari seseorang yang seharusnya cukup berkurban satu kambing, lalu dia secara sukarela berkurban unta yang harganya lebih dari satu ekor kambing." (*wa in kaanuu aqalla min sab'atin ajza'athum, wa hum mutathawwi'uuna bil-fadhli, kamaa tujzi'u al jazuura [al ba'iira] 'an man lazimathu syaatun, wa yakuuna mutathawwi'an bi-fadhlihaa 'an asy syaath*). (Imam Syafi'i, *Al Umm*, Juz II, hlm. 244).

Sesungguhnya dalil kebolehan tetap mengacu pada hadits shahih dari Nabi SAW yang membolehkan

patungan oleh tujuh orang untuk berkurban sapi atau unta, yaitu hadits Jabir bin Abdillah ra, bahwa dia berkata, "Kami telah menyembelih bersama Rasulullah SAW pada masa Perjanjian Hudaibiyyah seekor unta dari tujuh orang, dan seekor sapi dari tujuh orang." (HR Muslim, no. 1318).

Hanya saja, penarikan kesimpulan hukumnya tidak terbatas pada makna yang tersurat (*manthuuq*) dalam hadits di atas, melainkan dari makna yang tersirat (*mafhuum*), yaitu *mafhuum muwaafaqah* yang berarti menarik kesimpulan hukum yang masih sejalan dengan makna yang tersurat (*manthuuq*), dalam kadar atau ukuran yang lebih besar. Jadi jika seekor sapi boleh patungan oleh tujuh orang, sehingga satu orang menanggung sepertujuh harga sapi, maka kalau patungannya oleh kurang dari tujuh, lebih boleh lagi, karena berarti yang ditanggungnya lebih besar dari sepertujuh harga sapi.

Bolehkah patungan lebih dari tujuh orang? Ada rincian sebagai berikut; (1) jika untuk sembelihan Idul Adha [*udh-hiyah*] boleh patungan hingga sepuluh orang, berdasarkan hadits bahwa Nabi SAW membolehkan patungan unta oleh sepuluh orang. (HR Ahmad, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Khuzaimah, dari Ibnu Abbas ra, hadits shahih); (2) jika untuk sembelihan *hadyu* di Tanah Haram (Mekkah), tidak boleh patungan lebih dari tujuh orang. (HR Muslim, dari Jabir RA). (Husamuddin 'Ifanah, *Al Mufashshal fii Ahkaam Al Udh-hiyyah*, hlm. 87; Imam Syaukani, *Nailul Authar*, hlm. 1001). Wallahu 'alam.[]

Di tengah-tengah kehidupan sekuler saat ini, media informasi begitu dikuasai oleh kalangan kapitalis dan liberal yang opininya selalu menyudutkan perjuangan Islam.

Sudah sangat jarang kita temukan media informasi yang teguh dan konsisten memperjuangkan keadilan, peduli dengan problematika dan membela kepentingan umat.

Kini **Media Umat** terus hadir untuk teguh dan konsisten memperjuangkan kehidupan Islam dan melawan opini negatif terhadap perjuangan Islam.

Untuk meningkatkan kekuatan **Media Umat** sudah pasti membutuhkan dukungan umat.

Dukungan tersebut dapat dilakukan dalam bentuk berlangganan, mengajak atau berdonasi untuk orang lain agar memiliki dan membaca **Media Umat**, jangan sampai media ini hanya berhenti ditangan Anda.

Bagi Anda yang ingin berlangganan untuk diri dan orang lain silakan isi formulir di samping.

Kirim ke Agen daerah kami atau SMS berlangganan ke:

0857 1104 4000

FORMULIR BERLANGGANAN

Bismillah...

Saya ingin berlangganan

MediaUmat
mediaumat.news Memberi Makan Kehidupan Islam

**TERBIT
1 BULAN
2 KALI**

Nama Pelanggan :

Alamat Pengiriman 1 :

Alamat Pengiriman 2 :

Telpon/ No. Hp-WA :

Jumlah Langganan : eksemplar

Dikirim Mulai edisi :

Sistem Pembayaran :



Harga : Jawa Rp 8.000/eks
Luar Jawa Rp 11.000/eks



Oleh: **Abu Inas**, Pembina Tabayyun Center

Khilafah atau Negara Bangsa?

su khilafah hari ini menjadi menu utama dalam berbagai obrolan politik di masyarakat. Tak luput, para pengemban dakwah terlibat aktif dalam perbincangan ini. Pada saat menjelaskan konsep khilafah kepada kaum Muslim serta memahami mereka kepadanya, maka bersamaan dengan itu jiwa para pengemban dakwah harus diisi dengan perasaan Islam yang mendorongnya untuk beramal, sabar, serta rela berkorban untuk terus berjuang demi menegakkannya.

Ada perbedaan yang tajam antara khilafah dan negara bangsa. Dari segi dasar negara, bisa berupa sekularisme, bisa juga yang lainnya, seperti sosialisme atau marxisme. Ini karena nasionalisme adalah ide kosong yang bisa dikawinkan dengan ide apa pun dari sumber mana pun. Sebaliknya, dasar negara khilafah adalah akidah Islam saja.

Dari segi ikatan, juga ada perbedaan. Dalam negara bangsa, ikatannya adalah ikatan kebangsaan. Dalam khilafah, ikatannya adalah akidah Islam. Dari segi kepentingan tertinggi, negara bangsa mengenal apa yang disebut "kepentingan nasional" yang dirumuskan oleh elite politiknya, baik kepentingan dalam negeri maupun kepentingan luar negeri. Dalam khilafah, kepentingan tertinggi adalah kepentingan umat (*mashalih al-ummah*), yang tunduk kepada syariah Islam. Secara garis besar kepentingan umat tercermin dalam dua hal. *Pertama*, penerapan syariah Islam dalam segala bidang kehidupan (politik dalam negeri). *Kedua*, penyebaran dakwah Islam ke luar negeri dan

Jihad fi sabilillah (politik luar negeri).

Dari segi batas wilayah, negara bangsa akan memiliki batas teritori yang tetap. Adapun batas wilayah khilafah tidak tetap, melainkan akan terus meluas seiring dengan politik luar negerinya, yaitu penyebaran dakwah Islam dengan jalan *jihad fi sabilillah* (M Husain Abdullah, *Mafahim Islamiyyah*, II/42-44).

Dari segi sistem hukum. Dalam negara bangsa, sistem hukumnya adalah hukum nasional, yang bisa jadi berupa macam-macam sistem hukum yang dicampur aduk menjadi satu. Kalaupun ada satu sistem hukum, tidak pernah menjadikan hukum Islam (syariah) sebagai sistem hukum tunggal. Di Indonesia, misalkan, berlaku tiga sistem hukum: hukum Barat, hukum adat dan hukum Islam. Dalam khilafah, sistem hukumnya hanyalah syariah Islam, tidak ada yang lain.

Dari segi bendera dan bahasa, negara bangsa akan mempunyai bendera dan bahasa nasional masing-masing. Dalam khilafah, bendera dan bahasa resminya hanya satu, yaitu bendera dan bahasa yang telah ditetapkan syariah dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Benderanya berupa bendera Islam yang dicontohkan Rasulullah SAW yaitu *liwa'* dan *rayah*. *Liwa'* adalah bendera berwarna putih dengan tulisan hitam yang berbunyi: "*La ilaha illallah Muhammadur Rasulullahu*". *Rayah* adalah bendera berwarna hitam dengan tulisan putih yang berbunyi: "*La ilaha illallah Muhammadur Rasulullahu*". (Lihat: Abdul Hayyi al-Kattani, *At-Taratib al-*

Idariyah).

Bahasa resmi negara khilafah juga hanya satu, yaitu bahasa Arab, yang diberlakukan dalam bidang pemerintahan, pendidikan dan urusan negara lainnya, seperti diplomasi dan dakwah ke luar negeri. Namun, ini bukan berarti haram hukumnya menggunakan bahasa lokal antar individu rakyat (Lihat: Taqiyuddin an-Nabhani, *Muqaddimah ad-Dustur*).

Keunggulan konsep khilafah dapat dirumuskan dengan kata *al-quwwah wat tha'ah* (kekuatan dan ketaatan). Artinya, khilafah akan mempunyai kekuatan yang tidak dimiliki oleh sebuah negara bangsa. Pasalnya, dengan khilafah, umat Islam di seluruh dunia akan menjadi satu kesatuan yang bersatu. Persatuan ini dengan sendirinya akan menyatukan pula segala sumber daya yang dimiliki oleh umat Islam, seperti sumber daya manusia (tentara, ahli, pekerja, dll) dan sumber daya alam dalam berbagai jenisnya (minyak, gas, emas, dll).

Jelas persatuan ini akan menjadi satu kekuatan dahsyat yang dapat memberikan maslahat yang besar bagi umat Islam. Persatuan tersebut juga akan menjadi satu kekuatan besar untuk melawan hegemoni kapitalisme global yang kejam dan rakus di bawah kepemimpinan AS saat ini.

Lantas, Anda sebagai Muslim, mau pilih mana? Khilafah atau negara bangsa?[]

Demam Khilafah, Terdiagnosa Fobia Islam?

Oleh: **Chusnatul Jannah**, Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban

Khilafah kembali mengopini. Dibahas lagi dan lagi. Mungkin inilah cara Allah menjadikan ide khilafah tak pernah mati. Disinggung sendiri oleh pembencinya. Baik penguasa, pejabat negara, bahkan kepala sekolah berbasis agama.

Isu khilafah kembali mengopini tatkala ada guru yang ingin merevisi buku fikih lantaran adanya buku digital mata pelajaran Fikih untuk kelas XII Madrasah Aliyah di Jombang berisi materi tentang khilafah atau pemerintahan Islam.

Buku digital tersebut salah satunya digunakan MA Terpadu Al-Aqobah 4, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Berkas (*file*) buku yang sudah diunduh pihak sekolah, bagian sampulnya bertuliskan *Buku Siswa Fikih Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013*. Kepala MA Terpadu Al-Aqobah 4 Fahrurrozi mengaku menggunakan buku digital tersebut untuk mengajar para siswa kelas XII. Penggunaan buku digital yang diunduh dari internet digunakan di sekolahnya mulai tahun ajaran 2019-2020. (Detik.com, 30/7/2019)

Fahrurrozi berharap buku digital itu segera direvisi agar anak-anak tak menggunakan istilah khilafah. "Namun kata khilafah kami bahasakan pemerintahan saat mengajar ke anak-anak. Pada intinya ajaran pemerintahan kita sudah sesuai ruh di Alquran dan hadits, pemerintahan di negara kita sudah sesuai Alquran dan hadits,"

ujarnya sebagaimana dilansir *detik.com*, 30/7/19.

Pembahasan khilafah memang tiada dua. Setelah dimonsterisasi sebagai ajaran radikal, ternyata tak membuatnya padam. Khilafah kian menggema. Jika ada yang fobia khilafah, maka kemungkinan ia terdiagnosa fobia Islam. Bagaimana tidak, saking takutnya istilah khilafah ini makin dikenal, mereka melakukan berbagai upaya untuk menyembunyikan sebuah kebenaran. Ya, kebenaran bahwa khilafah itu ajaran Islam. Disebutkan dalam kitab-kitab ulama muktabar. Diyakini imam empat madzhab tentang kewajiban menegakkannya. Sebegitunya alergi dengan khilafah. Seolah anak muda Islam tak boleh tahu bahwa khilafah adalah bentuk pemerintahan Islam yang pernah diterapkan oleh Khulafaur Rasyidin. Diteruskan khalifah setelah mereka.

Sangat wajar bila dalam bab pemerintahan Islam disinggung masalah khilafah. Karena khilafah memang tak bisa dilepaskan dari syariat Islam. Khilafah itu bukan barang baru. Bukan ide yang 'diperdagangkan' kelompok tertentu. Ia murni ajaran Islam. Jujurlah dalam menilai itu. Jangan terlalu fobia. Sebagaimana orang-orang Barat yang berhasil memfobiakan khilafah dengan dikaitkan ISIS dan isu terorisme. Diskusi khilafah dianggap radikal. Sementara diskusi marxisme hingga kapitalisme dibolehkan.

Perlu diketahui, label-label moderat dan radikal adalah strategi Barat untuk melemahkan kekuatan Islam.

Memecah belah umat agar kebangkitan Islam tak terjadi. Bagi kalangan Muslim yang menerima nilai-nilai Barat, mereka menyebutnya moderat. Bagi kelompok Muslim yang menolak nilai-nilai Barat seperti demokrasi, sekularisme, kapitalisme, dan isme lainnya, mereka menyebutnya radikal. Sudah jamak diketahui, istilah serupa seperti terorisme dan radikalisme juga bagian strategi Barat menjauhkan umat dari Islam. Harusnya itu dipahami agar kita tak terjebak dengan istilah ciptaan mereka.

Apa masalahnya dengan khilafah? Sebagai Muslim, harusnya bangga dengan istilah itu. Bukan malah fobia. Kalau sudah fobia, maka waspadalah! Virus fobia Islam tengah menggerogoti Anda. Bisa melemahkan iman hingga menimbulkan keraguan tentang Islam dan ajarannya.

Mari bangga bicara khilafah. Jangan termakan fitnah yang diluncurkan musuh Islam. Jangan tertipu *framing* yang diciptakan para pembenci Islam. Dan jangan terjebak dengan narasi radikal. Daripada generasi muda kita terpapar virus liberal dan sekuler, lebih baik mereka belajar Islam dan ajarannya secara kaffah. Dengan belajar Islam mereka tak akan mudah terjebak dengan pergaulan ala sekuler dan pemahaman ala liberal. Marilah menjadi generasi radikal: *ra-jin*, *terdi-dik*, dan *berak-al*.[]



Kirimkan opini Anda terkait isu aktual dengan perspektif Islam ke email: pembaca.tabloidmu@gmail.com
Panjang tulisan sekitar 3500 karakter.
Sertakan pula foto diri dan biodata singkat.

Belanda Resmi Memberlakukan Larangan Niqab Kaum Muslim Menolak

"Hari ini adalah hari yang bersejarah", "Langkah selanjutnya adalah pelarangan pemakaian kerudung."



Tepat 1 Agustus 2019 lalu pemerintah Belanda resmi memberlakukan pelarangan niqab atau burqa bagi Muslimah. Gagasan pelarangan ini sudah digodok sejak tahun 2005 yang diajukan oleh pimpinan partai sayap kanan milik Geert Wilders, Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Partai Kebebasan dan Demokrasi, VVD).

Geert Wilders, pimpinan partai populis kanan Belanda dipastikan tersenyum lebar. Dengan keputusan itu, burqa atau niqab termasuk helm motor "full face" dilarang dikenakan di gedung-gedung dan moda transportasi publik. Siapapun yang melanggar aturan ini akan dikenakan denda sebesar 150€ atau sekitar Rp 2,3 juta. Meski demikian penggunaan burqa atau kain penutup wajah jenis lain di tempat-tempat terbuka masih diizinkan.

Partai pimpinan Wilders ini memang sering mengampanyekan hal yang dinilai diskriminatif terhadap kaum Muslim Belanda, seperti mengkampanyekan penutupan masjid, melarang peredaran Alquran dan pembatasan imigran dari negara mayoritas Muslim terutama yang mengalami konflik seperti Suriah atau Sudan.

Di *twitter*-nya Wilders menuliskan, "Hari ini adalah hari yang bersejarah", "Langkah selanjutnya adalah pelarangan

pemakaian kerudung." Dia menulis lagi, "Jika kalian ingin memakai burqa, pergi saja ke Arab Saudi atau Iran."

Namun tidak jelas apakah larangan burqa akan bisa ditegakkan sepenuhnya. Saat ini sejumlah pemerintah kota, termasuk rumah sakit, operator transportasi publik dan kepolisian mengklaim tidak akan menaati aturan tersebut. Wali Kota Amsterdam Femke Halsema mengatakan kepada stasiun televisi lokal AT5 pada tahun lalu, pihaknya tidak berniat menegakkan larangan burqa di kotanya, demikian dilansir surat kabar *Politico*. Pemerintah kota Rotterdam dan Utrecht juga berniat mengambil langkah yang sama.

Pelarangan memakai burqa di beberapa negara juga banyak dikeduk sebagai bentuk pelanggaran HAM. Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam putusannya menyatakan bahwa UU Prancis yang melarang burqa di muka umum melanggar hak kebebasan beragama para perempuan Muslim. UU itu disebut "secara tidak proporsional" menargetkan minoritas perempuan Muslim yang menggunakan burqa. Komisi juga menyatakan, Paris tidak cukup menjelaskan mengapa larangan itu diperlukan.

UU serupa ada di beberapa negara Eropa lain seperti

termasuk Austria, Belgia, Denmark dan Belanda. Badan PBB itu menyatakan prihatin dengan dua kasus yang dipaparkan perempuan Prancis yang didenda karena mengenakan niqab, pakaian penutup seluruh tubuh kecuali bagian mata. Menurut Komisi HAM PBB, larangan itu melanggar kebebasan beragama para perempuan Muslim yang mengenakan pakaian seperti itu.

Prancis tahun 2010 memberlakukan UU yang melarang orang mengenakan "segala macam pakaian yang dimaksudkan untuk menutupi wajah" di depan umum. Mereka yang melanggar larangan tersebut bisa terkena sanksi denda sebesar 150 Euro. Putusan Komisi HAM PBB bertentangan dengan putusan Pengadilan Eropa Hak Asasi Manusia (ECHR) dari tahun 2014, yang menguatkan UU di Prancis dan menolak argumen bahwa UU itu melanggar kebebasan beragama.

Memicu Serangan

Pelarangan ini menjadi kontroversial bagi sebagian masyarakat Belanda khususnya bagi sekitar 1 juta Muslim yang ada di sana. Okay Pala, Juru Bicara Hizbut Tahrir Belanda, menyatakan menolak dan menentang kebijakan tersebut.

Dia mengatakan, "Pelarangan niqab ini tidak hanya akan menciptakan ketidakamanan bagi kaum Muslimah yang mengenakan niqab tapi juga bagi Muslimah yang tidak memakai, atau Muslimah yang memakai kerudung dan jilbab. Akibatnya, mereka akan menjadi sasaran pelecehan verbal maupun non-verbal."

Larangan niqab ini banyak dikritik karena dinilai berpotensi menyudutkan Muslimah, tentunya mereka tidak akan bisa lagi bebas untuk keluar rumah karena khawatir akan dipersekusi bahkan ditangkap oleh pihak keamanan. Selain itu larangan ini juga berpotensi memicu gelombang "penangkapan oleh warga," yakni ketika penduduk memanggil polisi untuk menangkap perempuan bercadar. Ada sekitar 150-400 Muslimah di Belanda yang memakai niqab atau burqa, dan 5 persen remaja di Belanda adalah Muslim.

Sementara itu, pengamat politik dunia Islam Budi Mulyana mengatakan, pelarangan niqab di Belanda ini kembali menunjukkan standar ganda Barat. Di satu sisi, menurutnya, Barat mengklaim sebagai pembela demokrasi dengan menekankan kebebasan beragama. Di sisi lain memakai hijab yang merupakan bagian dari ajaran Islam dilarang.

Budi Mulyana juga mengaitkan larangan ini akan semakin memicu fobia Islam yang meningkat di Barat saat ini. "Islamophobia akan mendapatkan legitimasi negara dengan larangan-larangan seperti ini dan ini akan memicu peningkatan penyerangan terhadap para Muslimah di Eropa," tegasnya.

Saat ini 15 negara telah mengeluarkan aturan serupa, termasuk Maroko dan Tunisia yang mayoritas penduduknya Muslim. Sedangkan di Eropa, Prancis, dan Belgia sudah terlebih dahulu menerapkan pelarangan mengenakan niqab atau burqa. **gesang**

Serangan Terhadap Muslim di Barat Meningkat

Beberapa tahun terakhir serangan terhadap Muslim di negara-negara Barat terus meningkat. Penembakan brutal yang menewaskan 50 orang di Selandia Baru menjadi serangan terhadap Muslim di negara Barat yang terbaru. Dilansir di Aljazeera, Ahad (17/3) berikut beberapa serangan mematikan terhadap Muslim di negara-negara Barat.

AS - Agustus 2016 lalu seorang Imam New York, AS dan rekannya ditembak dan meninggal di dekat jalanan ramai di dekat Masjid mereka di Queens. Polisi mengatakan penembakan itu bermotif kebencian. Penembaknya ditangkap dan didakwa atas pembunuhan.

Swiss - Desember 2016 seorang laki-laki berusia 30 tahun masuk masjid di pusat kota Zurich. Ia menembak beberapa laki-laki yang sedang minum teh setelah sholat. Tiga orang terluka atas kejadian tersebut.

Sebelum serangan tersebut pelaku membunuh korban lainnya. Pelaku melarikan diri tapi ditemukan tewas di sungai yang berada di dekat Masjid tempat ia melakukan serangan.

Kanada - Januari 2017 Alexander Alexandre Bissonnette, 27 tahun membunuh enam Muslim yang sedang beribadah di sebuah Masjid di Quebec. Sejumlah orang juga terluka dalam penembakan tersebut.

Salah satu korban tewas berusaha menyerang pelaku. Sekitar 19 orang terluka dalam serangan itu. Bissonnette dipenjara seumur hidup untuk mempertanggungjawabkan tindakannya.

AS - Mei 2017 dua orang ditikam sampai tewas ketika mereka membela dua orang perempuan Muslim yang dihina seorang laki-laki di Oregon. Korban ketiga terluka dengan serius. Penyerangnya diidentifikasi Jeremy Joseph Christian yang berusia 35 tahun.

Inggris - Juni 2017 seorang laki-laki 48 tahun menabrakkan mobil van ke rombongan Muslim yang berjalan menuju Masjid. Peristiwa itu menewaskan laki-laki berusia 51 tahun dan melukai sembilan orang lainnya.

"Saya ingin membunuh semua Muslim, saya melakukan bagian saya," kata pelaku Darren Osborne, usai melakukan aksinya tersebut.

Osborne mendapat hukuman 43 tahun penjara. Ia didakwa atas kejahatan yang berhubungan dengan teroris.

Spanyol - Agustus 2017 sejumlah kejahatan terhadap Muslim di Spanyol dilaporkan meningkat. Terutama setelah serangan mematikan di masjid-masjid di Barcelona dan Cambrils ketika masjid-masjid di kota-kota Granada, Fuenlabrada, Logrono, dan Sevilla dilecehkan dan dibom.

Tiga orang Maroko diserang secara brutal di Navarre. Seorang perempuan Muslim terluka parah setelah diserang di depan stasiun metro di Madrid.

Selandia Baru - Maret 2019 sebanyak 50 orang tewas dalam penembakan yang dilakukan warga Australia Brenton Tarrant di dua masjid wilayah Christchurch, Selandia Baru. Ia sudah ditangkap dan akan segera menghadapi dakwaan. **af**

Dulu Inggris Minta Bantuan Kekhalifahan Utsmani

Ratu Elizabeth berharap aliansi bersama Sultan itu akan memberikan bantuan yang sangat dibutuhkan dari agresi militer Spanyol.



Murad III, left, Elizabeth I, right.

Satu hal penting dalam hubungan luar negeri Kerajaan Inggris, namun seolah terlupakan, adalah hubungan Ratu Elizabeth I dengan Khilafah Utsmani. Sejak naik tahta tahun 1558, Ratu Elizabeth, mulai mencari aliansi baru dengan penguasa negeri-negeri Islam di Iran, Turki, dan Maroko. Hal ini dilakukan Ratu Elizabeth, karena Inggris yang terancam invasi Kerajaan Katolik Spanyol.

Setelah menghadapi kenyataan, Kerajaan Inggris yang sebagian besar menganut Kristen Protestan tidak mau tunduk pada kekuasaan Katolik. Paus pada tahun 1570, berupaya mengucilkan Ratu Elizabeth dan menyerukan agar dia dilucuti dari mahkotanya. Invasi besar pun direncanakan. Tidak hanya itu, pedagang Inggris dilarang berdagang dengan pasar Belanda dan Spanyol yang kaya. Keterasingan ekonomi dan politik ini jelas mengancam Kerajaan Inggris saat itu.

Ratu Elizabeth mencari jalan keluar dengan menjalin hubungan dengan Khilafah Utsmani. Saingan satu-satunya Spanyol adalah Khilafah Utsmani, yang saat itu diperintah oleh Sultan Murad III. Kekuasaannya terbentang dari Afrika



Utara melalui Eropa Timur hingga ke Samudera Hindia. Khilafah Utsmani telah berperang melawan Habsburg selama beberapa dekade, dengan menaklukkan sebagian wilayah Hongaria.

Ratu Elizabeth berharap aliansi bersama Sultan itu akan memberikan bantuan yang sangat

dibutuhkan dari agresi militer Spanyol. Secara ekonomi juga akan memberikan jalan pedagang Inggris untuk memasuki pasar yang menguntungkan di Dunia Timur. Pada tahun 1580-an Ratu Elizabeth menandatangani perjanjian komersial dengan Utsmani yang akan berlangsung lebih dari 300 tahun.

Setelah melihat manfaat positif dari hubungan ini, Ratu Elizabeth menulis surat, sebagai permohonan kepada Khalifah Murad saat itu. Ratu Elizabeth memuji Sultan Murad sebagai penguasa paling kuat kerajaan Turki, penguasa yang paling berdaulat dari Imperium Timur. Ribuan pedagang Inggris melintasi banyak wilayah seperti Aleppo di Suriah, dan Mosul di Irak. Perjalanan mereka jauh lebih aman daripada perjalanan melalui Eropa yang Katolik, karena berisiko jatuh ke tangan inkuisisi.



Para bangsawan Inggris bertukar mesiu yang dikapalkan ke Turki dengan sutra dan rempah-rempah dari Timur sehingga mengubah Inggris. Gula, sutra, karpet, dan rempah-rempah mengubah apa yang dimakan orang Inggris, bagaimana cara mereka mendekorasi rumah dan bagaimana mereka berpakaian. Kata-kata seperti "candy" dan "turquoise" (dari kata "Turkish stone") menjadi hal yang biasa.

Otoritas Utsmani melihat kemampuan mereka untuk 'menyerap' orang-orang dari semua agama sebagai tanda kekuasaan, bukan sebagai tanda kelemahan. Sebagian orang Inggris bahkan masuk Islam, seperti Samson Rowlie, seorang pedagang Norfolk yang mengganti namanya menjadi Hassan Aga. Seorang kepala bendahara untuk Aljazair, yang melihat Islam jalan hidup yang lebih baik.

Namun, walaupun sukses dalam perdagangan, ekonomi Inggris tidak dapat bergantung dari perdagangan yang jaraknya jauh. Setelah meninggalnya Ratu Elizabeth tahun 1604, raja yang baru, Raja James I, menandatangani perjanjian perdamaian dengan Spanyol yang mengakhiri pengucilan Inggris. Yang sering dilupakan persekutuan Inggris dengan Khilafah pada dasarnya menyelamatkan tahta Ratu Elizabeth I selama isolasi yang dilakukan kerajaan Katolik. **riza**

KRONIK MANCANEGERA

Pemerintah Cina Larang Tulisan Arab dan Simbol Islam

Pemerintah Republik Rakyat Cina (RRC) memerintahkan restoran halal dan kedai makanan menghilangkan aksara Arab dan simbol-simbol Islam. Kebijakan otoritas di ibu kota RRC, Beijing ini merupakan langkah terkini yang diambil pemerintah untuk menghalau gerakan yang mereka sebut pan-halal.

Karyawan di 11 restoran dan toko di Beijing yang menjual produk halal menyatakan pada *Reuters* bahwa para pejabat memerintahkan mereka menghapus gambar yang berhubungan dengan Islam, seperti bulan sabit dan kata halal yang ditulis dalam bahasa Arab di depan toko. Pegawai pemerintah dari berbagai kantor memberi informasi seorang manajer sebuah toko mi Beijing untuk menutupi halal dalam bahasa Arab pada papan nama tokonya.

"Mereka mengatakan ini adalah budaya asing dan Anda harus menggunakan lebih banyak budaya RRC," kata manajer tersebut, seperti dilansir *Reuters*, Rabu (31/7) kemudian diberitakan *republika.co.id* esoknya. Seperti semua pemilik restoran dan karyawan yang ditanyai, manajer itu menolak namanya ditulis karena sensitivitas masalah tersebut.[]

Trump Loloskan Penjualan Senjata ke Saudi Rp113 Triliun

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menggunakan hak veto terhadap tiga resolusi Senat AS yang memblokir penjualan senjata senilai Rp113 triliun ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.

Trump mengatakan ketiga resolusi itu "akan melemahkan daya saing Amerika di dunia" dan merusak hubungan dengan sekutu-sekutunya. Demikian laporan yang dikutip *inilah.com* dari *BBC*, Kamis (25/7/2019).

Hak veto itu digunakan setelah Senat yang dikuasai Partai Republik sepakat mencegah penjualan senjata ke Arab Saudi dan UEA.

Sejumlah anggota Senat khawatir senjata-senjata AS akan dipakai kedua negara tersebut untuk menghadapi warga sipil di Yaman.

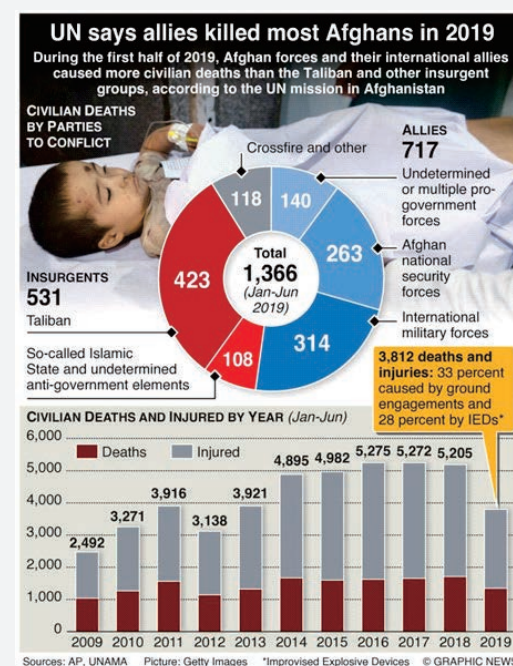
Sebelumnya, Kongres AS mengecam peran Arab Saudi dalam krisis Yaman serta pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi tahun lalu.

Menanggapi veto Trump, Senat akan menggelar pemungutan suara dalam beberapa hari mendatang guna memutuskan apakah veto itu harus dilawan balik, kata Pemimpin Fraksi Republik di Senat, Mitch McConnell.

Namun, beberapa analis berpendapat bahwa hampir bisa dipastikan Senat tidak mampu menggalang dua-pertiga dari seluruh anggota untuk melawan veto Trump.

Trump telah tiga kali menggunakan hak veto sejak menjabat sebagai presiden AS.[]

Siapa pun Pembantainya, Kaum Musliminlah Korbannya



Sebagian besar warga sipil tewas oleh pasukan koalisi Afghanistan dan pasukan internasional di Afghanistan pada paruh pertama 2019 daripada oleh mujahidin Taliban dan gerilyawan lainnya, menurut misi PBB untuk negara tersebut.

Laporan itu dilaporkan merujuk pada warga sipil yang tewas selama operasi militer Afghanistan dan AS melawan gerilyawan, seperti serangan udara dan serangan malam hari di tempat persembunyian mujahidin dan gerilyawan. Pasukan koalisi selalu meng-

klaim bahwa mujahidin selalu bersembunyi di tempat-tempat sipil.

AS secara resmi mengakhiri misi tempurnya di Afghanistan pada 2014 tetapi masih melancarkan operasi udara secara luas dan dukungan lain kepada pasukan Afghanistan yang memerangi gerilyawan.

Laporan PBB mengatakan 403 warga sipil tewas oleh pasukan Afghanistan dalam enam bulan pertama tahun ini dan 314 lainnya oleh pasukan internasional, totalnya 717. Jumlah itu, menurut laporan tersebut, lebih banyak dibandingkan dengan 531 yang dibunuh oleh Taliban dan gerilyawan lainnya selama periode yang sama.[] **joy dari berbagai sumber**

Madrasah Ujian Sepanjang Hayat

"Lâ yazâlu al-balâ' u bi al-mu'minîn aw al-mu'minah fi nafsihi wa fi mâlihi wa fi waladihi hattâ yalqâlLâha wa mâ 'alayhi min khathî' atin
 Ujian akan terus menghampiri orang Mukmin dan Mukminah pada diri, anak, dan hartanya, hingga ia menjumpai Allah dan tidak ada kesalahan yang harus dia tanggung (HR Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Hibban, al-Hakim, al-Baihaqi, Abu Ya'la dan al-Bukhari di al-Adab al-Mufrad).

I mam at-Tirmidzi berkata: "Ini adalah hadits hasan shahih". Al-Hakim berkata: "Ini adalah hadits shahih menurut syarat Muslim tetapi tidak dikeluarkan oleh keduanya dan ia memiliki syahid shahih". Adz-Dzahabi di dalam *at-Talkhish* berkomentar: "Menuurut syarat Muslim".

Hadits ini menjelaskan bahwa ujian akan terus menghampiri seorang Mukmin –dalam riwayat lain seorang hamba—selama ia masih bernafas. Bahkan hidup dan mati itu sendiri merupakan ujian untuk mengetahui siapa hamba yang paling baik amalnya (QS al-Mulk [67]: 2).

Balâ' secara bahasa artinya *imtiḥân wa al-ikhtibâr* (ujian dan cobaan). Dan menurut Ibnu al-Atsir dan lainnya, *balâ'* itu terjadi dalam kebaikan (*khayr*) dan keburukan (*syarr*). Maka makna hadits tersebut adalah bahwa ujian dan cobaan dalam bentuk kebaikan (*khayr*) dan keburukan (*syarr*) akan terus menimpa Mukmin atau hamba pada umumnya. Allah SWT pun menegaskan hal itu dalam firman-Nya (artinya): "Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya)" (TQS al-Anbiyâ' [21]: 35).

Ujian dan cobaan (*balâ'*) dapat berupa kebaikan ataupun keburukan, kenikmatan maupun musibah. Hal ini harus senantiasa disadari. Umumnya, orang menilai ujian dan cobaan itu berupa keburukan atau musibah. Sebaliknya jarang sekali, kenikmatan dan sesuatu yang baik dinilai sebagai ujian. Namun nash-nash syara' menjelaskan bahwa semuanya merupakan ujian untuk menguji apakah orang itu bisa sabar saat menghadapi musibah dan bersyukur saat mendapat kenikmatan dan kebaikan. Dan apakah dia tetap istiqamah di jalan-Nya dalam dua keadaan itu.

Kesenangan yang didapatkan merupakan ujian apakah menjadi orang yang bersyukur atau tidak. Tidak jarang orang lulus ketika diuji dengan musibah dan kesusahan, namun ia gagal saat diuji dengan kenikmatan dan kesenangan. Kesadaran bahwa kesenangan itu merupakan ujian akan menuntun seseorang untuk tetap terjaga dan tidak terlena dengan kenikmatan itu lantas kehilangan keistiqamahan dan terjebak menikmati kesenangan itu.

Sebaliknya saat musibah atau keburukan menimpa, itu juga merupakan ujian apakah orang itu bersabar menghadapinya dan ridha menerimanya ataukah tidak. Jika dia mampu bersabar maka itu adalah kebaikan yang luas. Karena setiap musibah yang menimpa sekecil apapun, jika dihadapi dengan kesabaran maka itu bisa menggugurkan dosa dan menaikkan derajat di hadapan Allah. Rasul SAW pernah bersabda: Tidaklah sebuah duri mengenai seorang Muslim atau lebih dari itu kecuali dengannya Allah mengangkatnya satu derajat dan menghapus darinya satu kesalahan" (HR Tirmidzi, Muslim, Ahmad, Ibn Hibban, al-Baihaqi).

Dalam riwayat lainnya dikatakan: "Niscaya dengan



musibah itu Allah mencatat satu kebaikan baginya". Yaitu pahala atas keridhaannya terhadap qadha, kesabarannya, dan bersyukur serta hanya mengadukan musibahnya kepada Allah SWT.

Karenanya bagi orang Mukmin, semuanya akan menjadi kebaikan. Rasul bersabda: "Menakjubkan perkara seorang Mukmin itu, sesungguhnya semua urusannya merupakan kebaikan. Hal itu tidak menjadi milik seorang pun kecuali orang Mukmin. Jika mendapat kesenangan ia bersyukur maka itu merupakan kebaikan baginya. Dan jika ditimpa kesusahan ia bersabar maka itu merupakan kebaikan baginya" (HR Ahmad, Muslim, ad-Darimi, Ibn Hibban dan al-Baihaqi).

Kuncinya senantiasa menyadari bahwa semuanya, kebaikan maupun keburukan, merupakan ujian. Lalu disertai dengan memadukan sikap syukur dan sabar dalam semua keadaan. Dengan itu, semuanya akan menjadi kebaikan. ■ **yahya abdurrahman**

LIVE ON AIR

DaktaFM

Seretan Dunia Islam

ACARA INI DAPAT DINIKMATI SECARA LIVE
 MELALUI AUDIO STREAMING DI WWW.DAKTA.COM

SETIAP SENIN
 JAM 07.30-08.00 WIB



BERSAMA:

UST MUJIYANTO

(REDAKTUR MEDIA UMAT)

ACARA INI TERSELENGGARA ATAS KERJASAMA:



Alhamdulillah Susu Super Goat hadir sebagai susu kambing dengan kualitas super, kandungan gizi yang lengkap dan banyak mengandung manfaat untuk kesehatan. Sangat cocok untuk pasien-pasien saya dari anak-anak sampai orang tua, karena memiliki rasa yang lezat dan banyak manfaat. Alhamdulillah sudah banyak teman sejawat saya yang juga mengkonsumsi Super Goat sekaligus diberikan kepada pasien-pasien mereka.



[DR. ARI WIRASTO, OWNER KLINIK DOKTER ARI-RIAU]

BISNIS NO MODAL UTANG SUPERGOAT MAU?

Potensi penghasilan 80 juta / bulan
Dibimbing dan tidak ada resiko bangkrut

DAFTAR GRATIS DENGAN CARA

Ketik NAMA_USIA_ASAL KOTA, KIRIM KE WA :

0812 - 8261 - 6461

KUOTA TERBATAS, PENDAFTARAN PALING LAMBAT TANGGAL 25 AGUSTUS 2019



[IBU WIDIASTUTI, PEBISNIS SUPER GOAT SUMATRA]

Doa saya ya Allah kalau memang eng-Kau meridhoi hamba menjalankan usaha maka berikan hamba usaha yang beromset 100 juta perhari agar saya bisa bangun masjid, pesantren dan rumah tahfiz, kemudian sampai hari Allah belum mengabulkan 100 juta per hari, tapi Allah sudah mengabulkan omsetnya 450 juta per bulan dan saya memulai Super Goat dari 1 dus.

MONEY BACK GUARANTEE 100%

Jika anda mengkonsumsi 8 kotak tidak mendapatkan manfaat / perubahan apapun, uang anda akan di kembalikan tanpa di tanya.



Diproduksi oleh:

Etta Indotama
Sleman, Yogyakarta 55551 - Indonesia

BPOM RI
BPOM RI NO. 8101200047

BADAN POM
BPOM RI NO. 8101200047

DAPATKAN DISCOUNT SPECIAL

Tarif Iklan

URAIAN	UKURAN	HARGA
1 Halaman Back Cover	255 X 350 mm	Rp 16,000,000
1 Halaman Dalam	255 X 340 mm	Rp 12,000,000
½ Halaman Dalam	255 X 170 mm	Rp 8,000,000
1/4 Halaman Dalam	125 X 170 mm	Rp 4,000,000
1/8 Halaman Dalam	125 X 85 mm	Rp 2,000,000
1/16 Halaman Dalam	125 X 43 mm	Rp 1,000,000
Advetorial 1 Halaman	520 X 340 mm	Rp 11,000,000
Center Spread (2 Halaman)	520 X 340 mm	Rp 36,000,000

Ketentuan Iklan

- ✓ Materi iklan dikirimkan selambat-lambatnya 1 minggu sebelum terbit ke email: iklan.tabloidmu@gmail.com
- ✓ Materi iklan dalam bentuk softcopy dengan format CDR/JPG/TIF resolusi 300 dpi, CMYK.
- ✓ Desain iklan menjadi tanggung jawab pihak pemasang iklan.
- ✓ Materi iklan tidak boleh bertentangan dengan aturan Islam, serta tidak menyinggung hak cipta orang lain dan tidak memuat hal-hal yang dianggap fitnah, penghinaan, atau merugikan nama baik pihak lain.
- ✓ Pihak pemasang bertanggung jawab sepenuhnya apabila dikemudian hari terjadi gugatan oleh pihak lain atas isi materi iklan tersebut.
- ✓ Pembayaran dilakukan maksimal 1 minggu sebelum terbit.
- ✓ Pembayaran di transfer ke Rekening:
BNI Syariah: 0245 8009 73 atau
BSM: 7000 5898 47
An. Budi Darmawan.

Informasi :
0857.1713.5759

MediaUmat tabloid
mediaumat.news
Memperjuangkan Kehidupan Islam

Seluruh Staf dan Redaksi
Tabloid Media Umat, Mengucapkan:

Selamat Hari Raya Idul Adha 1440 H

*Wujudkan Kepasrahan, Ketundukan,
dan Ketaatan Total Kepada Allah SWT*